



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

Nomor : Kep / 260 / VI / 2021

tentang

**RENCANA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA T.A. 2022**

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara T.A. 2022, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015;
 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep / 572 / XI / 2009 tanggal 2 November 2009 tentang Draf Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Polri;
 8. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor: Kep/415/XI/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Renstra Polda Sultra 2020-2024;
 9. Surat

9. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/571/V/REN.2.3./2021/Srena tanggal 10 Mei 2021 perihal pagu indikatif Polda/Satker T.A. 2022;
10. Perkiraan Intelijen Keamanan Polda Sultra Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara T.A. 2022 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja;
 2. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari

pada tanggal : 29

Juni

2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA



Drs. YAN SULTRA I., S.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth :

Distribusi A, B dan C Polda Sultra.

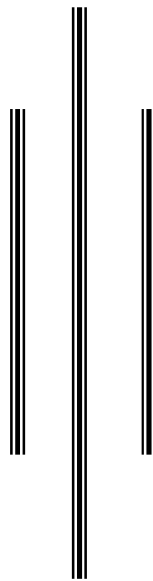
Tembusan :

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Para Asisten Kapolri.
5. Karojakstra Srena Polri.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA



RENCANA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2022



Kendari, 29 Juni 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I LATAR BELAKANG	
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan Daerah	3
b. Analisis SWOT	47
2. Identifikasi Masalah	71
BAB II TUJUAN dan SASARAN	
1. Visi dan Misi	72
2. Tujuan Jangka Menengah	72
a. Tujuan Jangka Menengah Polri	72
b. Tujuan Jangka Menengah Polda Sultra	73
3. Sasaran Prioritas	73
a. sasaran prioritas Polri tahun 2022	73
b. sasaran prioritas Polda Sultra tahun 2022.	73
BAB III ARAH KEBIJAKAN	
1. Kebijakan Polri tahun 2022	74
2. Kebijakan Polda Sultra Tahun 2022	89
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN dan PAGU INDIKATIF	
1. Program dan Kegiatan Polda Sultra.	99
2. Pagu Indikatif Polda Sultra	158
BAB V PENUTUP	
Penutup	164
Lampiran-Lampiran	
- RENCANA KERJA TAHUNAN	
- FORM APLIKASI RENJA KL	



RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

LATAR BELAKANG

1. Kondisi umum.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari tahapan Rencana Strategis Polda Sultra 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polda Sultra T.A. 2021 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polda Sultra T.A. 2022. Rencana Kerja Polda Sultra T.A. 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polda Sultra 2020-2024. Rencana Kerja Polda Sultra T.A. 2022 disusun dengan memperhatikan *logical framework Background study* RPJMN 2020-2024, yaitu: (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; 3) pilar keamanan laut; dan (4) pilar keamanan dan ketertiban.

Polri sebagai bagian dari sistem pemerintahan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pengaruh perkembangan lingkungan strategis di tingkat global, regional dan nasional yang dipacu oleh kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mendorong terjadinya perubahan yang cepat di seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta berdampak terhadap penyelenggaraan Pembangunan Nasional Indonesia.

Keamanan dalam negeri sangat dipengaruhi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, yang dapat mempengaruhi hakekat ancaman berupa potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata apabila tidak dikelola dengan baik.

Hakekat ancaman pada tahun 2022 diperkirakan akan semakin kompleks, beberapa agenda nasional maupun daerah akan mempengaruhi dinamika perkembangan situasi antara lain residu Pilkada 2020, program pembangunan, kebijakan pemerintah, giat investasi, pengelolaan kekayaan alam dan lain-lain, yang kesemuanya apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi gangguan Kamtibmas yang mempengaruhi stabilitas Kamtibmas.

Terkait dengan situasi tersebut, Polda Sultra mengedepankan fungsi Intelijen Keamanan guna menyelenggarakan deteksi aksi (deteksi dini) (*early detection*), pemberi peringatan dini (*early warning*) dan cegah dini melalui fungsi Intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan agar mampu melakukan deteksi, memprediksi berbagai bentuk gangguan keamanan, melakukan kontra Intelijen dan penciptaan kondisi bagi pelaksanaan tugas pokok Polri.

Untuk mengantisipasi terjadinya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2022, maka diperlukan Perkiraan Keadaan Intelijen sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam rangka menentukan arah dan strategi kebijakan dalam rangka penanggulangan berbagai bentuk ancaman gangguan Kamtibmas pada tahun 2022 di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Sultra yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan dianalisa dengan pendekatan SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats*) yang digambarkan sebagai berikut:

a. perkembangan

- a. perkembangan aspek kehidupan daerah.

1) Geografi.

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak dibagian selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45'-06°15' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45'-124°30' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Tenggara sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi NTT di Laut Flores, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone.

Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup daratan (jazirah) Pulau Sulawesi dan kepulauan yang memiliki wilayah daratan seluas 38.067,7 Km² atau 3.067.700 Ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 110.000 Km² atau 11.000.000 Ha. Dengan dimekarkannya beberapa daerah wilayah Sultra pada tahun 2014, wilayah administratif Sultra saat ini menjadi 17 wilayah Kab/Kota dengan luas wilayah masing-masing kabupaten/kota bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO.	KAB/KOTA	LUAS WILAYAH (Ha)	%
1.	KOTA KENDARI	30,089	0,79
2.	KOTABAU	22,100	0,58
3.	KAB.KOLAKA	328,359	8,63
4.	KAB.MUNA	192,216	5,05
5.	KAB.KONAWA	443,528	11,65
6.	KAB.BUTON	121,299	3,19
7.	KAB.BOMBANA	300,100	7,88
8.	KAB.KONAWA SELATAN	577,947	15,18
9.	KAB.KOLAKA UTARA	339,167	8,91
10.	KAB.WAKATOB	55,954	1,47
11.	KAB. BUTON UTARA	186,491	4,90
12.	KAB. KONAWA UTARA	510,176	13,40
13.	KAB. KOLAKA TIMUR	363,474	9,55

NO	KAB/KOTA	LUAS WILAYAH (Ha)	%
14.	KAB. KONAWE KEPULAUAN	86,758	2,28
15.	KAB. MUNA BARAT	102,289	2,69
16.	KAB. BUTON TENGAH	95,831	2,52
17.	KAB. BUTON SELATAN	50,992	1,34
JUMLAH		3.806.770	100,00

Selain jazirah tenggara Pulau Sulawesi yang menjadi daratan terluas Provinsi Sulawesi Tenggara, di provinsi ini juga terdapat pulau-pulau yang tersebar di masing-masing Kab/Kota antara lain :

- a) pulau yang terdapat di Kota Kendari yaitu Pulau Bungkutoko;
- b) pulau yang terdapat di Kab. Konawe yaitu Pulau Wawonii, Pulau Karama, Pulau Bokori, Pulau Saponda laut, Pulau Campada, Pulau Labengki, Pulau Bawulu, Pulau Saponda Darat dan Pulau Hari;
- c) pulau yang terdapat di Kab. Kolaka yaitu Pulau Padamarang, Pulau Lambasina Kecil, Pulau Buaya, Pulau Pisang, Pulau Lambasina Besar, Pulau Maniang dan Pulau Lemo;
- d) pulau yang terdapat di Kab. Muna yaitu Pulau Muna, Pulau Tobea Kecil, Pulau Koholifano, Pulau Tobea Besar, Pulau Wataitonea, Pulau Bakealu, Pulau Tiworo (Pulau Maginti, Pulau Balu, Pulau Katela, Pulau Mandi, Pulau Bero, Pulau Rangko, Pulau Maloang, Pulau Sola, Pulau Tobuan, Pulau Kayuangan);
- e) pulau yang terdapat di Kota Baubau yaitu Pulau Makassar;
- f) pulau yang terdapat di Kab. Buton yaitu Pulau Buton, Pulau Talaga Besar, Pulau Talaga Kecil, Pulau Sanciri, Pulau Domalawa, Pulau Tambake, Pulau Liwuto, Pulau Kadatua, Pulau Batu atas, Pulau Siompu, Pulau Kanota dan Pulau Lanone;
- g) di Kab. Konawe Selatan dan Kab. Kolaka Utara tidak terdapat gugusan pulau.
- h) pulau yang terdapat di Kab. Bombana yaitu Pulau Sagori, Pulau Mutaha, Pulau Kambing, Pulau Kabaena dan Pulau Masaloka;

i) pulau

- i) pulau yang terdapat di Kab. Wakatobi yaitu Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, Kapota, Runduma, Hoga, Onemobaa, Sempora dan Sawa.

Kondisi topografi tanah di Sulawesi Tenggara umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang berbuklit-buklit. Diantara gunung dan bukit bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah digunakan untuk usaha mencapai luas 1.868.860 Ha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100 s/d 500 meter di atas permukaan laut.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang tersebar di empat Kabupaten. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi untuk kebutuhan industri besar maupun industri kecil/rumah tangga serta untuk irigasi. Sungai besar seperti Sungai Konawe yang terletak di Kab. Konawe dengan debit air 200 M3/detik dan berdiri sebuah bendungan Wawotobi yang mampu mengairi persawahan di Kabupaten Konawe seluas 18.000 Ha. Selain itu masih banyak sungai-sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tekanan airnya berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi seperti Sungai Lasolo di Kab. Konawe, Sungai Soraya dan Sungai Sampolawa Kab. Buton, Sungai Wandasa dan sungai Kabangka Balano di Kab. Muna serta Sungai Laeyadi Kab. Kolaka.

Provinsi Sulawesi Tenggara dari sudut oceanografi memiliki perairan (laut) yang sangat luas. Luas perairan Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 110.000 Km² atau 11.000.000 Ha. Perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan Wisata Bahari, karena disamping memiliki bermacam-macam hasil ikan, juga memiliki panorama laut yang sangat indah. Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Sulawesi Tenggara yang banyak ditangkap oleh nelayan di daerah ini adalah Cakalang, Teri, Layang, Kembung, Udang dan masih banyak lagi jenis ikan yang lain. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara dan sebagainya.

2) Demografi.

Dengan luas daratan Sultra 38 ribu KM², maka kepadatan penduduk Sultra sebanyak 69 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Sultra sebanyak 46 jiwa/km² dan hasil SP2010 yang mencapai 58 jiwa/km². Sebaran penduduk masih terkonsentrasi di Kota Kendari, meskipun luas geografis sebesar 0,79 persen wilayah Sultra, namun Kendari dihuni oleh 345.107 penduduk atau 13,15% penduduk Sultra. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan di wilayah Sultra tahun 2020 sebagai berikut:

NO	KAB/KOTA	JUMLAH		JUMLAH
		LK	PR	
1.	Kota Kendari	173,987	171,120	345,107
2.	Kota Baubau	79,502	79,746	159,248
3.	Kab. Kolaka	121,339	116,248	237,587
4.	Kab. Muna	105,861	109,666	215,527
5.	Kab. Konawe	133,093	123,918	257,011
6.	Kab. Buton	60,304	58,664	118,968
7.	Kab. Bombana	76,232	74,474	150,706
8.	Kab. Konawe Selatan	158,486	150,038	308,524
9.	Kab. Kolaka Utara	70,441	67,218	137,659
10.	Kab. Wakatobi	55,827	55,575	111,402
11.	Kab. Buton Utara	34,077	32,576	66,653
12.	Kab. Konawe Utara	35,112	32,759	67,871
13.	Kab. Kolaka Timur	62,064	58,635	120,699
14.	Kab. Konawe Kepulauan	18,817	18,233	37,050
15.	Kab. Muna Barat	41,836	42,754	84,590
16.	Kab. Buton Tengah	59,650	59,039	118,689
17.	Kab. Buton Selatan	50,056	48,814	98,870
	Jumlah	1,335,684	1,299,477	2,636,161

Dengan luas wilayah 38.067 km², secara rata-rata setiap KM² wilayah Sulawesi Tenggara ditinggali sekitar 69 orang penduduk dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 4-5 orang. Seiring dengan persebaran penduduk tiap kabupaten/kota, Kota Kendari dengan persentase penduduk sebesar 13,15 persen memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 1.147 jiwa/KM². Sementara tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Konawe Utara sebesar 13 jiwa/KM² dengan persentase penduduk sebesar 2,59 persen.

Piramida penduduk Sulawesi Tenggara sampai tahun 2020 masih bertipe ekspansif, dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Hal ini mengindikasikan angka kelahiran yang cukup tinggi dan ditunjukkan oleh lebarnya dasar piramida. Di sisi lain, angka kematian juga terlihat masih tinggi, ditunjukkan oleh kecil/ sempitnya puncak piramida. Dengan angka kelahiran masih cukup tinggi, trennya menunjukkan peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif meningkat. Namun tetap terjadi pergeseran distribusi penduduk menurut umur yaitu penduduk usia produktif (15-64 tahun) tumbuh lebih tinggi dibanding penduduk usia muda (0-14 tahun) sehingga penduduk usia produktif tersebut (15-64 tahun) mejadi dominan. Perubahan ini merupakan proses transisi demografi yang berlangsung beberapa dekade dan berkelanjutan.

Seiring dengan terjadinya pergeseran distribusi penduduk menurut umur, diikuti pula dengan berkurangnya beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif atau rasio ketergantungan. Rasio ini menggambarkan berapa persen penduduk yang dianggap mempunyai aktivitas konsumtif harus ditanggung oleh penduduk usia 15-64 tahun, yang dianggap sebagai penduduk yang (secara potensial) produktif. Pada tahun 2020, penduduk usia produktif (15-64 tahun) tercatat sebanyak 1.873.889 jiwa. Sedang penduduk usia tidak produktif, yaitu mereka yang masih sangat muda (0-14 tahun) sebanyak 750.986 jiwa dan yang sudah sangat tua (65+ tahun) sebanyak 122.080 jiwa. Dengan demikian, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 33,26 %. Ini artinya bahwa untuk setiap 100 orang penduduk usia produktif di Sulawesi Tenggara harus menanggung/membiayai hidup sekitar 33 - 34 orang lain, yaitu mereka yang tergolong sebagai penduduk usia tidak produktif.

3) Sumber Daya Alam.

a) Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara hanya delapan jenis tanaman yang utama yaitu; padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Dari delapan jenis tanaman pangan, padi mendominasi produksi tanaman pangan di Sulawesi Tenggara. Sentra produksi padi berada di Kabupaten Konawe, dengan total produksi mencapai 177.444 ton di tahun 2019 atau 38,27 persen dari total produksi Sulawesi Tenggara. Untuk tanaman jagung banyak dihasilkan di Kolaka Utara, kemudian kedelai di Kabupaten Konawe, kacang tana di Kabupaten Muna Barat, kacang hijau di Kabupaten Konawe Selatan, ubi kayu di Kabupaten Wakatobi, dan ubi jalar di Kabupaten Muna.

b) Hortikultura

Ragam produksi tanaman hortikultura di Sulawesi Tenggara cukup bervariasi. Untuk tanaman sayuran, terdapat bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, petsai/sawi, terung, tomat, dan lainnya. Cabai rawit, terung, tomat, kacang panjang, dan kangkung menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman sayuran di Sulawesi Tenggara. Untuk tanaman buah-buahan, jeruk siam, pisang, mangga, dan papaya menjadi tanaman yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara, selain tanaman buah-buahan lainnya. Produksi keempat tanaman buah-buahan tersebut masing-masing 272.665 kuintal, 439.707, kuintal, 193.959 kuintal, dan 92.312 kuintal. Untuk tanaman biofarmaka, jahe, mahkota dewa, laos/lengkuas, dan kunyit menghasilkan produksi yang dominan untuk tanaman biofarmaka di Sulawesi Tenggara. Adapun luas panen keempat tanaman tersebut masing-masing 447.760 m², 1.868 pohon, 180.253 m², dan 275.327 m² sedangkan untuk tanaman hias, adenium, anggrek, anthurium daun, dan palem menjadi tanaman hias yang banyak dihasilkan di Sulawesi Tenggara.

c) perkebunan

c) perkebunan

Kakao menjadi komoditi perkebunan yang dominan dihasilkan di Sulawesi Tenggara. Tahun 2019 produksi kakao sebesar 99.051 ton. Selain kakao, terdapat tanaman kelapa dan jambu mete yang produksinya juga tergolong besar, masing – masing sebesar 44.625 ton dan 4.609 ton.

d) peternakan

Produksi daging dari hewan sapi ternak di Sulawesi Tenggara tahun 2019 sebesar 6.282.697 ton. Selain daging sapi, diwilayah Sultra terdapat beberapa hewan ternak yang diproduksi antara lain : kerbau, kuda, kambing dan babi.

e) perikanan

Produksi perikanan di Sulawesi Tenggara didominasi oleh perikanan budidaya, dengan produksi sebesar 631.232 ton di tahun 2019 yang didominasi oleh hasil budidaya laut. Sedangkan untuk perikanan tangkap, terjadi peningkatan produksi, yaitu sebesar 203.864 di tahun 2018 meningkat menjadi 204.364 ton ditahun 2019.

f) kehutanan

Luas kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Tenggara sebesar 2.590.032 hektar. Dari kawasan hutan tersebut, tercatat produksi kayu hutan sebanyak 59.943,92 m³ kayu bulat dan 43.585,55 m³ kayu gergajian.

g) pertambangan

Nikel dan aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Jumlah produksi nikel tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 23.967.146 Ton yang signifikan dibanding dari tahun 2018 sebesar 20.220.717 Ton. Dan jumlah produksi aspal mengalami peningkatan yaitu tahun 2018-2019 sebesar 20.625 Ton menjadi 71.113 Ton.

4) Ideologi

Pada umumnya masyarakat Propinsi Sulawesi Tenggara masih menganggap Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Kondisi ideologi masih dihadapkan pada belum diimplementasikannya nilai- nilai Pancasila sebagai dasar negara secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, memunculkan keinginan kelompok masyarakat tertentu berupaya merubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, paham liberal dan paham sosialis / komunis.

Pada tanggal 30 Desember 2020, Pemerintah resmi menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Penetapan pelarangan FPI disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiarij.

Pembubaran dan pelarangan FPI dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh enam pejabat kementerian dan lembaga. Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020 nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

5) Sosial Politik

a) penyelenggaraan Pilkada tahun 2019

Secara umum pelaksanaan tahapan Pemilu 2019, mulai dari tahapan persiapan, tahapan Kampanye, Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 pada 7.817 TPS sampai dengan selesainya pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara tingkat KPU Prov. Sultra tanggal 12 Mei 2019 berlangsung dalam keadaan aman, damai, dan lancar. Peristiwa menonjol yang terjadi antara lain adanya kegiatan pemungutan suara ulang (PSU) di 62 TPS

Yang

yang tersebar pada 12 (dua belas) Kab/Kota wilayah Sultra, pada tanggal 25 April 2019 dan tanggal 27 April 2019 yang dilatar belakangi oleh permasalahan teknis terkait pelaksanaan pemungutan di TPS. Adapun hasil perolehan suara Pemilu 2019 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Wilayah Sultra pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 842.117 suara atau 60,25 % mengungguli pasangan Joko Widodo – KH Ma'ruf Amin dengan perolehan 555.664 suara atau 39,75 % yang hanya unggul pada 4 kabupaten yaitu Kab Buton Utara, Kab Buton, Kab Buton Selatan dan Kab Wakatobi. Berikut perolehan suara masing-masing calon Presiden / Wakil Presiden berdasarkan hasil Pleno Tingkat KPU Prov Sultra sebagai berikut:

b) Pemilu 2019

Secara umum pelaksanaan tahapan Pemilu 2019, mulai dari tahapan persiapan, tahapan Kampanye, Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 pada 7.817 TPS sampai dengan selesainya pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara tingkat KPU Prov. Sultra tanggal 12 Mei 2019 berlangsung dalam keadaan aman, damai, dan lancar. Peristiwa menonjol yang terjadi antara lain adanya kegiatan pemungutan suara ulang (PSU) di 62 TPS yang tersebar pada 12 (dua belas) Kab/Kota wilayah Sultra, pada tanggal 25 April 2019 dan tanggal 27 April 2019 yang dilatar belakangi oleh permasalahan teknis terkait pelaksanaan pemungutan di TPS. Adapun hasil perolehan suara Pemilu 2019 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Wilayah Sultra pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memperoleh suara terbanyak dengan perolehan 842.117 suara atau 60,25 % mengungguli pasangan Joko Widodo– KH Ma'ruf Amin dengan perolehan 555.664 suara atau 39,75 % yang hanya unggul pada 4 kabupaten yaitu Kab Buton Utara, Kab Buton, Kab Buton Selatan dan Kab Wakatobi.

Berikut

Berikut perolehan suara masing-masing calon Presiden/Wakil Presiden berdasarkan hasil Pleno KPU Prov Sultra sebagai berikut :

NO	KAB / KOTA	JUMLAH DPT	SUARA PASLON		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
			JOKOWI – MA'RUF AMIN	PRABOWO – SANDIAGA		
1	KENDARI	208.846	59.100	118.789	177.889	1.981
2	BAUBAU	107.895	35.482	43.532	79.014	998
3	KOLAKA	159.207	44.012	85.780	129.792	1.973
4	KOLAKA TIMUR	80.997	30.056	39.948	70.004	1.068
5	KOLAKA UTARA	93.479	25.788	50.446	76.234	1.525
6	KONAWE	167.836	47.388	97.738	145.126	2.609
7	KONAWE UTARA	42.407	16.082	22.550	38.632	1.138
8	KONSEL	202.838	65.542	105.165	170.707	3.348
9	KONKEP	25.268	4.869	17.627	22.496	423
10	BOMBANA	100.439	36.815	48.341	85.158	3.358
11	MUNA	145.594	40.640	70.370	111.010	3.169
12	MUNA BARAT	55.644	18.463	26.672	45.136	1.681
13	BUTON	73.529	34.716	23.145	57.861	893
14	BUTON UTARA	44.383	19.692	19.392	39.084	1.071
15	BUTON SELATAN	58.440	23.185	20.213	43.398	671
16	BUTON TENGAH	77.593	22.473	27.174	49.647	973
17	WAKATOBI	79.054	31.360	25.235	56.595	1.562

Adapun untuk hasil Pemilu Legislatif 2019 di wilayah Sultra sebagai berikut :

No	PARPOL	PEROLEHAN SUARA						JMLH KURSI
		Sultra 1	Sultra 2	Sultra 3	Sultra 4	Sultra 5	Sultra 6	
1	PKB	2082	11205	22949	20930	23921	3.293	3
2	GERINDRA	23535	21746	8985	14019	15632	12189	4
3	PDIP	18168	21541	21871	28175	19247	12914	5
4	GOLKAR	28933	49534	24801	38536	46614	25047	7
5	NASDEM	15341	13992	18642	31551	20400	18751	5
6	GARUDA	443	981	867	4291	1250	883	-
7	BERKARYA	9165	7793	1923	6304	2979	7271	-
8	PKS	30440	22347	11364	18170	18462	14712	5
9	PERINDO	1329	3809	2993	9123	7640	2064	-
10	PPP	4546	20949	7402	20083	6280	3203	2
11	PSI	857	1024	317	3023	428	297	-
12	PAN	18529	24435	13317	42634	37712	44527	8
13	HANURA	1002	4615	10228	16488	2417	5573	1
14	DEMOKRAT	11309	25698	32069	12585	48400	27235	5
15	PBB	4082	6737	5791	12136	10000	14750	-
16	PKPI	84	127	294	221	152	119	-

c) Pilkada serentak 2020

Pada tanggal 9 Desember 2020 telah berlangsung pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 7 (tujuh) Kabupaten di wilayah Sultra yaitu Kab. Muna, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka Timur dan Konawe Utara. Secara umum pelaksanaan Pilkada pada 7 (tujuh) daerah tersebut berjalan aman dan lancar, namun pada beberapa daerah terjadi gangguan Kamtibmas berupa tindak pidana konvensional yang melibatkan pendukung masing-masing Paslon oleh KPUD, telah menimbulkan ketidakpuasan atas proses dan hasil Pilkada yang ditandai dengan adanya gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) melalui Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati pada 4 (empat) kabupaten dari 7 (tujuh) Kabupaten yang melaksanakan Pilkada di wilayah Sultra yaitu Kab. Konse, Muna, Konawe Kepulauan dan Wakatobi, yang saat ini sedang berproses di Mahkamah Konstitusi.

Adapun materi gugatan di Mahkamah Konstitusi oleh pasangan calon pada 4 (empat) Kabupaten yang melaksanakan Pilkada sebagai berikut :

(1) Kab. Konse.

Pemohon Paslon nomor urut 3 Endang-Wahyu menggugat KPU Konse atas Keputusan KPU Konse tentang Penetapan hasil perhitungan perolehan suara Pilkada Konse 2020 dan menuntut agar Paslon Surunuddin-Rasyid harus didiskualifikasi atau setidaknya dilakukan PSU diseluruh Kab. Konse karena telah melakukan pelanggaranpelanggaran sebagai berikut :

(a) Paslon nomor urut 2 Surunuddin-Rasyid terlibat mahar Politik untuk mendapatkan dukungan Partai (dengan Ketua Partai Hanura Wd. Nurhayati);

(b) pelanggaran

- (b) pelanggaran Money Politik yang dilakukan Paslon nomor urut 2 Surunuddin-Rasyid terjadi di desa Ngapaaha, desa Aopa Kec Angata, desa Angata Kec Angata dan desa Wonuakoa Kec Sabulakoa;
- (c) pelanggaran Paslon nomor urut 2 Surunuddin-Rasyid dengan melibatkan Camat, Kades serta ASN di Kab. Konawe (26 kejadian);
- (d) pelanggaran Paslon nomor urut 2 Surunuddin-Rasyid mengenai *BlackCampaign*;
- (e) pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada Kab Konseil dari tingkat KPU sampai dengan KPPS (13 kejadian);
- (f) pelanggaran Paslon nomor urut 2 sebagai calon petahana yang menggunakan kewenangannya dan merugikan calon lain seperti pembagian dana Bansos pada tanggal 8 s.d 9 Desember 2020 serta penerbitan KTP-elektronik pada tanggal 7 Desember 2020 .

(2) Kab. Muna.

Pemohon Paslon nomor urut 02 Rajiun-La Pili memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemungutan suara di TPS-TPS yang dipersoalkan oleh pemohon dan memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan inti materi gugatan bahwa telah terjadi pelanggaran yang merugikan pemohon sebagai berikut :

- (a) banyak penambahan Jumlah DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) disetiap TPS yang tidak Rasional;
- (b) penyelenggara banyak dari ASN yang berpihak ke paslon no urut 01 Rusman – Bachrun;
- (c) terjadi *Money Politik* untuk memenangkan Paslon 01;
- (d) angka partisipasi pemilih meningkat signifikan dan tidak wajar;

(e) disetiap

- (e) disetiap TPS saksi tidak diberikan kesempatan untuk memastikan surat suara tercoblos;
- (f) terjadi penambahan DPT pada 15 TPS.

(3) Kab. Wakatobi.

Pemohon Paslon nomor urut 01 Arhawi – Hardin Laomo dengan inti materi gugatan :

- (a) terdapat pengguna DPPH (Daftar Pemilih Pindahan) yang melebihi jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPPH pada 7 TPS di Kec. Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan sehingga ada 35 orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
- (b) atas pelanggaran tersebut maka harus dilakukan PSU pada 4 TPS di Kec. Wangi-Wangi dan 3 TPS di Wangi-Wangi Selatan.

(4) Kab. Konkep.

Pemohon Paslon nomor urut 04 Oheo Sinapoy-Mattaqin Siddiq memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan/mendiskualifikasi Paslon yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 dan melaksanakan PSU di seluruh TPS di Konkep. Adapun inti materi gugatan yaitu:

- (a) terjadi pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap Prokes Covid-19 yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, Paslon 01, Paslon 02 serta Paslon 03;
- (b) pelaksanaan pungut suara di 101 TPS ditutup jam 12.00 WITA, dan dilanjutkan dengan perhitungan suara;
- (c) pelaksanaan Sirekap tidak sesuai ketentuan.

Adapun jadwal Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di MK yaitu:

- (a) melengkapi dan perbaikan permohonan tanggal 13 Desember 2020 s.d. 4 Januari 2021;

(b) penerbitan

- (b) penerbitan BRPK (Buku Registen Perkara Konstitusi) tanggal 18 s.d. 19 Januari 2021;
- (c) pemeriksaan pendahuluan tanggal 26 s.d. 29 Januari 2021;
- (d) pemeriksaan persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim 1 s.d. 11 Februari 2021;
- (e) pengucapan putusan/ketetapan 15 s.d. 16 Februari 2021;
- (f) pemeriksaan persidangan lanjutan 19 Februari s.d. 18 Maret 2021;
- (g) pengucapan putusan / ketetapan 19 s.d. 24 Maret 2021.

Tahapan Pilkada serentak tahun 2020 yang masih akan dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu tahapan proses sengketa di Mahkamah Konstitusi, penetapan pasangan calon terpilih dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati terpilih. Adapun Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati/Wakil Bupati yang melaksanakan Pilkada tahun 2020:

- (1) Kab. Buton Utara : 17 Februari 2021;
- (2) Kab. Konawe Kepulauan : 17 Februari 2021;
- (3) Kab. Kolaka Timur : 17 Februari 2021;
- (4) Kab. Konawe Selatan : 23 Februari 2021;
- (5) Kab. Konawe Utara : 21 April 2021;
- (6) Kab. Wakatobi : 28 Juni 2021.

d) wacana agenda Pilkada tahun 2022

Usulan draf sementara revisi Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mendorong pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 serta pemilihan serentak diundur menjadi tahun 2027. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 201 Ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang memuat pelaksanaan Pilkada serentak digelar pada 2024. Sembilan Fraksi di DPR terbelah dengan ketentuan baru dalam draf UU Pemilu

tersebut

tersebut. Sebagian fraksi ingin melaksanakan Pilkada sesuai amanat Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016, yakni Pilkada serentak digelar November 2024. Sementara, sebagian fraksi lainnya mendorong pelaksanaan Pilkada sesuai ketentuan di dalam draf revisi UU Pemilu Pasal 731 ayat (2) dan (3), yakni pada 2022 dan 2023. Adapun sikap pemerintah disampaikan melalui pernyataan Kemendagri yang menegaskan bahwa Pilkada serentak 2024 merupakan amanat Undang-Undang yang mestinya dijalankan dulu karena ada alasan filosofis, yuridis dan sosiologis yang hendak dicapai, evaluasi akan dilaksanakan usai pelaksanaannya sehingga evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan apakah revisi perlu dilakukan atau tidak.

Apabila draf revisi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut disahkan dan pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada tahun 2022, maka daerah di wilayah Sultra yang akan melaksanakan Pilkada yaitu Kota Kendari, Kab Kolaka Utara, Bombana, Buton, Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat.

e) pemekaran wilayah

Pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru masih belum berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilain pihak otonomi daerah sering dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mencari dukungan bagi-bagi proyek dan jabatan di lingkup birokrasi. Meskipun belum masuk pembahasan dalam program legislatif nasional (Prolegnas) namun wacana pemekaran beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih diupayakan. Terdapat 5 (lima) wilayah usulan pembentukan daerah otonom baru yaitu:

- (1) Propinsi Kepulauan Buton (Kota Baubau, Kab. Buton, Kab. Wakatobi, Kab. Buton Utara, Kab. Buton Selatan dan Kab. Buton Tengah);
- (2) Kab. Kabaena (Kec. Kabaena, Kabaena Tengah, Kabaena Timur, Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Kabaena Utara);
- (3) Kab.

- (3) Kab. Muna Timur (Kec. Maligano, Batukara, Wakorumba Selatan, Pasikolaga, Pasir Putih);
- (4) Kab. Konawe Timur (Kec. Landono, Mowila, Ranomeeto Barat, Ranomeeto, Konda, Wolasi, Moramo Utara, Moramo, Kolono, Laonti);
- (5) Kab. Pakue (Kec. Pakue, Pakue Utara, Pakue tengah, Batu Putih, Porehu dan Tolala).

Beberapa masalah dalam upaya percepatan pembangunan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai berikut :

- (1) terbatasnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan profesional;
- (2) keterbatasan anggaran;
- (3) perencanaan yang tidak maksimal sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan baru;
- (4) belum tersusunnya kelembagaan yang efektif;
- (5) belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
- (6) kurangnya kreatifitas dan kreasi masyarakat secara kritis dan rasional;
- (7) belum jelasnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berakibat pada tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah;
- (8) masih rendahnya kerjasama antara daerah dalam penyediaan pelayanan publik;
- (9) meningkatnya keinginan untuk membentuk daerah otonom baru yang belum tentu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (10) timbulnya konflik tapal batas dan perebutan aset daerah.

f) kebijakan pemerintah.

Adanya kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak jarang menimbulkan polemik di masyarakat akibat kebijakan tersebut dinilai kurang berpihak kepada rakyat kecil yang diwujudkan dalam bentuk aksi unjuk rasa maupun ungkapan protes melalui media massa. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari negara demokrasi sebagai perwujudan dari kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyekproyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Beberapa proyek strategis nasional yang dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu kawasan industri Konawe, proyek bendungan Ladongi di Kolaka Timur, pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional di Kab. Wakatobi, proyek pembangunan smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kab Kolaka.

Visi dan misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra periode 2018 – 2023 H. Ali Mazi, SH – Lukman Abunawas yang terangkum dalam Sultra Emas direalisasikan dalam bentuk program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 – 2023:

- (1) Sultra sehat, penguatan pelayanan kesehatan dengan agenda pembangunan Rumah Sakit Jantung berskala internasional di Kota Kendari;
- (2) Sultra peduli miskin, bantuan bedah rumah dengan proyeksi total anggaran Rp 17 milyar untuk membedah sekitar 6.000 unit rumah;
- (3) Sultra cerdas, paket beasiswa kepada 1.000 siswa SMA / SMK / SLB berprestasi santunan biaya pendidikan Rp 1 juta per enam bulan dan beasiswa kepada mahasiswa D3, S1,

S2

S2 dan S3 dengan total anggaran Rp 5,376 milyar bekerja sama dengan Universitas Haluoleo Kendari. Program ikonik Sultra Cerdas melalui pembangunan perpustakaan modern bertaraf internasional di lokasi eks PGSD Kendari;

- (4) Sultra produktif, bonus bagi atlet berprestasi yang mengharumkan nama Sultra dikancah internasional;
- (5) Sultra berbudaya dan beriman, dukungan terhadap upaya pelestarian adat istiadat, budaya dan lokal Sultra agar generasi muda bisa mengenal dan mencintai warisan kearifan lokal seperti Wakatobi Wave 2018, tradisi pakandekandea, pesta adat Pikulaliwua Takimpu Lipuogena, dll;
- (6) dukungan anggaran pembenahan kawasan masjid Al-Alam sebagai pusat kegiatan dan wisata religi.

g) Kepala Daerah Tersangkut Kasus Korupsi

Pada tahun 2016-2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah mengumumkan 2 (dua) kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi, yaitu:

- (1) tanggal 23 Agustus 2016, KPK menetapkan Gubernur Sultra H. Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi. Gubernur Sultra diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan, penerbitan Surat Keputusan persetujuan percadangan wilayah pertambangan, persetujuan IUP eksplorasi dan SK persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (perusahaan yang melakukan penambangan nikel di wilayah Kab. Buton dan Kab. Bombana);
- (2) tanggal 19 Oktober 2016, KPK menetapkan Drs. Syamsu Umar Abdul Samiun (Bupati Buton periode 2010-2015) sebagai tersangka dalam kasus suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Buton pada tahun 2011;

(3) tanggal

- (3) tanggal 27 Februari 2018 telah berlangsung kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap 7 (tujuh) orang yaitu Ir. Asrun, M.Eng (Calon Gubernur Sultra), Adriatma Dwi Putra (Walikota Kendari), H. Hasmun Hamzah (pengusaha/Direktur PT Indo Jaya, PT sarana Bangunan, pemilik Toko Jotun), Fatmawati Faqih (Mantan Kepala BPKAD), Harun Arrasid, Roy Riadi dan Leonita. Penangkapan tersebut terkait dugaan suap/gratifikasi;
- (4) pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Buton Selatan di Kel. Laompo Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si. Dalam operasi tangkap tangan tersebut Tim Satgas KPK menyita uang sebesar Rp. 409.000.000,- dalam bentuk pecahan Rp. 100.000,- yang diduga sebagai suap dari kontraktor terkait proyek pekerjaan infrastruktur pembangunan rehabilitasi rumah jabatan Wakil Bupati Busel.

6) Kebebasan Pers

Kebebasan pers tumbuh dan berkembang dalam kehidupan demokrasi, saat ini belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan. Media massa masih mengutamakan kepentingan keuntungan bisnis dibandingkan resiko sosial politik yang ditimbulkan.

7) Sosial Ekonomi.

Perkembangan sektor perekonomian Provinsi Sultra yang saat ini sangat bergantung dari sektor pertambangan, perkebunan, perikanan/kelautan, pertanian, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemasukan daerah khususnya dari sektor pertambangan terutama nikel

maupun

maupun emas, yang sudah dikelola secara industrial yaitu di Kab. Konawe, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Selatan dan Kab. Bombana.

a) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Tenggara triwulan I - 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 31,55 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 22,76 triliun. Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan I-2020 tumbuh 4,37 persen melambat dibanding triwulan I-2019 sebesar 6,39 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,67 persen. Dari sisi pengeluaran, dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 25,88 persen. Ekonomi Sulawesi Tenggara triwulan I-2020 tumbuh minus 8,18 persen lebih rendah bila dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,43 persen.

Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada hampir semua lapangan usaha, dimana kontraksi terbesar terjadi pada lapangan usaha Konstruksi sebesar minus 18,71 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen, dengan kontraksi terbesar pada Komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar minus 28,85 %.

Imbas virus Corona yang hingga kini masih menyebar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara (Sultra). Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sultra, Suharman Tabrani menuturkan ekonomi diprediksi tumbuh melambat yakni berada pada kisaran 3,9-4,3%. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sultra pada 2019 yang tumbuh sebesar 6,5%. Ada enam faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi melambat, di antaranya yakni diberlakukannya social distancing dan harga nikel dunia yang diperkirakan juga akan mengalami penurunan. Selain itu pula,

Penundaan

penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 11 kabupaten kota sebesar 35% berpotensi menurunkan konsumsi pemerintah serta pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah akan tertahan seiring dengan penghentian sementara pengadaan barang dan jasa dan difokuskan pada penanganan kasus COVID-19. Serta pengetatan akses keluar masuk untuk manusia dan barang diperkirakan juga akan berdampak pada investasi yang dilakukan oleh swasta dan kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia pun dinilai dapat berdampak pada perdagangan luar negeri di Sultra.

Namun, ada pula faktor yang diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sultra, di antaranya kinerja industri pengolahan yang diperkirakan akan mengalami peningkatan didukung oleh kapasitas produksi smelter dan industri olahan logam yang masih cukup tinggi. Program bantuan dari pemerintah seperti peningkatan bansos nontunai, rencana pelaksanaan bantuan langsung tunai, insentif bagi UMKM dan tenaga medis, program Pra Kerja, dan tingkat inflasi yang rendah diperkirakan juga dapat menjaga tingkat konsumsi rumah tangga. Serta harga minyak dunia yang mengalami penurunan dapat mengurangi nilai impor dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Sultra.

c) Ekspor dan impor

Nilai ekspor Sultra pada Oktober 2020 tercatat US\$ 294,59 juta atau mengalami penurunan sebesar 1,46 persen dibanding ekspor September 2020 yang tercatat US\$298,94 juta. Sementara, volume ekspor Oktober 2020 tercatat 232,18 ribu ton atau mengalami kenaikan sebesar 25,25 persen dibanding ekspor September 2020 yang tercatat 185,37 ribu ton. Total ekspor Sulawesi Tenggara selama Januari-Oktober 2020 mencapai 1.248,58 ribu ton atau senilai US\$1.749,55 juta. Sedangkan Nilai impor Sulawesi Tenggara pada Oktober 2020 tercatat US\$117,57 juta atau mengalami kenaikan sebesar 3,72 persen dibanding impor September 2020 yang tercatat US\$113,36 juta. Sementara,

Volume

volume impor Oktober 2020 tercatat 349,77 ribu ton atau mengalami kenaikan sebesar 98,61 persen dibanding impor September 2020 yang tercatat 176,11 ribu ton. Total impor Sulawesi Tenggara selama Januari-Oktober 2020 mencapai 2.970,42 ribu ton atau senilai US\$1.216,06 juta.

d) Pertambangan

Sektor pertambangan Propinsi Sulawesi Tenggara sangat potensial dan menjadi perhatian investor nasional maupun asing, terdapat beberapa perusahaan yang telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yaitu tambang Nikel di Kab Kolaka, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Bombana, tambang Emas di Kab Bombana, tambang Aspal di Kab Buton, dan tambang Marmer, Batu Granit dan krom tersebar di beberapa Kab wilayah Sultra. Pasca keluarnya peraturan Kementerian ESDM nomor 5 tahun 2017 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian Mineral, yang memberikan peluang kepada perusahaan pemegang izin IUP OP dan IUPK OP untuk mengekspor ore nikel kadar rendah (dibawah 1,7%), bauksit kadar rendah (dibawah 42%) dan seng keluar negeri apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Pada bulan Maret 2018 sebanyak 6 (enam) perusahaan di Sultra kembali mengekspor ore nikel yaitu PT Aneka Tambang Kolaka, PT Ceria Nugraha Indotama (Kolaka), PT Ifishdeco Konawe Selatan, PT Sambas Mineral Mining Konawe Selatan, PT Toshida Indonesia Kolaka, beberapa perusahaan tersebut diberikan jatah / kuota oleh pemerintah dalam jumlah tertentu dalam 1 (satu) tahun, sambil menunggu penyelesaian pembangunan pabrik pengolahan (smelter).

Pada awal Desember 2018 Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi,SH mengeluarkan kebijakan penghentian sementara aktivitas 27 (dua puluh tujuh) perusahaan pertambangan di Sultra disebabkan karena masih adanya permasalahan baik administrasi maupun teknis yang belum

diselesaikan

diselesaikan oleh pihak perusahaan antara lain dalam proses pengurusan persetujuan studi kelayakan, penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), pengurusan izin lingkungan, tidak memiliki Kepala Teknik Tambang, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, dll.

Kawasan industri Kec Morosi Kab Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu program strategis nasional kabinet Jokowi – JK yang saat ini sedang digenjut pembangunannya. PT Virtue Dragon Nickel Industrial selaku perusahaan / investor asal China yang mengelola kawasan industri seluas 2.200 Ha tersebut, setidaknya akan menaungi 6 (enam) perusahaan besar untuk operasional kegiatan dikawasan tersebut yaitu :

Pada awal Desember 2018 Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Ali Mazi,S.H. mengeluarkan kebijakan penghentian sementara aktivitas 27 (dua puluh tujuh) perusahaan pertambangan di Sultra disebabkan karena masih adanya permasalahan baik administrasi maupun teknis yang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan antara lain dalam proses pengurusan persetujuan studi kelayakan, penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), pengurusan izin lingkungan, tidak memiliki Kepala Teknik Tambang, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dan lain-lain. Berdasarkan keterangan Andi Makkawaru Kepala Dinas ESDM Sultra bahwa surat penghentian sementara dikeluarkan, pasca rapat evaluasi terhadap aktivitas tambang yang ada di Sultra dan keputusan tersebut dianggap sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, penghentian sementara baru akan dicabut manakala perusahaan telah memenuhi kekurangannya. Adapun daftar 27 (dua puluh tujuh) perusahaan pertambangan yang menerima surat penghentian sementara :

- (1) 12 (dua belas) perusahaan tambang dihentikan kegiatan produksinya karena masalah teknis yaitu PT. Almharig di Kab. Bombana, PT. Celebessi Mulia Utama di Kab. Kolaka Utara, PT. Multi Bumi Sejahtera di Kab. Konawe, PT. Visi Debtindo di Konawe Selatan, PT. Wara Kirana Bakti di Kab. Buton, PT. Bososi Pratama, PT. Sultra Jembatan Mas, PT. Sriwijaya Raya dan PT. Wanagon Anoa Indonesia yang berlokasi di Kab. Konawe Utara, PT. Babarina Putra Sulung di Kolaka, Samiri,S.Sos. (perseorangan) di Kolaka Timur dan PT. Wahyu Putra Sultra di Konawe Selatan yang bergerak di bidang batuan dan mineral bukan logam;
- (2) 15 (lima belas) perusahaan tambang dihentikan sementara akibat permasalahan administrasi yaitu PT. Batumas Segitiga Moramo, PT. Tolakindo Mining Resources, CV. Mappakaraeng, PT. Konawe Bumi Sejahtera (tambang batu dan mineral bukan logam), PT. Bumi Sentosa Jaya, PT. Karya Alam Abadi, PT. Mega Tambang Nikel, PT. Buton Limestone Utama, PT. Diamond Alfa Propertindo, CV. Rizqi Perdana, Rusdin (Perseorangan), PT. Wirsha Mineral Indonesia, Ramlansyah (Perseorangan) dan PT. Bumi Alam Semesta.

Kawasan industri Kec. Morosi Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu program strategis nasional kabinet Jokowi-JK yang saat ini sedang digenjot pembangunannya. PT. Virtue Dragon Nickel Industrial selaku perusahaan/investor asal China yang mengelola kawasan industri seluas 2.200 Ha tersebut, setidaknya akan menaungi 6 (enam) perusahaan besar untuk operasional kegiatan dikawasan tersebut yaitu :

- (1) PT. VDNI, perusahaan pengolah ore nikel menjadi veronikel saat ini telah beroperasi, total produk tahunannya mencapai 600.000 matrik ton (TM), VDNI berdiri diatas lahan seluas 700 Ha;

(2) PT

- (2) PT. Osidian Stainless Steel (OSS), perusahaan pengelola Veronikel menjadi nikel murni telah memiliki izin lokasi dan izin pembangunan smelter. Jika beroperasi direncanakan total produksi pertahun mencapai 1.200.000 MT dan stainless steel sebanyak 3.000.000 MT. OSS menempati area seluas 800 Ha;
- (3) PT. Emerald Ferrocomium Industry, telah memiliki izin investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI untuk pembangunan industri skala menengah dan besar, EFI akan menempati area seluas 300 Ha;
- (4) PT. Galangan Cinta Bahari, perusahaan galangan kapal yang salah satu fungsinya untuk memperbaiki kapal-kapal yang rusak, perusahaan ini akan menempati area seluas 20 Ha;
- (5) Perusahaan Gas Plant akan menempati area seluas 20 Ha;
- (6) PT. Muara Sampara, saat ini telah beroperasi dan mengurus aktivitas bongkar muat di jety yang merupakan pelabuhan dari kawasan industri.

Secara umum pengelolaan sumber daya alam pertambangan masih menyisahkan permasalahan yang melibatkan perusahaan, pemerintah, masyarakat maupun karyawan. Adapun permasalahan krusial terkait pertambangan antara lain: harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan asli daerah, eksplorasi pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, timbulnya sengketa lahan dengan masyarakat, tumpang tindih IUP, kewajiban perusahaan yang tidak terlaksana dan lain-lain. Adapun protes terhadap pengelolaan tambang diwujudkan dalam bentuk aksi unjuk rasa pendudukan lahan sehingga rentan berujung pada aksi anarkhis. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 telah terjadi aksi penghadangan dan percobaan pembakaran Kapal dan Alat Berat milik perusahaan tambang PT. Gerbang Multi Sejahtera (GMS) oleh masyarakat

Desa Tue-tue dan Pulau Cempedak Kec. Laonti Kab. Konawe Selatan, aksi berbuntut pada tindakan tegas/penembakan oleh aparat pengamanan.

e) Perkebunan

Potensi lahan mempunyai peluang cukup menjanjikan untuk dikembangkan di Sulawesi Tenggara, saat ini telah ada perkebunan yang cukup berkembang, antara lain adalah Kakao, Mete, Cengkeh, Kelapa, Kopi, Lada, Kemiri, Enau, Pinang, Kapuk dan Sagu. Komoditi Kakao dan Mete merupakan komoditi andalan yang cukup berperan dalam skala perekonomian nasional, namun dengan pesatnya investasi swasta di sektor perkebunan nampaknya komoditas Kelapa Sawit menjadi dominan khususnya di wilayah Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Beberapa perusahaan perkebunan di wilayah Sultra sebagai berikut :

- (1) PT. Sari Asri Rezki (Kab. Kolaka dan Kolaka Timur);
- (2) PT. Mulya Tani (Kab. Konawe);
- (3) PT. Haspram (Kab. Kolaka Timur);
- (4) PT. Damai Jaya Lestari (Kab. Konawe Utara dan Kab. Kolaka);
- (5) PT. Tani Prima Makmur (Kab. Konawe);
- (6) PT. Mega Utama Tani (Kab. Konawe);
- (7) PT. Kilau Indah Cemerlang (Kab. Konawe Selatan);
- (8) PT. Surya Jaya Agrindo Perkasa (Kab. Konawe);
- (9) PT. Sultra Prima Lestari (Kab. Konawe Utara);
- (10) PT. Merbau Jaya Indah Raya (Kab. Konawe Selatan);
- (11) PT. Sawitindo Lestari (Kab. Konawe Selatan);
- (12) PT. Cipta Agung Manis (Kab. Konawe Selatan);
- (13) PT. Tiran (Kab. Konawe Selatan dan Bombana);
- (14) PT. Jhonlin Batu Mandiri (Kab. Bombana);
- (15) PT. Selera Raya Agri (Kab. Muna);
- (16) PT. Selera Agro (Kab. Muna Barat);

(17) PT

- (17) PT. Sumagro Sawitara (Kab. Buton Utara);
- (18) PT. Bintang Nusa Pertiwi (Kab. Konawe Selatan);
- (19) PT. Marketindo Selaras (Kab. Konawe Selatan).

f) Kelautan

Laut selain sebagai sumber mata pencaharian ikan dan budi daya laut lainnya, beberapa daerah kabupaten/kota telah memanfaatkan potensi laut sebagai obyek pariwisata pantai maupun biota bawah laut seperti Kab. Wakatobi, Kota Baubau, Kota Kendari dan Kab. Konawe. Luasnya wilayah perairan Prov. Sultra mengakibatkan beberapa wilayah kepulauan tidak bisa dijangkau dengan sarana transportasi darat sehingga perairan di Sultra bukan saja sebagai sumber mata pencaharian bagi nelayan, petani rumput laut dan produsen mutiara tetapi juga wilayah perairan, menjadi salah satu penopang ekonomi Sultra dibidang perhubungan (pelayaran) antar kabupaten seperti penyeberangan Ferry dan angkutan Kapal Cepat maupun kapal motor biasa. Di tahun 2016 tepatnya tanggal 10 Oktober 2016 pemerintah telah mengoperasikan Pelabuhan Bungkutoko Kendari sebagai pelabuhan bongkar muat barang (Pelabuhan Peti Kemas).

g) Kehutanan

Provinsi Sulawesi Tenggara tidak hanya memiliki wilayah perairan yang sangat luas juga masih memiliki hutan yang cukup memadai baik hutan industri maupun hutan lindung, sehingga kegiatan dibidang perkayuan juga masih menjadi primadona sumber penghasilan masyarakat dan daerah terutama dengan kayu jatinya. Hasil industri yang berbahan baku kayu jati menjadi unggulan industri pengrajin kayu di Sultra sehingga hasilnya sangat terkenal di seluruh Indonesia bahkan beberapa negara di dunia yaitu meubel/*furniture* terutama meja gembol dan kerajinan ukiran lainnya. Tingginya kebutuhan akan bahan baku kayu dipasaran berdampak pada meningkatnya aktivitas *illegal logging* pada beberapa daerah yang memiliki potensi kawasan hutan.

h) Transportasi

h) Transportasi umum berbasis *online*

Transportasi berbasis online saat ini menjadi pilihan masyarakat karena keunggulannya yang tepat waktu dan ongkos yang terjangkau. Dilain pihak kehadiran aplikasi transportasi online menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan/penghasilan sebagai driver ditengah ketatnya persaingan mencari pekerjaan. Adapun beberapa aplikasi transportasi online yang ada di wilayah Sultra antara lain Grab, Gojek / Gocar dan Maxim.

i) *Hypermarket*

Tingkat pertumbuhan Hypermarket di Wilayah Sultra khususnya Kota Kendari mengalami peningkatan yang signifikan, pada akhir tahun 2017 Indogrosir berekspansi di Kota Kendari, pusat perkulakan dengan format distribusi ke pedagang retail/ eceran ini menyasar konsumen dari kalangan pedagang atau UKM.

Selain itu juga pusat perkulakan ini tidak membatasi jika ada masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan bulanan. Kehadiran Indogrosir berdampak pada menjamurnya minimarket di Kota Kendari seperti Indomart dan Marina Mart. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pendapatan dan keberadaan sentra ekonomi masyarakat kecil dan pasar tradisional.

j) Ketenagakerjaan

Pemberlakuan perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015 yang memberikan kebebasan terhadap keluar masuknya orang dan barang ke suatu wilayah dalam kawasan ASEAN akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi Sultra, disisi lain kebebasan tersebut juga akan memberikan dampak negatif berupa timbulnya permasalahan sosial baru yang dapat berdampak pada terjadinya peningkatan gangguan Kamtibmas. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra mendata sampai dengan April 2018 terdata sebanyak 929 Tenaga Kerja Asing tersebar di 21 perusahaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terbanyak dari mereka berasal dari

Cina

Cina, sedangkan perusahaan terbanyak mempekerjakan TKA adalah PT. Virtue Dragon Nickel Industry yakni 632 TKA yang berlokasi di Kabupaten Konawe, Terkait dengan aktivitas WNA tersebut telah memunculkan penolakan dari masyarakat, khususnya terkait persaingan perekrutan tenaga kerja, dimana masyarakat lokal menginginkan porsi yang lebih besar untuk diakomodir sebagai tenaga kerja di perusahaan tambang. Berikut sebaran TKA berdasarkan data Disnakertrans Sultra sampai April 2018, sebagai berikut :

- (1) Kabupaten Konawe, PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) sebanyak 632 TKA dari Cina;
- (2) Kabupaten Kolaka, PT. Mapan Asri Sejahtera terdapat 2 (dua) TKA asal Cina;
- (3) Kota Kendari, PT. Sonok Lestari Mas mempekerjakan 6 (enam) TKA asal Jepang;
- (4) PT. Kuming Gold Fortune dengan 1 (satu) TKA asal Singapura;
- (5) PT. Fajar Phinisi Seased 1 (satu) TKA asal Malaysia;
- (6) PT. Weiwo Elektronika Teknologi memiliki 3 (tiga) TKA asal Cina;
- (7) Konsorsium PP/NK Proyek Jembatan Bahteramas terdapat 2 (dua) TKA asal Cina;
- (8) Kabupaten Konawe Utara, PT. Konutara Sejati dengan 4 (empat) TKA asal Cina;
- (9) Kabupaten Wakatobi, PT. Wakatobi Resort pekerjaan 12 (dua belas) TKA dari Swiss, Spanyol, Inggris, Jepang, Italia dan USA.

7) Sosial Budaya.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk masyarakat yang heterogen namun demikian beberapa suku tertentu menjadi masyarakat mayoritas di Provinsi Sultra yaitu Suku Buton, Muna, Tolaki

dan

dan Bugis. Sedangkan kelompok masyarakat minoritas yang pada umumnya warga pendatang didominasi suku Jawa, Madura dan Bali, sehingga masyarakat Prov. Sultra memiliki keanekaragaman etnis dan budaya yang berkembang di masyarakat. Namun demikian beberapa hal menjadi ciri khas atau karakter khusus masyarakat Provinsi Sultra misalnya :

- a) kebiasaan/tradisi masyarakat yang sampai saat ini masih terjaga dan terlaksana pada waktu momen-momen tertentu dimana pelaksanaannya selalu mengundang perhatian dan konsentrasi masyarakat dari berbagai kalangan kelompok massa seperti acara joged Kande-Kandea dan Lulo. Berbagai potensi kerawanan dapat muncul dari kegiatan tersebut antarlain seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan bahkan perkelahian antar kelompok/warga.
- b) adanya kebiasaan dari kelompok masyarakat tertentu dalam mengkonsumsi minuman keras baik tradisional maupun minuman keras modern masih sangat membudaya khususnya pada masyarakat bawah sehingga selalu menjadi pangkal terjadinya berbagai tindak kriminal;
- c) rasa sukuisme dan premordialisme yang masih kental dikalangan masyarakat Sultra dalam berbagai kegiatan atau pemberian dukungan masyarakat masih sangat tinggi terutama menyangkut wilayah sehingga terbagi menjadi 2 (dua) wilayah besar yaitu masyarakat daratan dan masyarakat kepulauan;
- d) masih adanya di beberapa daerah di Sultra yang menjadi tempat pengungsian khususnya bagi masyarakat penganut Islam aliran Jamaah Ahmadiyah dari Prov. NTB mengungsi ke wilayah Kab. Konse dan Kendari, meskipun jumlahnya masih relatif sangat sedikit namun sangat berpotensi terjadinya konflik horizontal antar sesama pemeluk agama;

e) masih

- e) masih berlakunya hukum adat denda (Peohala), terhadap perbuatan asusila yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga beberapa kasus terhadap para pelaku yang dianggap melanggar aturan sekalipun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana murni kepada si pelanggar dikenai hukum adat berupa denda Peohala (si pelanggar diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak keluarga korban/pelapor);
- f) kebiasaan masyarakat didalam menyambut dan merayakan tahun baru akan selalu diisi berbagai acara hiburan termasuk menggunakan mercon dan petasan hingga menggelar tari-tarian daerah yang sangat populer di Sultra yaitu Tari Lulo yang biasa digelar hingga larut malam oleh kaum muda-mudi.

Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang. Gerakan protes yang dilakukan oleh sekumpulan orang di depan umum dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu. Fenomena penggunaan *people pressure* untuk capai tujuan ditandai dengan intensitas aksi Unjuk rasa di wilayah Sultra yang cukup tinggi. Kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat, lemahnya penegakan hukum, indikasi korupsi yang melibatkan birokrasi melatarbelakangi timbulnya aksi dari elemen mahasiswa, LSM dan masyarakat. Adapun jumlah aksi Unras yang terjadi selama periode Januari s/d Desember 2020 adalah sebanyak 832 kali aksi, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KESATUAN	PENGGOLONGAN UNRAS TAHUN 2020				JUMLAH
		POLITIK	SOSBUD	EKONOMI	KEAMANAN	
1	RES KENDARI	7	223	55	26	311
2	RES KOLAKA	2	10	26	8	46
3	RES BAU-BAU	10	11	22	28	71
4	RES MUNA	9	68	2	0	79
5	RES KONAWE	3	45	33	0	81

NO	KESATUAN	PENGGOLOONGAN UNRAS TAHUN 2020				JUMLAH
		POLITIK	SOSBUD	EKONOMI	KEAMANAN	
6	RES KONSEL	10	16	11	1	38
7	RES KOLUT	2	8	2	1	13
8	RES BOMBANA	0	8	4	0	12
9	RES BUTON	19	45	3	3	70
10	RES WAKATOBI	12	16	23	6	57
11	RES KONUT	2	4	21	1	28
12	RES BUTUR	4	19	2	1	26
TOTAL		80	473	204	75	832

Di era globalisasi dewasa ini menjadikan dunia terasa sempit karena kita dengan mudah dapat mengetahui perkembangan informasi dan menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain dengan cepat. Kondisi tersebut disebabkan dengan perkembangan teknologi internet dan banyak bermunculan social media yang bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan social media berawal dari Friendster, kemudian Facebook, Twitter, Skype, Foursquare, Line, What's App, Path, Instagram, Snapchat dan masih banyak lainnya. Fenomena kebutuhan akan media sosial yang menjadi trend bukan hanya dikalangan masyarakat dewasa bahkan pelajar sekolah dan anak-anak yang belum cukup umur juga sudah akrab dengan social media. Hakekatnya Medsos dan internet dibuat untuk membantu manusia dalam rangka sarana penyebaran informasi dan memperluas hubungan pertemanan/networking antara penggunanya, namun saat ini sering kali disalahgunakan sebagai sarana kegiatan kejahatan/kriminal (judi, prostitusi, kejahatan dunia maya, pornografi, dll), sarana penyebaran paham radikal, ataupun penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan provokasi Sara.

Dalam rangka meningkatkan promosi pariwisata di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia telah menetapkan 100 *wonderful events* dan Top 10 *national events* sebagai *calender of events* Kementerian Pariwisata tahun 2019 dalam Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.162/HM.304/MP/2018. Dalam daftar 100 *event* tersebut Wilayah Sultra masuk dalam region III dengan kegiatan pariwisatanya yaitu Wakatobi Wave 2019 dan Festival Keraton Kesultanan Buton.

Terdapat

Terdapat aliran kepercayaan/sekte keagamaan yang cenderung menyesatkan dan telah menimbulkan keresahan masyarakat Sulawesi Tenggara, adapun kelompok tersebut antara lain Jamaah Ahmadiyah yang tersebar di Kota Kendari, Kab. Konawe Selatan, Kab. Kolaka dan Kab. Buton. Aliran Annasir di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara Utara, Aliran Syiah yang bermarkas di Lrg. Mata Air Jl. HEA. Mokodompit Kota Kendari.

Konflik internal agama yang terjadi disebabkan karena perbedaan keyakinan dalam menafsirkan dan memahami makna dari Al Quran dan hadits, dimana masing-masing kelompok mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar dan menghakimi kelompok yang tidak sepaham sebagai pihak yang sesat, musrik, murtad bahkan kafir. Pada tanggal 11 Oktober 2016 terjadi penolakan terhadap peringatan Hari Asyura yang dilaksanakan oleh Kelompok Syiah di Hotel Qubra Kendari oleh Jamaah Islamic Center Muadz Bin Jabal Kendari.

Kerukunan antar umat beragama di wilayah Sultra saat ini masih terjalin dengan harmonis, namun pada tahun 2017 hingga 2018 telah terjadi beberapa kasus yang dapat mengganggu kehidupan beragama di wilayah Sultra antara lain :

- a) permasalahan yang terjadi di SMA 11 Konsel dimana Guru honorer an. I Wayan Suardiatmika alias I Wayan Miko selaku guru sejarah di kelas 10 diduga telah melakukan penghinaan agama pada tanggal 6 Pebruari 2018 saat mengajarkan sejarah kepada siswanya. I Wayan Suardiatmika, S.Pd. mengatakan bahwa Ka'bah yang disembah umat Islam terbuat dari batu, sajennya umat Hindu membuat kita sehat kalau Alqur'an dimakan membuat kita sakit;
- b) pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Mesjid Fastabikuhairat Kel. Masiri Kec. Batauga Kab. Buton Selatan telah terjadi penganiayaan terhadap salah seorang rombongan Jama'ah Tabligh yang berasal dari Sulawesi Selatan an. Edi Hardi alamat Desa Barania, Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai. Atas kejadian tersebut mendapat kecaman yang viral di media sosial (*facebook*);

pada

- c) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 telah diamankan seorang lelaki an. Sukarno alias Karno, 25 Februari 1999, Islam, pelajar SMU, alamat Desa Oempu Kec. Tongkuno Kab. Muna terkait postingannya di akun media sosial *facebook* bernama “Inal” yang mengirim gambar seseorang sedang menginjak Kitab Suci Alquran;
- d) pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Kel. Lawama Kec. Tongkuno Selatan Kab. Muna telah terjadi pengrusakan pagar Gereja ST. Mikhael yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Kec. Tongkuno Selatan dengan kronologis yaitu pada saat masyarakat Muslim Tongkuno Selatan melintas di depan Gereja ST. Mikhael melihat masyarakat Katolik membangun pagar Gereja, kemudian beberapaorang masyarakat Muslim tersebut mencabut 3 (tiga) pohon pagar yang ditanam. Kejadian tersebut dilatar belakangi sengketa lahan antara masyarakat Tongkuno Selatan dengan pemilik Gereja ST. Mikhael;
- e) pada hari Senin tanggal 18 September 2017 bertempat diJl. Jendral Sudirman Kec. Katobu Kab. Muna telah terjadi pengrusakan kaca jendela Gereja GPIB Beth-El Raha yang dilakukan oleh OTK dengan kronologis yaitu pelaku melakukan pelemparan ke Gereja GPIB Beth-El Raha menggunakan batu sehingga mengakibatkan kaca jendela Gereja pecah;
- f) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Lorong Beringin Jl. HEA Mokodompit Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari Kota Kendari ditemukannya selebaran bernuansa SARA bertuliskan “Kepton tidak layak mekar, mahasiswa Buton itu bodoh”.

Pada tanggal 30 Desember 2020, Pemerintah resmi menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Penetapan pelarangan FPI disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej. Pembubaran dan pelarangan FPI dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh enam pejabat kementerian dan lembaga. Surat Keputusan Bersama

Mendagri

Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala BNPT Nomor 220-4780 Tahun 2020 nomor M.HH-14.HH05.05 Tahun 2020 nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Pasca dikeluarkannya SKB tersebut telah menimbulkan aksi protes dari pengurus dan simpatisan FPI di wilayah Indonesia termasuk di Prov. Sultra yang diwujudkan melalui aksi unjuk rasa dan komentar melalui media sosial. Kepengurusan FPI di wilayah Sultra yang aktif melaksanakan kegiatan sebelum dikeluarkannya SKB tersebut terdapat di wilayah Kota Kendari dan Kab. Kolaka.

Ditengah pandemi virus corona atau Covid-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mengoptimalkan peran kepala sekolah dalam pelaksanaan implementasi new normal di lingkungan sekolah.

Kepala Sekolah harus memastikan sekolahnya telah memenuhi seluruh aspek new normal diantaranya penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Untuk kesiapan hal tersebut, pihak Dikbud Prov. Sultra terus melakukan visitas ke sekolah-sekolah SMA dan sederajat untuk meninjau perkembangan implementasi new normal di sekolah. Komponen new normal yang wajib diimplementasikan di lingkungan sekolah meliputi, penggunaan masker, menjaga jarak, ketersediaan tempat cuci tangan, tidak menukar peralatan makan dan minum, hingga perilaku hidup sehat harus terus dilaksanakan di lingkungan sekolah.

Terjadi peningkatan yang besar terhadap pertumbuhan jumlah transportasi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di Wilayah Sultra khususnya Kota Kendari sebagai dampak dari perkembangan ekonomi/investasi, kemudahan yang diberikan oleh perusahaan otomotif untuk mendapatkan kendaraan dengan harga murah serta kehadiran aplikasi angkutan umum berbasis *online* sehingga sebagian orang berani untuk mengkredit mobil baru dengan mengharapkan penghasilan sebagai *driver* angkutan *online*. Aturan resmi terkait sistem angkutan umum berbasis *online* perlu segera diterbitkan untuk mencegah munculnya

permasalahan

permasalahan-permasalahan baru. Terkait dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor apabila tidak diimbangi dengan sarana/prasarana jalan akan berakibat timbulnya masalah lalu lintas seperti kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta permasalahan sosial lainnya.

Permasalahan sengketa agraria akan terus menjadi permasalahan yang berkembang di wilayah Sulawesi Tenggara, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, di daerah pemukiman, di daerah pertanian/perkebunan maupun daerah industri. Kompleksitas dan kerumitan masalah pertanahan disebabkan oleh karena pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa masing-masing mengklaim memiliki alat bukti yang sah atas kepemilikan tanahnya. Kasus pertanahan merupakan masalah kompleks yang timbul sebagai dampak dari pertumbuhan/perkembangan ekonomi suatu daerah sehingga memberikan nilai tambah terhadap harga lahan, disisi lain adanya kebijakan pemerintah yang memberi kesempatan kepada perusahaan besar untuk melakukan investasi juga melatarbelakangi beberapa kasus sengketa lahan yang terjadi di Sultra. Ada dorongan-dorongan khusus dan kemudahan-kemudahan untuk perusahaan tersebut, yang kini berakibat adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi itu dengan distribusi kepemilikan tanah. Pada awalnya kasus pertanahan hanyalah merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat. Namun dalam perkembangannya permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas, yang penanganannya harus diselesaikan secara hukum positif.

8) Keamanan.

Kondisi keamanan sangat dipengaruhi oleh cara penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul. Secara umum situasi keamanan di wilayah hukum Polda Sultra masih relatif aman dan kondusif, gangguan keamanan dapat dilihat dari gangguan kriminalitas, gangguan Kamtibmas Lantas dan gangguan Kamtibmas non pidana. Namun di beberapa daerah tertentu masih terjadi kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti perkelahian antara kelompok

pemuda

pemuda, perampokan/jambret, CuRanmor, penipuan dan lain-lain. Jenis-jenis kejahatan yang terjadi masih didominasi oleh tindak pidana yang bersifat konvensional seperti Anirat, Curat, Curas, judi, penipuan, penggelapan, pengeroyokan, Miras, KDRT dan lain sebagainya.

a) data jenis kejahatan dan gangguan Kamtibmas tahun 2017 s/d 2020

NO.	PENGGOLONGAN KEJAHATAN	PERIODE			
		2017	2018	2019	2020
1.	Konvensional	5.333	4.042	3.798	3874
2.	Trans Nasional	645	627	282	468
3.	Kekayaan Negara	39	48	30	29
4.	Kontinjensi	30	54	91	42
5.	Lain-lain	173	165	194	198
JUMLAH		6.973	6.220	4.395	4.611

Sumber : Roops Polda Sultra

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
I.	KONVENSIONAL				
1.	Tibum	2	7	2	0
2.	Pembunuhan	22	32	19	30
3.	Anirat	7	17	21	12
4.	Penculikan	3	3	2	1
5.	Curas	56	47	40	43
6.	Curat	205	116	100	81
7.	Curanmor	452	191	151	258
8.	pemeriksaan	45	30	29	20
9.	Pemerasan	9	4	12	8
10.	Lalai akibat MD	4	16	2	3
11.	Lalai akibat LB	4	19	2	7
12.	Perjudian	53	81	38	40
13.	Perzinahan	43	40	36	37
14.	Penadahan	20	4	2	9
15.	Pengrusakan	227	220	94	135
16.	Penipuan	591	450	303	252
17.	Penggelapan	216	157	132	114
18.	Curi ringan	7	17	6	7
19.	Curi biasa	909	780	511	422
20.	Kej kesopanan	6	8	3	3
21.	Aniaya ringan	40	27	14	18
22.	Aniaya biasa	1328	1214	992	1056
23.	Palsu surat	83	51	37	34
24.	Serobot tanah	51	29	33	32
25.	Curi hewan	28	22	12	20
26.	Penemuan mayat	29	17	32	30
27.	Penghinaan	74	66	46	38
28.	Pengeroyokan	424	390	386	356
29.	Bunuh diri	7	2	0	0
30.	Lahgun Sajam	133	149	114	77
31.	Pengancaman	205	176	131	139

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
32.	Prbt tidak senang	53	20	5	2
33.	Migas	19	14	7	14
34.	Kawin tidak izin	25	18	13	18
35.	Aniaya dlm kel	322	259	191	198
36.	Ket palsu	7	11	6	3
37.	Setubuhi anak bawah umur	45	44	97	143
38.	Percobaan curi biasa	9	2	4	4
39.	Cemar nama baik	106	46	17	27
40.	Kej terhadap kddkn warga	1	2	1	0
41.	Bawa lari perempuan	11	5	7	8
42.	Aniaya hewan	0	0	0	1
43.	Bawa lari anak orang	10	11	4	10
44.	Perkelahian 1 lawan 1	0	0	0	0
45.	Curi dalam keluarga	0	2	3	1
46.	Percobaan pemerkosaan	12	14	8	14
47.	Pencabulan	132	132	110	109
48.	Pelecehan anak bwh umur	3	3	0	7
49.	Percobaan pembunuhan	1	1	0	1
50.	Masuk pekarangan tanpa izin	42	39	13	20
51.	Percobaan pencabulan	1	0	0	0
52.	Percobaan bunuh diri	0	2	0	0
53.	Kej dlm jabatan	21	24	10	12
	JUMLAH	6.225	5.333	3.798	3874
II.	TRANS NAS CRIME				
	A. TERORISME				
54.	Radikal	0	0	0	0
55.	Separatis	0	2	0	0
56.	Politik	0	2	0	0
57.	Individu dll	0	0	0	0
	B. SENPI dan HANDAK				
58.	Lundup senpi	0	1	0	0
59.	Dagang sendak/bom ikan	11	7	5	2
60.	Kej senpi/rakitan/petasan	6	1	2	2
	C. BAJAK LAUT				
61.	Perbatasan	0	0	0	0
62.	Teritorial	0	0	0	0
	D. DAGANG MANUSIA				
63.	Dagang anak	2	27	0	1
64.	Dagang wanita	0	0	1	0
65.	Imigrasi	0	0	0	0
66.	TKI	0	54	0	0
	E. NARKOBA				
67.	Narkotika	108	185	165	373
68.	Psikotropika	1	1	0	5
69.	Ganja	0	0	0	0
70.	Obat berbahaya/MIRAS	508	260	108	85
	F. EKONOMI				
71.	Perbankan	2	1	0	0
72.	Corporasi	1	0	1	0
73.	Asuransi	0	83	0	0
74.	Upal	6	2	0	0

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
	G. MONEY LAUNDRING				0
75.	Antar negara	0	1	0	0
76.	Internal RI	0	0	0	0
	JUMLAH	509	645	282	468
III.	KEJ. KEKAYAAN NEGARA				
77.	Illegal logging	21	22	12	11
78.	Curi listrik	0	7	0	0
79.	Illegal minning	5	3	2	9
80.	Illegal fishing	2	2	2	1
81.	Pencurian uang	0	0	0	1
82.	Korupsi	11	14	14	7
	JUMLAH	39	48	30	29
IV.	KONTINJENSI				
83.	Rusuh masal	0	0	0	0
84.	Sara	0	0	0	0
85.	Bencana alam	2	0	0	4
86.	Perkelahian Pok	0	0	1	0
87.	Kebakaran	16	41	71	30
88.	Perkelahian aparat	1	3	0	0
89.	Laka laut	0	3	3	0
90.	Laka udara	0	0	0	0
91.	Makar	0	0	0	0
92.	Pembakaran	11	7	16	6
	JUMLAH	30	54	91	42
V.	LAIN-LAIN				
93.	Tindak pidana ITE	-	7	12	14
94.	Aborsi	2	3	3	2
95.	Obat daftar G	4	0	0	0
96.	UU. sehat&lindung	2	0	1	2
97.	Tindak pidana pornografi	2	0	1	0
98.	Terlantarkan keluarga	4	15	2	6
99.	Penemuan bom	0	0	1	1
100.	Percobaan pembakaran	3	0	2	3
101.	TP dibidang perikanan	0	0	0	0
102.	Pengrusakan kuburan	0	0	0	0
103.	Penemuan bayi	0	0	0	0
104.	Kejahatan terhadap jiwa org	1	0	2	0
105.	Terlantarkan anak	3	0	1	1
106.	MD tertimpa pohon	1	7	0	0
107.	Kej thd kmrdkn seseorang	0	1	5	0
108.	MD kena sengatan listrik	1	0	0	0
109.	Laka kerja	4	0	4	3
110.	UU perlindungan anak	47	54	42	41
111.	Kekerasan trhdg anak	44	45	86	87
112.	Prostitusi	0	0	0	1
113.	Masuk pekarangan tanpa ijin	0	0	0	1
114.	Pemufaktan jahat	0	0	1	0
115.	Rusak tanaman	0	0	0	0
116.	Obat berbahaya	2	3	1	2
117.	Perkelahian 1 lawan 1	0	0	0	0

118. Kej.

NO.	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
118.	Kej. mendatangkan bahaya	0	0	1	0
119.	Lalai menimbulkan ledakan	2	0	0	10
120.	Menghasut orang	21	7	14	2
121.	Perampasan hak milik	4	9	3	0
121.	Aborsi	0	0	2	2
122.	Palsu tanda tangan	4	2	1	0
123.	UU perlindungan konsumen	2	1	2	0
124.	Percobaan Curat	0	2	0	0
125.	Mucikari	0	0	0	0
126.	Suap	0	0	0	10
127.	MD karena sesak nafas	1	0	0	0
128.	Mengganggu usaha tambang	0	0	0	0
129.	Kej. thdp kesusilaan	1	8	1	0
130.	TP. perkebunan	0	0	0	2
131.	Kej. t. keamanan umum	3	0	1	0
132.	Memaksakan kehendak	0	0	0	5
133.	TP. jaminan pidana	7	1	6	3
	JUMLAH	173	165	194	198
	JUMLAH TOTAL	6.220	4.936	4.395	4.611

Sumber : Roops Polda Sultra

b) data Laka Lantas tahun 2017 s/d 2020 sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL
			MD	LB	LR	
1.	2017	1.099	248	298	1.290	Rp. 3.649.655.000,-
2.	2018	831	239	216	970	Rp. 2.880.620.000,-
3.	2019	879	240	75	992	Rp. 2.404.600.000,-
4.	2020	765	198	77	966	Rp. 2.364.400.000,-

Sumber : Roops Polda Sultra

c) data pelanggaran lalu lintas tahun 2017 s/d 2020 sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	DENDA
1.	2017	42.727	Rp. 2.562.483.959,-
2.	2018	32.148	Rp. 2.982.521.000,-
3.	2019	45.319	Rp. 3.684.214.000,-
4.	2020	27.642	Rp. 2.647.725.000,-

Sumber :Roops Polda Sultra

b. analisis

b. analisis SWOT.

1) *strength* (kekuatan).

- a) jumlah personel Polda Sulawesi Tenggara dan jajaran sampai dengan Juni 2021 sebanyak 7.049 orang dengan rincian sebagai berikut:

(1) Polri sebanyak : **6.867** orang;

(2) PNS sebanyak : **182** orang.

Dengan demikian rasio perbandingan jumlah Polri dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak **2.636.161** sehingga ratio jumlah penduduk dibandingkan jumlah anggota PolriPolda Sulawesi Tenggara adalah 1:373;

- b) sarana dan prasarana Polda Sulawesi Tenggara dari berbagai jenis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Polda Sulawesi Tenggara guna melayani masyarakat telah digelar sampai dengan tingkat Polsek dan Polsubsektor walaupun masih perlu dilakukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya;
- c) komitmen pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Polda Sulawesi Tenggara dengan melaksanakan program *quick wins* maupun Promoter;
- d) postur kekuatan Polda Sulawesi Tenggara dengan struktur Polda Cukup, Polres Besar dan Polsek Kuat diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran kekuatan dan lapis kemampuan Polri tergelar mulai tingkat Polda sampai tingkat kecamatan dengan struktur 1 (satu) Mapolda, 12 (dua belas) Polres, 134 (seratus tiga puluh empat) Polsek dan 10 (sepuluh) Polsubsektor;
- e) meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polsek dan diterima pada awal tahun anggaran berjalan, sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu mengelola kegiatan dan anggaran untuk program yang lebih prioritas dan berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;

f) kemampuan

- f) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak khususnya penanganan *transnational crime* (terorisme dan Narkoba), kejahatan terhadap kekayaan negara (*illegal logging, illegal minning dan illegal fishing*) dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
 - g) terisinya jabatan dan unit-unit baru dari mulai tingkat Mapolda sampai dengan tingkat Polsek sesuai dengan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 maupun Perpol Nomor 2 Tahun 2021 yang bertujuan semakin meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat;
 - h) adanya tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
- 2) *weakness* (kelemahan).
- a) masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus (Alsus) untuk beberapa penugasan khusus oleh satuan-satuan operasional;
 - b) anggaran Polda Sulawesi Tenggara belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran prioritas Polda Sulawesi Tenggara apalagi untuk pemenuhan anggaran ideal, sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materiil yang dibutuhkan dalam pelayanan prima dan penerapan teknologi informasi *online* dari Polsek ke Polres langsung ke Polda dan sebaliknya;
 - c) masih kurangnya kualitas sumber daya manusia Polda Sulawesi Tenggara yang profesional dan ahli dibidangnya serta penempatan personel tidak sesuai dengan keahliannya;
 - d) penggelaran personel belum sesuai dengan postur Polda cukup, Polres besar dan Polsek kuat;
 - e) belum

- e) belum terpenuhi sarana perumahan dinas (Pamen, Pama dan Bintara) sehingga personel dalam melaksanakan tugas tidak optimal;
 - f) masih terbatasnya Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri yang berlatar belakang pendidikan S-1 atau yang setara, berdampak kepada kurangnya kualitas dan kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti *cyber crime*, *money laundring*, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan Narkoba.
- 3) *opportunities* (peluang).
- a) sistem desentralisasi/otonomi daerah yang mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat saling menunjang terhadap pelaksanaan Tupoksi Polri di daerah;
 - b) partisipasi publik dalam konteks perpolisian masyarakat termasuk kesediaan mengungkap perkara;
 - c) kesadaran masyarakat tentang pemahaman tugas–tugas kepolisian;
 - d) program reformasi birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri mencakup aspek struktural, instrumental dan khususnya aspek kultural.
- 4) *threatness* (ancaman).
- a) **Geografi.**
- (1) berdasarkan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kedudukan perairan Sultra berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III yang menghubungkan antara Samudra Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda menuju Timor Leste dan Benua Australia melalui Laut Banda pada wilayah Sultra bagian timur serta perairan

Sultra yang juga merupakan jalur nasional sekunder menjadi salah satu alternatif pelabuhan hubungan internasional komoditas berskala ekspor. Akan ramai dilewati oleh lalu lintas kapal-kapal dari kawasan Asia Tenggara kondisi tersebut rentan terhadap :

- (a) dijadikan jalur lintas/transit penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang hendak mencari suaka di Australia;
 - (b) penyelundupan barang (bahan tambang, hasil hutan, hasil pertanian dan perkebunan dan lain-lain);
 - (c) penangkapan ikan di perairan Sultra secara ilegal;
 - (d) masuknya pelaku teror dari Mindanau Selatan dan barang terlarang (Senpi, Handak dan Narkoba);
 - (e) masuknya kapal asing yang berasal dari luar kawasan Asean secara ilegal.
- (2) beberapa wilayah yaitu Kab. Konawe Utara berbatasan langsung dengan daerah rawan terorisme yaitu Sulawesi Tengah (Poso) yang saat ini lagi melaksanakan operasi perburuan pelaku teror (Tinombala), sehingga Provinsi Sultra berpotensi sebagai tempat pelarian/persembunyian pelaku teror dan penyebaran paham radikal untuk membentuk sel-sel jaringan baru;
- (3) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim dengan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah tertentu berpotensi menimbulkan ancaman banjir, tanah longsor, sementara pada musim kemarau yang berkepanjangan berpotensi pada terjadinya bencana kekeringan dan kebakaran hutan/ lahan. Perkiraan terjadi anomali cuaca yang ekstrem akan kembali berlangsung di tahun 2022 yang menyebabkan badai siklon tropis “Cendana” dan “Dahlia” yang menyebabkan terjadinya bencana

bencana hydrometeorologi (bencana alam yang disebabkan faktor cuaca) seperti angin puting beliung;

- (4) selain itu wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah kepulauan yang masih mengandalkan transportasi laut dalam mobilisasi masyarakat. Pada musim tertentu yaitu musim angin barat dan angin timur, wilayah laut/perairan Sulawesi Tenggara memiliki gelombang laut yang cukup tinggi mencapai 3 (tiga) hingga 6 (enam) meter rawan terjadi di Perairan Wakatobi, Laut Banda Timur Sultra, Perairan Manui Kendari dan Teluk Bone. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerawanan terjadinya kecelakaan laut khususnya pada daerah-daerah kepulauan;
- (5) kondisi geografis wilayah Indonesia masuk dalam *Ring of Fire Pacifik* (sabuk api Pasifik) dikelilingi oleh lempengan bumi antara lain lempeng Pasifik, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Sulawesi Tenggara juga tidak terlepas dari ancaman bencana gempa bumi Tektonik yang disebabkan karena pergeseran, patahan atau tumbukan lempengan kerak bumi, yang apabila terjadi di wilayah perairan berpotensi menyebabkan Tsunami;
- (6) beberapa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki sungai-sungai yaitu Kab. Konawe, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton Utara, Kab. Buton yang dimanfaatkan oleh masyarakat pedalaman/pedesaan sebagai jalur transportasi air, namun dalam perkembangannya dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan khususnya *illegal logging* dengan mengangsur kayu melalui sungai dengan cara dijadikan rakit.

b) Demografi.

- (1) dengan jumlah penduduk yang besar, perkembangan jumlah penduduk yang cepat, penyebaran dan kepadatan yang tidak merata serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terhadap terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan dengan dimensi yang kompleks dan luas, antara lain meningkatnya premanisme, gelandangan dan pengemis, WTS, *street crime* dan lain-lain;
- (2) periode tahun 2022 Indonesia akan memperoleh bonus demografi begitu pula di Sulawesi Tenggara, mengingat jumlah usia produktif mengalami peningkatan. Kondisi ini merupakan suatu peluang sekaligus dapat menjadi ancaman ketika usia produktif tersebut tidak memperoleh kesempatan lapangan pekerjaan yang layak, terlebih dengan perkembangan globalisasi mengakibatkan ketatnya persaingan kerja, bahkan beberapa negara mengalami kegagalan dalam mengoptimalkan bonus demografi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya secara optimal;
- (3) penyebaran penduduk di wilayah/daerah tertentu masyarakat pendatang lebih dominan atau cenderung seimbang dengan tingkat kesejahteraan antara masyarakat pendatang tidak seimbang maka sangat berpotensi terjadinya kecemburuan sosial yang dapat berujung pada terjadinya konflik horizontal berlatar belakang SARA;
- (4) keberagaman budaya, etnis, agama dan suku disatu sisi merupakan aset bangsa, namun dapat dijadikan celah oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan provokasi untuk memicu munculnya konflik komunal bernuansa SARA.

c) Sumber

c) Sumber Daya Alam.

Kondisi sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara selain merupakan potensi bagi pemasukan devisa negara dan daerah serta peningkatan perekonomian rakyat, apabila tidak dikelola dan diamankan dengan baik, juga merupakan potensi kerawanan, berupa :

- (1) terjadinya eksploitasi secara ilegal, baik berupa *illegal logging*, *illegal mining* dan *illegal fishing* yang dapat merugikan kekayaan negara serta menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
- (2) penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menimbulkan kerugian negara;
- (3) kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam;
- (4) persengketaan pengelolaan lahan yang dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal;
- (5) akan menjadi incaran negara asing untuk melakukan investasi/pengolahan, berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga akan berimplikasi pada situasi dalam negeri.

d) Ideologi.

- (1) bergulirnya isu kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi, berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain Pancasila (liberalisme, komunisme gaya baru, Syariat Islam dan ideologi lain) dalam bentuk pertemuan terbuka maupun memanfaatkan kemajuan teknologi internet, media sosial dan media massa. Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;

(2) rongrongan

- (2) rongrongan terhadap ideologi Pancasila bersumber dari pemikiran luar (barat maupun timur) yang dibawa dan disebarkan oleh warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Teknologi informasi yang berkembang pesat dewasa ini disalahgunakan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi/merubah pola pikir masyarakat Indonesia menjadi individualistik, feodal, hedonisme, vandalisme atau menerima LGBT sebagai penghargaan terhadap HAM. Kondisi tersebut dapat menjadi sumber muncul perpecahan di masyarakat yang dapat berujung pada terjadinya aksi persekusi;
- (3) tantangan kedepan khususnya terhadap generasi muda dan kelompok usia pertengahan akan pengaruh masuknya budaya/pemikiran dari luar maupun dalam negeri yang bersifat negatif melalui penafsiran yang keliru terhadap paham keagamaan, kesukuan dan golongan yang berdampak pada menguatnya politik identitas yang akan mengancam kebhinekaan.

e) Sosial Politik.

- (1) terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran etika dalam penyelenggaraan sistem politik pemerintahan masih rawan terjadi di wilayah Sultra, antara lain :
 - (a) terjadinya tarik menarik kepentingan politik dalam lembaga legislatif;
 - (b) terjadinya manuver politik yang berdampak pada perebutan kekuasaan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan dan korup dalam penentuan kebijakan legislasi regulasi pemerintah;
 - (c) korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan;
 - (d) terjadinya pelanggaran kewenangan dan etika publik akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi.

- (2) wacana terkait refisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mendorong pelaksanaan Pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 serta pemilihan serentak diundur menjadi tahun 2027. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada antara lain:
- (a) politik identitas/politisasi Sara;
 - (b) pemanfaatan media dan perang cyber;
 - (c) maraknya berita hoax, ujaran yang mengandung kebencian dan propaganda;
 - (d) permasalahan terkait profesionalitas penyelenggara dari level atas hingga tingkatan paling bawah;
 - (e) *money politik* dan *black campaign*;
 - (f) penggunaan fasilitas negara dan pelibatan aparat pemerintah;
 - (g) terjadinya konflik horizontal yang melibatkan massa pendukung.
- (3) potensi disharmonisasi hubungan antara kepala dilatarbelakangi oleh persaingan politik, akibat tumpang tindih kewenangan atau karena pembagian peran/kewenangan yang dianggap tidak adil antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program kegiatan pemerintah bahkan terabaikannya aspirasi masyarakat;
- (4) efektivitas pemerintahan daerah yang akan dipimpin oleh pejabat kepala daerah pada tahun 2022, 2023 hingga 2024 akan menjadi salah satu persoalan mengingat kewenangannya yang terbatas sehingga dapat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan dan investasi di daerah. Keterbatasan tersebut juga berpotensi pada keluarnya keputusan dari pejabat kepala daerah yang akan dianggap melampaui kewenangan / penyalahgunaan wewenang;
- (5) pelaksanaan

- (5) pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangunan infrastruktur dan geliat investasi rentan menggelincirkan pejabat daerah dalam pusaran kasus korupsi berupa suap dan penyalahgunaan kewenangan;
- (6) isu degradasi terhadap kinerja Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah oleh elemen pergerakan aksi dan tokoh politik oposisi dengan mengkritisi kinerja pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan serta kritik terhadap kinerja aparat penegak hukum;
- (7) dalam kondisi suprastruktur politik indonesia kekuasaan eksekutif dan legislatif memberikan peran besar terhadap partai politik dalam penentuan pimpinan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah serta legislatif. Kondisi tersebut telah berpengaruh pada independensi dan netralitas pejabat pemerintahan sehingga cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan kelompok/partainya;
- (8) upaya pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru sarat dengan kepentingan politik dari kelompok atau individu tertentu sehingga terkesan dipaksakan dan mengabaikan pentahapan serta prinsip-prinsip daerah otonom seperti tapal batas wilayah, letak ibukota, partisipasi masyarakat dan sumber daya yang dimiliki sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;
- (9) peran media massa baik cetak maupun elektronik serta kebebasan pers yang terus tumbuh dan berkembang namun belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan. Media massa masih mengutamakan kepentingan kebutuhan ekonomi dibandingkan resiko sosial politik. Media massa memiliki peranan dalam memelihara stabilitas Kamtibmas yang kondusif dengan menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif;

(10) dalam

(10) dalam kaitan penegakan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, beberapa hal yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, antara lain:

- a) masih adanya subtansi hukum yang tumpang tindih dan terjadinya inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut dapat berakibat pada terjadinya ketidakpastian hukum sehingga berimplikasi terhadap kehidupan politik, ekonomi (investor dan pelaku usaha), sosial budaya dan keamanan;
- b) masih kurang ketegasan dari lembaga penegak hukum, selain itu kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas serta masih kurang transparannya sistem peradilan sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan keamanan, akibat masih lemahnya penegakan hukum. Hal ini terlihat dari masih adanya komersialisasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum, masih adanya intervensi kekuatan politik dan kekuatan massa, sarana dan prasarana hukum yang belum memadai dan masih kurangnya budaya kesadaran hukum baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat;
- (c) penegakan hukum masih akan dihadapkan pada belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum, adanya praktek mafia peradilan dan diskrimasi dalam penegakan hukum. Faktor lainnya yang dapat menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan profesionalisme aparat penegak hukum yang sampai saat ini belum mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

f) Sosial Ekonomi.

- (1) pandemi Covid-19 berdampak pada pelemahan usaha dan perlambatan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global diperkirakan masih akan mempengaruhi iklim investasi dan situasi perekonomian di wilayah Sulawesi Tenggara, di mana para investor akan mengalami beberapa permasalahan seperti terbatasnya kredit, sehingga akan berpotensi bagi munculnya konflik sosial pertumbuhan ekonomi di wilayah Sultra, krisis ekonomi dan keuangan diperkirakan akan mempengaruhi iklim investasi dan situasi perekonomian di wilayah Sulawesi Tenggara, terjadinya pandemic Covid 19 diperkirakan masih akan berdampak terhadap kondisi perekonomian di wilayah Indonesia khususnya di Sulawesi Tenggara yang ditandai dengan masih melambatnya giat pada sektor-sektor ekonomi khususnya sektor pariwisata, perdagangan, ketenagakerjaan, perhotelan, jasa serta investasi. Dilain pihak adanya kebijakan pemerintah dibidang ekonomi sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak dari pandemik Covid 19 dalam rangka mengurangi beban ekonomi masyarakat namun disisi lain adanya program tersebut sangat rawan terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang serta aksi protes karena kebijakan tersebut dinilai idak tepat sasaran;
- (2) dikeluarnya Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara tanpa didukung dengan pengawasan / pengamanan yang ketat dari Kementerian ESDM dan instasi / lembaga terkait diperkirakan berpotensi terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, yang pada akhirnya berdampak terhadap kerugian negara dan perekonomian nasional;

(3) pemberlakuan

- (3) pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan iklim investasi, peningkatan ekspor barang, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Disisi lain kebijakan tersebut juga mengancam/memberikan dampak buruk terhadap perekonomian antara lain:
- (a) banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang lebih berkualitas;
 - (b) regulasi yang kurang dalam memproteksi kekayaan sumber daya alam, sehingga tindakan eksploitasi dalam skala besar oleh perusahaan asing dapat merusak ekosistem;
 - (c) persaingan tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing, dimana kualitas kemampuan daya saing dan produktivitas tenaga kerja lokal masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri seperti China, Malaysia, Singapura dan Thailand. Dengan disahkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing akan membuka peluang masuknya tenaga kerja kasar *unskilled worker* dari pihak asing yang mengancam keberlangsungan dari lapangan kerja untuk pekerja lokal sehingga berpotensi menimbulkan konflik ketenagakerjaan;
 - (d) timbulnya permasalahan sosial baru sebagai dampak dari pemberlakuan pasar bebas, yang dapat berdampak pada timbulnya gangguan Kamtibmas;
 - (e) meningkatnya tenaga kerja asing dari luar khususnya China dan pekerja dari kawasan Asia Tenggara sehingga rentan terhadap terjadinya pelanggaran hukum dan tindak pidana.

(4) sebagian

- (4) sebagian besar perusahaan industri bermasalah dengan pencemaran lingkungan akibat tidak dilakukannya pengolahan terhadap limbah industri dan analisis dampak lingkungan yang membutuhkan biaya besar dalam pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam;
- (5) kurangnya pemahaman kelompok masyarakat tertentu tentang kebijakan otonomi daerah yang memberikan porsi yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya, telah disalahartikan sebagai kebebasan untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam tambang dengan kurang memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dampak lingkungan hidup, sehingga berakibat berbagai kasus *illegal mining* (penambangan tanpa izin) serta perusakan lingkungan hidup (tidak melaksanakan reklamasi) yang dapat menimbulkan bencana alam, tanah longsor dan banjir. Potensi timbulnya pelanggaran hukum berupa *illegal logging* yang dapat merugikan kekayaan negara, merusak lingkungan hidup, bencana alam, banjir yang menyengsarakan masyarakat cenderung masih akan terjadi;
- (6) kebijakan pemerintah terkait harga BBM dan tarif dasar listrik dimungkinkan akan mengalami koreksi/perubahan di tahun 2022. Kebijakan terkait harga BBM yang menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar akan berdampak pada terjadinya fluktuasi harga di pasaran, disisi lain kenaikan tarif dasar listrik akan semakin menambah beban hidup masyarakat khususnya pada masyarakat kalangan bawah. Protes terhadap kebijakan pemerintah tersebut akan kembali disuarakan oleh Ormas dan kelompok mahasiswa/LSM serta elit yang berseberangan dengan pemerintah (oposisi) baik melalui penyampaian *re/lease* di media cetak/elektronik ataupun dalam bentuk aksi unjuk rasa;

(7) meningkatnya

- (7) meningkatnya aktivitas dan kegiatan perekonomian di wilayah Sultra yang ditandai dengan berdirinya pabrik dan industri yang dalam kegiatan operasionalnya membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah yang besar, kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum/keompok tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan penyalahgunaan BBM;
- (8) dengan adanya Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang tidak jauh berbeda dengan Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 terkait aturan transportasi *online* yang pengawasan dan implementasinya masih lemah akan dimanfaatkan oleh transportasi *online* untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan penyimpangan yang pada akhirnya dapat menimbulkan gesekan dengan moda transportasi konvensional;
- (9) kebijakan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan berakibat kepada timbulnya berbagai permasalahan dibidang lalu lintas seperti kemacetan, kesemerawutan dan pelanggaran serta lintas dan kecelakaan lalu lintas. Lemahnya pengawasan terhadap sarana dan prasarana transportasi serta tidak dipatuhinya ketentuan dan peraturan tentang perhubungan/transportasi, merupakan ancaman terjadinya kasus-kasus kecelakaan kapal laut maupun kecelakaan pesawat udara;
- (10) permasalahan dibidang pertanian, perkebunan, eksploitasi sumber daya alam mineral dan pembangunan infrastruktur masih akan dihadapkan pada masalah sengketa lahan yang berpotensi memicu konflik vertikal maupun horizontal dengan adanya klaim masyarakat lokal atas hak tanah ulayat/adat;
- (11) berbagai permasalahan dibidang pertanian yang berpotensi menimbulkan gangguan dan cenderung masih akan dihadapi adalah :

(a) musim

- (a) musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kekeringan di sejumlah areal persawahan di wilayah Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produksi beras yang berakibat kepada meningkatnya impor beras dari luar daerah;
 - (b) permintaan pupuk meningkat, namun disisi lain terjadi penyalahgunaan pupuk mengakibatkan kelangkaan pupuk serta naiknya harga pupuk dipasaran, kondisi ini menyebabkan kesulitan para petani untuk meningkatkan hasil dan kualitas pertanian;
 - (c) seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, menimbulkan permasalahan kepemilikan atau status tanah, terutama di daerah perkebunan antara tanah adat/ulayat dengan tanah negara. Kondisi ini dapat memicu terjadi konflik antar kelompok.
- (12) fluktuasi harga bahan pokok setiap tahunnya akan berdampak pada memberatkan hidup masyarakat khususnya golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah berpotensi menimbulkan dampak bagi gangguan keamanan dengan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pencurian, pemerasan, penipuan, perjudian, prostitusi dan lain-lain;
- (13) kurang pengawasan di laut serta kurang tegasnya tindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di laut menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di laut berupa penggunaan bom dalam menangkap ikan, penggunaan kapal trawl, berpotensi menimbulkan konflik horizontal diantara nelayan;
- (14) sempitnya lapangan pekerjaan ditambah dengan beragamnya masalah tenaga kerja yang belum teratasi, cenderung masih akan dihadapi serta berpotensi menimbulkan gangguan, antara lain permasalahan PHK, UMR, masalah pesangon dan kesejahteraan pekerja serta upaya penghapusan *out sourcing*, permasalahan TKI di luar negeri.

g) Sosial Budaya.

- (1) ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah membubarkan Ormas HTI dan FPI akan diwujudkan dengan melakukan kritik terhadap pemerintah yang saat ini sedang berkuasa dengan tujuan untuk mendiskreditkan atau menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- (2) pengaruh globalisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap terjadinya perubahan perilaku masyarakat Sulawesi Tenggara yang mana sebagian masyarakat tidak lagi mengindahkan norma hukum, agama dan adat istiadat yang berlaku. Kondisi tersebut merupakan potensi dan kerawanan terhadap meningkatnya berbagai gangguan Kamtibmas seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran kasus-kasus kesusilaan, pencurian, perusakan, perkelahian antar warga, premanisme, penyalahgunaan Narkoba dan lain-lain;
- (3) pemanfaatan media sosial maupun media daring oleh masyarakat tanpa memperhatikan kaidah maupun norma pemanfaatan informasi dengan terlebih dahulu menyaring dan menelaah informasi yang diperoleh menyebabkan terjadinya distorsi informasi dengan maraknya berita *hoax*, *hate speech*, *fake news* yang mengarah pada provokasi masyarakat yang bertujuan memicu instabilitas politik dan keamanan akan kembali terjadi di tahun 2022;
- (4) keragaman etnis, agama, suku dan ras merupakan aset bangsa, yang telah sejak lama terpelihara dalam bingkai kebhinekaan. Ancaman terhadap kebhinekaan akhir-akhir ini kerap kali disuarakan mengatasnamakan agama dalam bentuk ujaran kebencian melalui situs internet dan media sosial. Apabila pemerintah kurang merespon fenomena ancaman tersebut, sewaktu-waktu dapat memicu konflik horizontal yang bernuansa SARA;

(5) aksi

- (5) aksi unjuk rasa di wilayah Sultra pada tahun 2022 akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya dengan intensitas yang cukup tinggi. Fenomena penggunaan *people preasure* untuk capai tujuan tertentu ataupun sebagai bentuk kritik terhadap jalannya pemerintahan dengan menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat, lemahnya penegakan hukum, permasalahan pertambangan, sengketa lahan, indikasi korupsi dan lain-lain yang dimotori oleh elemen mahasiswa, LSM atau Ormas. Dalam pelaksanaannya Unras yang membawa massa dengan jumlah yang besar rentan terprovokasi untuk melakukan kegiatan anarkis disamping itupula sangat rentan pada terjadi pelanggaran terhadap protocol kesehatan Covid 19 sehingga trend perkembangan kasus positif Covid-19 masih akan mengalami peningkatan;
- (6) diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Tempat Ibadah (penutupan sejumlah tempat ibadah yang dinilai tidak memperoleh izin) telah menimbulkan kontroversi masyarakat. Masyarakat yang menolak beralasan Surat Keputusan Bersama tersebut dinilai merugikan agama tertentu dan membatasi kebebasan kegiatan beragama, mereka semakin sulit untuk mendirikan tempat ibadah, sedangkan menurut kelompok yang menyetujui berpendapat bahwa Keputusan Bersama tersebut sudah mewakili semua aspirasi dari berbagai kelompok agama. Perbedaan penafsiran tersebut dapat mengakibatkan konflik antar penganut agama, yang merupakan potensi bagi timbulnya gangguan Kamtibmas;

(7) beberapa

- (7) beberapa aliran/sekte keagamaan yang menyesatkan masyarakat telah menimbulkan keresahan masyarakat antara lain aliran Jamaah Ahmadiyah, Syiah dan Aliran Annatsir. Kebedaradaan penganut aliran tersebut, telah mendapat perhatian dan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu penanganan khusus melibatkan seluruh *stakeholder*/komponen terkait guna mencegah terjadinya aksi anarkisme terhadap sesama umat. Dilain pihak walaupun kerukunan antar umat beragama di wilayah Sultra cukup harmonis, namun adanya upaya-upaya provokosasi oleh oknum/kelompok tertentu terkait permasalahan yang dapat memicu konflik berlatarbelakang SARA di wilayah Sultra perlu diwaspadai;
- (8) penanganan dan pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat masih jauh dari harapan, menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit, seperti demam berdarah (DBD), flu burung, HIV/AIDS, gizi buruk, Muntaber, diare, rabies dan lain-lain di wilayah Sulawesi Tenggara yang pada gilirannya berimplikasi terhadap stabilitas Kamtibmas;
- (9) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah tujuan wisata, disatu sisi dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat namun dilain pihak berpotensi terjadi penyalahgunaan visa bebas kunjungan oleh wisatawan asing memanfaatkan belum maksimalnya pengawasan dari instansi berwenang. Dampak negatif lainnya seperti penolakan dari warga lokal karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat di daerah tersebut serta adanya wisatawan asing yang terlibat tindak pidana;

(10) pengelolaan

- (10) pengelolaan pembangunan sektor pendidikan yang kurang terencana dengan baik dan kurangnya pengawasan, dapat menimbulkan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendidikan, antara lain masalah ijazah palsu, masalah Ujian Akhir Nasional, masalah gelar kesarjanaan dari lembaga pendidikan yang tidak memenuhi syarat, penyimpangan dalam penyaluran dana subsidi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain-lain;
- (11) penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah setempat kepada beberapa pemilik, sehingga menimbulkan sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Penyelesaian sengketa tanah yang berlarut-larut berpotensi terhadap terjadinya gangguan Kamtibmas berupa pendudukan tanah oleh massa, penjarahan hasil kebun milik perusahaan pada saat panen oleh masyarakat, pembakaran/pengrusakan aset perusahaan, sampai dengan terjadinya penganiayaan atau pembunuhan.

h) Keamanan.

Permasalahan-permasalahan di bidang keamanan yang berpotensi menyebabkan timbulnya gangguan keamanan antara lain meliputi :

- (1) berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik permasalahan yang bersumber dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi maupun kondisi sosial budaya, berpotensi terhadap terjadinya gangguan keamanan;
- (2) tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sangat besar dalam mempengaruhi situasi keamanan, sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan, masyarakat bertindak main hakim sendiri;

(3) masih

- (3) masih berkembangnya pemahaman ditengah-tengah masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan di lingkungannya;
- (4) rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan/pelanggaran sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
- (5) kecenderungan masyarakat Sultra mengkonsumsi minuman keras sehingga berakibat mudah emosional, mudah tersinggung, dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah sehingga mengakibatkan sering terjadinya tindak kekerasan seperti penganiayaan, pengeroyokan, KDRT dan tindakan asusila;
- (6) terbatasnya lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi terbatas beban biaya hidup yang semakin tinggi serta minimnya keterampilan, membuat orang atau kelompok tertentu berpikiran pendek mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang melalui cara-cara yang melawan hukum;
- (7) sebagian masyarakat menganggap masalah keamanan segalanya dapat diatur dan ditentukan adat setempat, sehingga penerapan hukum positif kurang maksimal;
- (8) kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan dan rambu rambu lalulintas, kelalaian korban yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, kondisi kendaraan dan jalan serta pengaruh cuaca melatar belakangi terjadinya kecelakaan lalulintas;
- (9) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap wibawa penegakan hukum yang disebabkan karena tindakan aparat Gakkum yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku yang ditandai dengan pengungkapan kasus suap beberapa aparat penegak hukum. Kondisi tersebut telah membuat stigma negatif bahwa hukum menjadi tajam hanya ketika berhadapan dengan masyarakat kalangan bawah.

i) Kegiatan yang berkaitan dengan kalender Kamtibmas.

- (1) peringatan hari-hari besar internasional.
 - (a) hari Bumi (22 April);
 - (b) hari Buruh Internasional (1 Mei);
 - (c) hari Madat/Narkoba (31 Mei);
 - (d) hari Lingkungan Hidup (5 Juni);
 - (e) hari Anti Korupsi se Dunia (9 Desember);
 - (f) hari HAM Dunia (10 Desember).
- (2) peringatan hari-hari besar nasional.
 - (a) hari-hari besar keagamaan
 - (1)) hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha;
 - (2)) hari Natal dan Tahun Baru;
 - (3)) hari Raya Nyepi;
 - (4)) hari Raya Waisak;
 - (5)) hari Imlek (Tahun Baru Cina).
 - (b) hari Pendidikan Nasional;
 - (c) hari Kebangkitan Nasional;
 - (d) hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - (e) hari Olahraga Nasional;
 - (f) hari Kesaktian Pancasila;
 - (g) hari Sumpah Pemuda.
- (3) agenda kegiatan pemerintah daerah
 - (a) hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (27 April);
 - (b) hari ulang tahun kabupaten/kota se Sultra.
 - (1)) Kab. Buton Utara : 2 Juli 2022;
 - (2)) Kab. Konsel : 2 Mei 2022;
 - (3)) Kab. Kolaka : 28 Februari 2022;
 - (4)) Kab. Muna : 4 Juli 2022;
 - (5)) Kab. Konawe : 3 Maret 2022;
 - (6)) Kab.

- (6)) Kab. Buton : 24 April 2022;
- (7)) Kota Kendari : 9 Mei 2022;
- (8)) Konawe Utara : 2 Januari 2022;
- (9)) Kota Baubau : 17 Oktober 2022;
- (10)) Kab. Kolaka Utara : 7 Januari 2022;
- (11)) Kab. Bombana : 18 Desember 2022;
- (12)) Kab. Wakatobi : 18 Desember 2022;
- (13)) Kab. Kolaka Timur : 22 April 2022;
- (14)) Kab. Buton Tengah : 23 Juli 2022;
- (15)) Kab. Buton Selatan : 23 Juli 2022;
- (16)) Kab. Konawe Kep : 22 April 2022;
- (17)) Kab. Muna Barat : 23 Juli 2022.
- (c) kunjungan pejabat negara;
- (d) sidang DPRD Prov/Kab/KoTA.
- (4) agenda kegiatan Partai Politik dan Ormas
 - (a) peringatan HUT Parpol/Ormas;
 - (b) Muswil dan Musda Parpol.
- (5) agenda kegiatan LSM/Mahasiswa.
 - (a) seminar/loka karya/dialog;
 - (b) unjuk rasa;
 - (c) pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan (BEM dan MPM Perguruan Tinggi/Universitas se Sultra).
- (6) hari peringatan peristiwa pelanggaran HAM
 - (a) kasus Trisakti (12 Mei);
 - (b) peristiwa Semanggi I (13 November);
 - (c) peristiwa Semanggi II (24 September);
 - (d) peristiwa Tanjung Priok (12 September);
 - (e) bentrok Polri dan Mahasiswa Unhalu (27 Maret).

2. Identifikasi masalah

- a. dampak ekonomi dari akibat adanya pandemi penyebaran Covid-19 yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. tingginya angka kejahatan konvensional, bila tidak diikuti dengan peningkatan penyelesaian tindak pidana tidak akan memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana;
- c. 5 (lima) kabupaten belum memiliki Polres yaitu Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah sehingga mengakibatkan mobilitas personel tidak lancar terutama dalam memberikan bantuan pengamanan;
- d. kemampuan menyelesaikan perkara yang masih rendah dibandingkan dengan jumlah tindak pidana yang terjadi;
- e. terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polda Sulawesi Tenggara dalam mendukung tugas-tugas operasional dan pembinaan;
- f. terbatasnya sarana yang dimiliki Ditpolairud dalam melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Sulawesi Tenggara;
- g. kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat yang relatif belum optimal karena kondisi geografis wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara yang terdiri dari kepulauan dimana sebagian masyarakatnya bermukim di daerah pesisir pantai dan pegunungan;
- h. partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif masih belum maksimal;
- i. tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan masih sangat rendah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peran Polri dalam pemerintahan, maka tujuan dan sasaran Polda Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Polda Sultra Tahun 2020-2024. Tahapan kebijakan yang ingin dicapai pada tahun 2022 yaitu “Memantapkan pelayanan publik Polda Sultra yang berkualitas global dengan percepatan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang didukung dengan budaya kerja yang professional dan sumber daya aparatur yang kompeten, berintegritas dan sejahtera”.

1. visi dan misi.

a. visi dan misi Polri.

1) visi Polri.

“Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib”.

2) misi Polri.

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”.

b. visi dan misi Polda Sulawesi Tenggara.

1) visi Polda Sulawesi Tenggara.

Mengacu pada visi Polri maka visi Polda Sulawesi Tenggara adalah “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman dan Tertib”.

2) misi Polda Sulawesi Tenggara.

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”.

2. Tujuan jangka menengah.

a. tujuan jangka menengah Polri.

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;
- 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) mewujudkan Polri yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polri;
- 5) menetapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

b. tujuan

- b. tujuan jangka menengah Polda Sulawesi Tenggara.
- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara;
 - 2) menegakkan hukum secara berkeadilan;
 - 3) mewujudkan personel Polda Sultra yang profesional;
 - 4) menerapkan manajemen kepolisian yang terintegritas dan terpercaya.
3. Sasaran prioritas.
- a. sasaran prioritas Polri tahun 2022
- Sasaran prioritas Polri tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
 - 2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri;
 - 3) penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
 - 4) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
 - 5) pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern;
 - 6) penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik.
- b. sasaran prioritas Polda Sultra tahun 2022
- 1) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
 - 2) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polda Sultra;
 - 3) penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik;
 - 4) meningkatkan profesionalme personel Polda Sultra;
 - 5) mengusulkan penambahan Alpalkam dan Almatsus sesuai karakteristik wilayah Sulawesi Tenggara;
 - 6) penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

1. Kebijakan Polri Tahun 2022.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri tahun 2022, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat”**, yaitu:

- 1) penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan nasional melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- c) mengembangkan manajemen operasi Baintelkam Polri;
- d) melaksanakan survei terhadap persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian diarea tempat tinggalnya.

- 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
- b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi;
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta Kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;

d) menguatkan

- d) menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik sektarian yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;
 - e) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris;
 - f) meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
 - g) melaksanakan kerjasama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya;
 - h) menetralsir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;
 - i) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
 - j) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan Kriminalitas;
 - k) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan;
 - l) meningkatkan kegiatan Patroli dan pengamanan di tempat Obvit/ Obvitnas dan tempat pariwisata.
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan “pemolisian prediktif” serta dukungan Polri dalam penanganan Covid-19;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
 - b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
 - c) pembinaan

- c) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP;
 - d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas.
- 4) penanganan konflik secara humanis;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
 - b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis.
- 5) meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam rawan serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli lintas;
 - b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas.
- 6) meningkatkan peran aktif Polri diwilayah rawan gempa dan bencana;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah;

b) menyelenggarakan

- b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan satwa;
 - c) memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
 - d) bersama instansi terkait bekerjasama dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan gempa dan bencana.
- 7) terlaksananya pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2022;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan Brimob Polri yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat event nasional/internasional berlangsung;
 - b) melaksanakan pengamanan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali;
 - c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada event nasional/internasional tahun 2022.
- 8) penggelaran operasional kewilayahan personel Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional serta gangguan kelompok kriminal bersenjata;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengkoordinasikan kesiapan personel Polri untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan Ibu Kota Negara baru;
 - b) melaksanakan dan mengkoordinasikan Kontijensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme;
 - c) melaksanakan

- c) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
 - d) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif;
 - e) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat;
 - f) tergelarnya personel dikawasan obvitnas dan objek tertentu;
 - g) melaksanakan kegiatan pelayanan pelacakan dan penangkalan;
 - h) memperkuat Binmas Noken dengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas.
- 9) peningkatan kerjasama dalam/luar negeri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan Kerjasama antara Polri dan Kementrian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi polisional;
 - b) peningkatan kerjasama KL terkait guna mendukung Kerjasama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerjasama Bilateral dan Multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra Polri/Indonesia di mata Internasional;
 - c) meningkatkan Kerjasama keamanan dan ketertiban internasional di wilayah perbatasan;
 - d) meningkatkan kerjasama dengan BNPT dalam menjalankan program kontra radikalisme, kontra ideologi, kontra propaganda dan moderasi beragama.
- 10) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) patrol

- a) patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
 - b) patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan.
- 11) penguatan Polri dibidang keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) membangun kemampuan operasional Brimob Polri dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan patroli (pre-emptif, preventif dan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
 - b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, Obvit/ Obvitnas dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni;
 - c) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni.
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“mengoptimalkan kualitas pelayanan publik Polri”**, yaitu:
- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta Pelayanan Keliling di Bidang Lalu Lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan Identifikasi sebagai alat kontrol dan data Forensik Kepolisian;
 - b) meningkatkan

- b) meningkatkan pengembangan Registrasi dan Identifikasi dengan memberikan jaminan Legitimasi atas kemampuan Pengemudi dan kendaraan bermotor;
 - c) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi.
- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK online;
 - b) Melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajarannya;
 - c) mengoptimalkan operator (Out Sourcing) untuk Helpdesk Support aplikasi Binmas Online System (BOS);
 - d) meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan Intelkam Polri melalui layanan drivethru perpanjangan SKCK dan layanan SKCK delivery di 34 Polda dan Jajaran Polres.
- 3) keterpaduan pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan tata ruang RPK yang humanis serta berbasis TIK;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
 - b) menyusun standar pembangunan SPKT sesuai SPM.
- 4) mengoptimalkan quick response pelayanan kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pengkajian terhadap aturan/SOP pelayanan publik yang berbelit-belit;
 - b) mengoptimalkan

- b) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
 - c) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan obyek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit;
 - d) mengelola kegiatan respon time di Samapta Mabes Polri dan kewilayahan.
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik”**, yaitu:
- 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;
 - b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan asset recovery), Narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
 - e) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
 - g) penanganan

- f) penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat;
 - g) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;
 - h) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;
 - i) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
 - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP;
- 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat
 - b) guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri dibidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
 - c) mengoptimalkan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan dan transparansi.
- 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengintegrasikan database kriminalitas dari seluruh Satker di lingkungan Polri dan institusi penegak hukum lainnya;
 - b) standarisasi

- b) standarisasi data kriminal nasional (melalui Integrated Smart Criminal Information System).
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri”**, yaitu:
- 1) peningkatan kualitas 8 standar Pendidikan era police 4.0;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) penataan kurikulum yang meliputi 70% praktek dan 30% teori pada seluruh pendidikan baik diktuk, dikbang dan dikbangum;
 - b) *upgrading* dan sertifikasi Gadik/instruktur;
 - c) pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang Worldclass Standar;
 - d) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang Worldclass Standar;
 - e) peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang Worldclass Standar;
 - f) sertifikasi profesi anggota Polri serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri;
 - g) desentralisasi Pendidikan Pengembangan Spesialisasi untuk fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Sabhara ke SPN Polda;
 - h) pelatihan manajemen operasional Polsekyang Worldclass Standar.
 2. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polri;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker;

b) pengembangan

- b) pengembangan struktur organisasi Polri di tingkat Satuan Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;
 - c) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker guna pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional;
 - d) menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif;
 - e) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN.
- 3) melaksanakan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward);
 - b) melaksanakan seleksi dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;
 - c) melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;
 - d) meningkatkan kemampuan/skill Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial secara humanis yang terjadi dimasyarakat dibidang kamtibmas.
- 4) perluasan kerjasama pendidikan didalam dan luar negeri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan perintisan kerjasama pendidikan Dagri dan Lugri;
 - b) melaksanakan

- b) melaksanakan perpanjangan MoU kermadik Dagri dan Lugri;
 - c) Kerjasama dengan Lembaga/Asosiasi sertifikasi COBIT dan ITIL;
 - d) menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan CAT (Computer Asisted Test) ditingkat Polda.
- 5) peningkatan pelaksanaan tatakelola e-government melalui e-planning, e-budgeting dan e-procurement untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengembangkan Aplikasi Sirena secara bertahap;
 - b) mengembangkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan informasi teknologi baik hardware maupun software untuk mendukung aplikasi e-planning dan e-budgeting;
 - c) pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri melalui LPSE sesuai peraturan yang berlaku;
 - d) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/ jasa pemerintah;
 - e) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri.
- 6) pelaksanaan Sistem Manajemen Karir berbasis kinerja serta berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “sistem reward and punishment”;
 - b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;
 - c) mengintegrasikan

- c) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP;
 - d) memperbanyak jumlah assesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus.
- 7) peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama;
 - b) melaksanakan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas;
 - c) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai pada Polri berkaitan dengan ASABRI;
 - d) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;
 - e) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS);
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang modern”**, yaitu:
- 1) pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
 - b) pemenuhan

- b) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;
- c) pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
- d) melaksanakan Pembangunan Indonesia Safety Driving Center;
- e) melaksanakan pembangunan RTMC/TMC;
- f) pemasangan ETLE guna menegakkan hukum secara transparan di jalan raya;
- g) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
- h) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan injurensi;
- i) melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
- j) pembuatan prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
- k) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri serta jaringan Palapa Ring dari Kemenkominfo untuk koneksi Polda-Mabes;
- l) membangun sistem komunikasi perbatasan dan Pulau Terluar;
- m) pengembangan 110;

n) mengoptimalkan

- n) mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online single submission dalam penerbitan surat izin opsional BUJP;
 - o) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);
 - p) pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah.
- 2) peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan kerjasama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan prototype, berikut melakukan Standarisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;
 - b) menggunakan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) dalam setiap pelaksanaan Pengadaan Almatsus dan Alsus Polri.
- 3) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personil Polri;
 - b) melakukan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang dekat dengan kediaman/lingkungan Mako;
 - c) melanjutkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di Wilayah Perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan.
- 4) melanjutkan pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Melanjutkan

Melanjutkan pengembangan pembangunan laboratorium forensik beserta rumah dinas di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana di bidang penegakan hukum;

- 5) meningkatkan pengembangan Alamsus SCI;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Melengkapi peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini;

- 6) pembangunan dan penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;
- b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
- c) mengembangkan teknologi kepolisian berdasarkan hasil penelitian.

7. pengusulan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Polda Kaltim dan Polda penyangga dalam rangka pemindahan IKN;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mendatakan kebutuhan Sarpras Mabes Polri, Polda Kaltim dan Polda penyangga dalam rangka pendukung pemindahan Ibukota Negara;
- b) mengevaluasi kebutuhan Sarpras yang utama pada Polda Kaltim dan Polda penyangga;
- c) Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024 termasuk kebutuhan di Ibu Kota Negara baru.

f) Arah

f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik”**, yaitu:

- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu;
 - b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online;
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
 - d) pemasangan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan Publik;
- 2) penguatan Saber pungli;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan sinergitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli;
 - b) membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara Satgas dan UPP;
 - c) Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah pungli;
 - d) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;
 - e) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, SESPIMA, SESPIMMEN/PKN Tingkat 2, SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN Tingkat 1;
 - f) pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan Publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK);
 - g) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri.

3) pencegahan

- 3) pencegahan Korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;
 - b) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
 - c) sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengembangkan aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran Polri;
 - b) meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker sehingga lebih efektif dan efisien;
 - c) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) guna mensinkronkan pembangunan di Polri agar semakin berkualitas;
 - d) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tatakelola keuangan tingkat Satker;
 - e) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;
 - f) melaksanakan

- f) melaksanakan Analisa dan Evaluasi Kinerja dan anggaran baik di bidang Pembinaan dan Operasional.
- 5) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan);
 - b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;
 - c) melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri.
- 6) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh jajaran Polri untuk mempedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat;
 - b) melanjutkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/Polrestabes dan Polres Metro, agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri;
 - c) melakukan

- c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;
- d) mempertahankan capaian satker/satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian satker/satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
- e) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan satker Polda;

2. Kebijakan Polda Sultra Tahun 2022.

- a. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat”**, yaitu :

- 1) penguatan peran Polda Sultra dalam menjaga keamanan Sulawesi Tenggara melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) memetakan potensi aksi radikal, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
 - c) melaksanakan manajemen operasi Intelkam.
- 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
 - b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi;

c) penggalangan

- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta Kerjasama dengan instansi terkait untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal;
 - d) menguatkan deteksi aksi secara berkesinambungan dan mengantisipasi konflik sektarian yang berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;
 - e) meningkatkan patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kelompok teroris;
 - f) meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama garis keras yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
 - g) melaksanakan kerjasama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi terhadap mantan narapidana;
 - h) menetralsir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas;
 - i) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
 - j) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan Kriminalitas;
 - k) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan;
 - l) meningkatkan kegiatan Patroli dan pengamanan di tempat Obvit/ Obvitnas dan tempat pariwisata.
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan “pemolisian prediktif” serta dukungan Polri dalam penanganan Covid-19;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP;
 - b) peningkatan

- b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
 - c) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP;
 - d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas.
- 4) penanganan konflik secara humanis;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akandilakukan:
- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
 - b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis.
- 5) meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam rawan serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akandilakukan:
- a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli lintas;
 - b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/ Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas.
- 6) meningkatkan peran aktif Polri diwilayah rawan bencana;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) personel Brimob Polda Sultra yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah;
 - b) menyelenggarakan

- b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan satwa;
 - c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
 - d) bersama instansi terkait bekerjasama dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan bencana.
- 7) penyelenggaraan operasional kewilayahan personel Polda Sultra dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional serta gangguan kelompok kriminal bersenjata;
 untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan dan mengkoordinasikan Kontijensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, dan bencana;
 - b) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi;
 - c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan Sulawesi Tenggara yang kondusif;
 - d) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat;
 - e) tergelarnya personel dikawasan obvitnas dan objek tertentu;
 - f) melaksanakan kegiatan pelayanan pelacakan dan penangkalan;
 - g) memperkuat Binmas dengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas.
- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“mengoptimalkan pelayanan publik Polda Sultra”** yaitu :
 - 1) mengusulkan pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melakukan inventarisasi kondisi riil sarana prasarana atas pelayanan publik yang berbasis TIK;
 - b) melakukan

- b) melakukan evaluasi atas sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK.
- 2) peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pelayanan surat ijin operasional BUJP melalui pelayanan satu pintu;
 - b) menyusun standar operasional prosedur untuk pelayanan PNPB fungsi Binmas;
 - c) melaksanakan pelatihan revolusi mental;
 - d) mengusulkan pembangunan Satpas Prototipe.
- 3) keterpaduan dalam pengelolaan ruang SPKT dan RPK yang humanis serta berbasis TIK. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan kualitas dan kualitas SDM sebagai awak SPKT, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
 - b) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan secara *online* dengan mitra penyedia layanan rujukan dalam rangka penanganan perempuan dan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;
 - c) mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan dengan UPPA mulai tingkat Polda sampai dengan tingkat Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - d) membuat media edukasi/sosialisasi secara interaktif mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan melibatkan ahli/konsultan;
 - e) melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang SPKT dan RPK;
 - f) pengembangan SPKT berbasis TIK;
 - g) mengusulkan pembangunan gedung pelayanan publik Polda Sultra.

4) mengoptimalkan

- 4) mengoptimalkan *quick response* kepolisian sesuai standar operasional prosedur. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan tindak kejahatan.
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik**” yaitu :
 - 1) peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) peningkatan koordinasi antar penyidik;
 - b) mengintensifkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan *siber* termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marjinal;
 - c) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*crime scene investigation*);
 - d) pemantauan, pemetaan kelompok radikal dan intoleransi;
 - e) peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran gelap Narkoba.
 - 2) peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyiapkan personel untuk mengikuti sertifikasi penyidik;
 - b) mengajukan sertifikasi penyidik kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri;
 - c) menyiapkan anggaran sertifikasi penyidik.
 - 3) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit, pemerasan dan makelar kasus. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan

- a) meningkatkan pengawasan penyidik;
 - b) memberikan saran masukan usulan revisi Perkap tentang manajemen penyidikan.
- 4) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminalitas. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar satuan fungsi internal Polda Sultra;
 - b) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar penegak hukum;
 - c) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP.
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“meningkatkan profesionalisme personel Polda Sultra”** yaitu :
- 1) mengoptimalkan penggunaan aplikasi analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan struktur organisasi tingkat Polres dan Polsek. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban kerja dan SIK3 pada Satfung Mapolda Sultra dan Polres jajaran;
 - b) melaksanakan pengkajian klasifikasi kesatuan kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja.
 - 2) meningkatkan profesionalisme panitia dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi Dikbangum, Dikbangspes, pembinaan karier dan pelatihan sesuai kompetensi dan kebutuhan. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) menyelenggarakan rekrutmen, seleksi Dikbang/Dikbangspes pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan aplikasi secara *online*;
 - b) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel secara *merit sistem*;
 - c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* dalam seleksi Dikbangum dan pembinaan karir personel;
 - d) menyelenggarakan

- d) menyelenggarakan pelatihan fungsi guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan;
 - e) mewajibkan setiap personel yang telah mengikuti pendidikan kejuruan dan pelatihan fungsi untuk mentransfer ilmunya kepada persnel yang belum mengikuti pendidikan kejuruan maupun pelatihan fungsi;
 - f) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
 - g) menyelenggarakan klasifikasi dan *mapping* psikologi sebagai dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel.
- 3) peningkatan pelaksanaan tatakelola *e-government* melalui *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement*. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan kesejahteraan operator;
 - b) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement*;
 - c) penyusunan *Blueprint* Teknologi Informasi (*Assessment*, inventarisasi dan standarisasi).
- 4) pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja *online*. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan *update* data SIPP sebagai dasar pengisian SMK *Online*;
 - b) meningkatkan prosentase pengisian SMK *online* sebagai dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel;
 - c) pengembangan peralatan SIPP untuk mendukung terlaksananya pengisian SMK *online*.
- 5) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi personel Polda Sultra. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengusulkan peningkatan poliklinik menjadi rumah sakit;
 - b) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel Biddokkes Polda Sultra.

e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“mengusulkan penambahan Alpalkam dan Almatsus sesuai karakteristik wilayah Sulawesi Tenggara”** yaitu :

- 1) mengusulkan pemenuhan kebutuhan minimum Alpalkam dan Almatsus. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengusulkan pemenuhan Almatsus berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional Satbrimob Polda Sultra dalam rangka pengamanan unjuk rasa dan konflik sosial;
 - b) mengusulkan pemenuhan Almatsus Lidik Sidik yang berbasis teknologi dan komunikasi yang modern dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana;
 - c) mewujudkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel;
 - d) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda Sultra;
 - e) melakukan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Sultra (minimal dan maksimal).
- 2) pengusulan pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polda Sultra serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melakukan inventarisasi kondisi riil atas fasilitas perkantoran dan Rumdin;
 - b) melakukan pemetaan skala prioritas terhadap rencana pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin;
 - c) menyusun Renbut fasilitas perkantoran dan Rumdin;
 - d) mengusulkan pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin secara selektif prioritas dan berkelanjutan.
- c) evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polda Sultra. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) melakukan

- a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda Sultra;
 - d) menyusun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polda Sultra.
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik”** yaitu :
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) monitoring penanganan pengaduan masyarakat;
 - b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;
 - c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
 - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
 - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar.
 - 2) penguatan Saber Pungli. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan Mapolda Sultra;
 - b) mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli yang membajak program pemerintah.
 - 3) pencegahan korupsi di internal Polda Sultra. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pelaksanaan

- a) pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota Polri dan PNS Polri;
 - b) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian.
- 4) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan;
 - b) penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan;
 - c) penguatan organisasi tingkat kewilayahan.
- 5) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengusulkan penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b) melaksanakan pengukuran kinerja Polda Sultra dengan Indeks Tata Kelola;
 - c) sosialisasi kebijakan forum komunikasi publik;
 - d) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
 - e) sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik.

BAB IV
 PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

1. Program dan kegiatan Polda Sultra.

a. Program Profesionalisme SDM Polri.

1) tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.BD	PROGRAM PROFESIONALISME SDM POLRI			
3096	Dukungan manajemen profesionalisme SDM Polri			
001	Gaji dan tunjangan			
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			
	a. Gaji dan tunjangan	1	THN	12,244,306,000
	b. Uang lembur PNS			
	1. Gol II	1,200	OJ	20,400,000
	2. uang makan Gol II	1,080	OJ	37,800,000
	3. Gol III	1,920	OH	38,400,000
	4. uang makan Gol III	960	OH	35,520,000
	5. Gol IV	240	OH	6,000,000
	6. uang makan Gol IV	120	OH	4,920,000
	c. uang lembur PNS pada hari libur			
	1. Gol II	192	OJ	6,528,000
	2. uang makan Gol II	48	OH	1,680,000
	3. Gol III	768	OJ	30,720,000
	4. uang makan Gol III	192	OH	7,104,000
	d. uang makan lembur Polri			
	1. uang makan Gol II	3,600	OH	126,000,000
	2. uang makan Gol III	2,280	OH	84,360,000
	3. uang makan Gol IV	2,160	OH	88,560,000
002	Operasional dan pemeliharaan kantor			
BW	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor			
	ATK rutin Satker	1	THN	167,200,000
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
E	Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja			
	a. rapat Sun Ranrenja Satker T.A. 2023	2	GIAT	3,600,000
	b. rapat Sun Renja Satker T.A. 2023	2	GIAT	3,600,000
	c. rapat Sun kebutuhan anggaran Satker 2023	1	GIAT	2,000,000
	d. rapat Sun Rengiat dan Rendisgar Satker T.A. 2022	1	GIAT	2,000,000
	e. rapat Sun pagu indikatif Satker T.A. 2023	1	GIAT	2,000,000
	f. rapat Sun TOR dan RAB pagu alokasi anggaran Satker T.A. 2023	1	GIAT	2,000,000
	g. rapat Sun renprogar Satker T.A. 2022	1	GIAT	2,840,000
	h. giat KPPN kendari			

i. uang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	i. uang harian ke KPPN dalam rangka konsultasi	12	OG	1,320,000
	j. uang harian pengajuan SPM	36	OG	3,960,000
	k. giat revisi anggaran Kanwil DJA			
	l. uang harian pengajuan revisi anggaran Kanwil DJA	8	OG	880,000
G	Penyusunan evaluasi LKIP			
	Sun LKIP Satker T.A. 2022	2	GIAT	3,838,000
Y	Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang			
	pengepakan dan pengiriman surat	152	KG	3,040,000
BU	Evaluasi laporan kegiatan			
	rapat evaluasi penyerapan anggaran dan kinerja	1	GIAT	7,800,000
BV	Supervisi			
	Dukgiat supervisi	1	PKT	20,000,000
DX	Peningkatan kemampuan personel Satker			
	a. Katpuan kepemimpinan dan kepribadian Polwan	240	OH	48,000,000
	jajaran Polda Sultra			
	b. dukungan ATK kegiatan	1	GIAT	2,000,000
DY	Kegiatan pembinaan			
	kegiatan pembinaan PNS Polda Sultra	2	GIAT	53,456,000
FW	Dukopsnal Polda			
	dukungan operassional Satker	1	PKT	153,910,000
FS	Dukungan opsional Satker			
	Dukopsnal Satker	2	PKT	652,000,000
FY	ULP non organik / jaga fungsi			
	jaga piket	2,928	OH	184,464,000
GO	Pembinaan fungsi-fungsi			
	pembinaan fungsi	1	PKT	248,129,000
JZ	honorarium sai/Sakpa/simak/smap/pengelola keuangan			
	a. honor operator Simak-BMN			
	- staf kegiatan	24	OB	3,600,000
	b. honor operator SAI dan Sakpa			
	- staf kegiatan	24	OB	3,600,000
	c. honor operator e Monev			
	- staf kegiatan	24	OB	5,400,000
	d. honor operator Sirena			
	- staf kegiatan	24	OB	7,200,000
TV	Penyusunan perjanjian kinerja			
	Sun perjanjian kinerja Satker T.A. 2022	2	GIAT	2,264,000
3100	Penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
VO	Kegiatan 6 prioritas Polri			
	a. pelatihan fungsi Sabhara			
	1. ULP Latfung	300	OH	14,400,000
	2. Opslat Latfung	150	OH	5,385,000
	3. transportasi kembali ke Polda	25	ORG	6,250,000
	4. Sun bijak	25	ORG	120,000
	5. honor Latfung	60	JP	6,000,000
	b. pelatihan fungsi Binmas			
	1. ULP Latfung	150	OH	12,300,000
	2. ULP Latfung	150	OH	2,100,000
	3. Opslat Latfung	150	OH	5,385,000
	4. transportasi kembali ke Polda	25	ORG	6,250,000
	5. Sun bijak	25	ORG	120,000
	6. honor Latfung	60	JP	6,000,000
	c. pelatihan Brimob			
	1. ULP Latfung	150	OH	12,300,000
	2. ULP Latfung	150	OH	2,100,000
	3. Opslat Latfung	150	OH	5,385,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	4. transportasi kembali ke Polda	25	ORG	6,250,000
	5. Sun Bijak	25	ORG	120,000
	6. honor Latfung	60	JP	6,000,000
3105	Peyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
DQ	Pelatihan			
	pembekalan pelatihan keterampilan	58	ORG	55,100,000
KH	Pembinaan tradisi Polri			
	a. Wisuda Purna Bhakti	1	GIAT	75,000,000
	b. pembinaan personel Polri guna penanggulangan dan pencegahan radikalisme dan intoleransi	1	GIAT	50,000,000
3108	Pembinaan karier personel Polri			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
DW	Pembinaan administrasi kepegawaian			
	Adm kepangkatan	1	GIAT	25,000,000
DX	Peningkatan kemampuan personel Satker			
	a. post assesment	1	GIAT	65,000,000
	b. talent bintang Polri	1	GIAT	40,000,000
3110	Pelayanan psikologi anggota Polri			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
KO	Pelayanan psikotest			
	pelayanan pendamping psikologi dan pegawai negeri pada Polri	1	GIAT	25,000,000
LT	Pelayanan konseling			
	a. pelayanan konseling psikologi berkala	144	ORG	36,000,000
	b. pelayanan profil klinis kepolisian	288	ORG	72,000,000
	c. mapping psikologi dan test psikologi pemegang Senpi	300	ORG	45,000,000

b. program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

1) tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.BI	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA			
3137	dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana			
001	Gaji dan tunjangan			
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			
	a. gaji dan tunjangan	1	THN	34,302,704,000
	b. uang makan dan uang lembur PNS			
	1. uang makan Gol II	432	OH	15,120,000
	2. uang lembur Gol II	864	OJ	14,688,000
	3. uang makan Gol III	576	OH	21,312,000
	4. uang lembur Gol III	1,152	OJ	23,040,000
	5. uang makan Gol IV	210	OH	8,610,000

6. uang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	6. uang lembur Gol IV	420	OJ	10,500,000
	c. lembur PNS diluar hari kantor/hari libur			
	1. uang makan Gol II	48	OH	1,680,000
	2. uang lembur Gol II	192	OJ	6,528,000
	3. uang makan Gol III	120	OH	4,440,000
	4. uang lembur Gol III	672	OJ	26,880,000
	5. uang makan Gol IV	48	OH	1,968,000
	6. uang lembur Gol IV	288	OJ	14,400,000
	d. lembur Polri			
	1. uang makan Gol IV	240	OH	9,840,000
	2. uang makan lembur Polri Pama / Gol III	840	OH	31,080,000
	3. uang makan lembur Polri Bintara / Gol II	3,600	OH	126,000,000
002	operasional dan pemeliharaan kantor			
BW	pengadaan peralatan/perlengkapan kantor			
	ATK rutin Satker	3	SATKER	375,440,000
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
E	Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja			
	a. penyusunan rancangan Renja Satker T.A. 2023	3	GIAT	3,736,000
	b. penyusunan rencana kerja Satker T.A. 2023	3	GIAT	3,736,000
	c. penyusunan kebutuhan anggaran T.A. 2023	2	GIAT	3,236,000
	d. penyusunan laporan keuangan T.A. 2022	1	GIAT	1,440,000
	e. penyusunan pagu usulan Satker T.A. 2022	1	GIAT	1,736,000
	f. penyusunan pagu indikatif Satker T.A. 2022	1	GIAT	1,736,000
G	Penyusunan evaluasi LKIP			
	penyusunan LKIP T.A. 2022	3	GIAT	3,860,000
I	Penyusunan naskah buku lainnya			
	penyusunan laporan tutup buku semester I dan II tahun 2021	2	GIAT	2,000,000
Y	Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang			
	pengepakan/pengiriman surat / kawat	826	KG	16,495,000
BV	Supervisi			
	supervisi	2	GIAT	36,060,000
FS	Dukungan operasional Satker			
	Dukopsnal Satker	3	SATKER	399,229,000
FY	ULP non organik / jaga fungsi			
	jaga piket	6,205	OH	390,915,000
GO	Pembinaan fungsi-fungsi			
	a. kegiatan sosialisasi	1	GIAT	10,212,000
	b. kegiatan Anev tahunan	1	GIAT	10,712,000
	c. Giat Binopsnal	1	GIAT	15,304,000
	d. Rakernis	1	GIAT	11,040,000
HI	Kerjasama, pembinaan dan pengawasan teknis penyelidikan			
	a. kerjasama penyelidikan	1	GIAT	21,298,000
	b. pembinaan dan pengawasan teknik penyelidikan	1	GIAT	17,698,000
JZ	Honorarium SAI/Sakpa/Simak/Smapi/pengelola keuangan			
	a. honor operator Simak-BMN			
	staf kegiatan	36	OB	5,400,000
	b. honor operator Sakpa			
	staf kegiatan	36	OB	5,400,000
	c. honor operator e-Monev			
	staf kegiatan	36	OB	10,800,000
	d. honor operator Sirena			
	staf kegiatan	36	OB	10,800,000
	e. honor pengelola keuangan			
	1. kuasa pengguna anggaran	12	OB	27,360,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	2. pejabat pembuat komitmen	12	OB	9,600,000
	3. PPSPM	12	OB	9,600,000
	4. Bendahara pengeluaran	12	OB	8,400,000
	5. staf pengelola keuangan	24	OB	9,600,000
TV	Penyusunan perjanjian kinerja dan Ren aksi			
	penyusunan perjanjian kinerja dan Ren aksi T.A. 2022:	3	Satker	3,736,000
3142	Penindakan tindak pidana umum			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
HB	Pengadaan bahan makanan dan pemeliharaan tahanan			
	a. makan tahanan	30,039	OH	1,081,404,000
	b. perawatan tahanan	30,039	OH	150,195,000
HC	Pengadaan bahan makanan dan pemeliharaan tahanan (Polres)			
	a. makan tahanan	32,812	OH	1,181,232,000
	b. perawatan tahanan	32,917	OH	131,060,000
HD	pengadaan bahan makanan dan pemeliharaan tahanan (Polsek)			
	makan tahanan	17,461	OH	628,386,000
	perawatan tahanan	16,665	OH	83,301,000
HH	pembinaan operasional lidik sidik tindak pidana			
	a. penyusunan dokumen Anev lidik sidik tindak pidana	1	GIAT	67,680,000
	b. Giat penginputan e-manajemen penyidikan	1	GIAT	52,080,000
HI	kerjasama, pembinaan dan pengawasan teknis penyelidikan			
	melaksanakan kerjasama dan Binwas teknis penyelidikan	13	GIAT	50,322,000
HK	Tindak pidana umum			
	a. perkara sangat sulit	34	KSS	1,071,238,000
	b. perkara sulit	56	KSS	1,421,321,000
	c. perkara sedang	70	KSS	861,756,000
	d. perkara mudah	2	KSS	15,172,000
HL	Tindak pidana umum (Polres)			
	a. biaya lidik sidik tindak pidana (Satreskrim)			
	1. perkara sulit	117	KSS	2,224,569,000
	2. perkara sedang	293	KSS	3,195,608,000
	3. perkara mudah	443	KSS	2,849,118,000
	b. biaya lidik sidik tindak pidana (Satpolairud)			
	1. perkara sulit	5	KSS	92,692,000
	2. perkara sedang	4	KSS	37,200,000
	c. Satsabhara			
	penegakan hukum tindak pidana ringan	66	KSS	13,860,000
HM	Tindak pidana umum (Polsek)			
	a. perkara sedang	350	KSS	3,421,236,000
	b. perkara mudah	776	KSS	4,359,271,000
	c. penegakan hukum tindak pidana ringan unit Sabhara	134	KSS	28,140,000
HQ	Tindak pidana tertentu			
	perkara sulit	4	KSS	108,100,000
HR	Tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak			
	a. perkara sulit	2	KSS	54,050,000
	b. perkara sedang	19	KSS	239,074,000
	c. perkara mudah	127	KSS	795,736,000
HT	Pengawasan penyidikan			
	asistensi dan supervisi penanganan kasus	1	GIAT	113,096,000
UA	Visum luar			
	visum luar	79	KSS	23,700,000
US	anggaran WBK WBBM			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	a. kegiatan sulit	10	KSS	150,000,000
	b. kegiatan sedang	56	KSS	520,800,000
	c. perkara mudah	1	KSS	4,837,000
VI	Tindak pidana ringan			
	a. penegakan hukum tindak pidana ringan (Satsabhara Polres)	114	KSS	119,070,000
	b. penegakan hukum tindak pidana ringan Polsek (Unitsabhara Polsek)	137	KSS	28,770,000
3144	Penindakan tindak pidana Narkoba			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
GN	pembinaan keamanan			
	kegiatan rasia Narkoba			
	a. personel Ditresnarkoba	720	OG	108,000,000
	b. laporan	16	BUKU	128,000
	c. ATK pendukung			
	ATK kegiatan	1	THN	2,584,000
HN	Tindak pidana Narkoba			
	a. penyelidikan kasus Narkoba	253	KSS	6,217,100,000
	b. penyidikan kasus Narkoba	231	KSS	4,496,152,000
	c. pengembangan kasus Narkoba	20	KSS	900,424,000
IB	Penyuluhan hukum			
	kampanye langsung / penyuluhan Narkoba	1	PKT	158,321,000
3145	Penindakan tindak pidana ekonomi khusus			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
HO	Tindak pidana ekonomi khusus			
	a. tindak pidana indaksi			
	perkara sangat sulit	10	KSS	315,070,000
	b. tindak pidana Eksus			
	perkara sangat sulit	10	KSS	315,070,000
	c. Giat koordinasi dengan instansi terkait			
	kegiatan koordinasi dengan instansi terkait	1	GIAT	7,729,000
3146	Penindakan tindak pidana korupsi			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
HP	Tindak pidana korupsi			
	a. tindak pidana korupsi	21	KSS	4,069,568,000
	b. tambahan tindak pidana korupsi	1	KSS	100,623,000
3151	Penindakan tindak pidana siber			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
LN	Cyber Crime			
	TP cyber			
	perkara sangat sulit	44	KSS	1,386,308,000
4343	Penindakan tindak pidana laka lantas			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
GY	Penyelidikan dan penyidikan laka lantas di Polres			
	a. tabrak lari	53	KSS	138,936,000
	b. Laka ringan	271	KSS	81,922,000
	c. Laka tidak menonjol	62	KSS	87,116,000
	d. Laka ran bus / akap	10	KSS	67,920,000
	e. Laka R4 umum atau angkot	49	KSS	215,035,000
	f. Laka R4 umum atau taxi atau pribadi	63	KSS	259,449,000
	g. derek besar	10	KSS	5,000,000
	h. derek kecil	31	KSS	7,750,000
5082	Pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
HJ	Bantuan teknik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	a. fungsi identifikasi			
	bantek dalam lidik sidik	9	GIAT	40,707,000
	b. fungsi Labfor			
	pemeriksaan berat	7	GIAT	50,820,000
	c. coaching clinic fungsi identifikasi	1	PKT	20,659,000
5083	Penindakan tindak pidana tertentu			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
HQ	tindak pidana tertentu			
	kegiatan sangat sulit	20	KSS	630,140,000
5086	Pengawasan penyidikan			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
HT	Pengawasan penyidikan			
	a. kegiatan gelar perkara pemeriksaan awal	2	PKT	142,948,000
	b. supervisi dan asistensi	2	PKT	49,650,000
	c. pengawasan penyidikan	51	GIAT	50,000,000

c. Program Modernisasi Almates dan Sarana Prasarana Polri.

1) tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almates dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.BP	PROGRAM MODERNISASI ALMATES DAN SARANA PRASARANA POLRI			
3084	Pengembangan peralatan Polri			
065	Peralatan kesehatan			
QW	Pengadaan Alkes			
	Bed pasien 2 crank	10	UNIT	305,740,000
069	Peralatan kantor			
QX	pengadaan non Alkes			
	pengadaan alat non Alkes			
	a. komputer aio	15	UNIT	150,000,000
	b. AC 1 PK	12	UNIT	72,000,000
	c. printer	15	UNIT	37,500,000
	d. dispenser air	10	UNIT	25,000,000
	e. CCTV	1	UNIT	9,760,000
5059	Dukungan manajemen dan teknik Sarpras			
001	Gaji dan tunjangan			
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			
	a. gaji dan tunjangan	1	THN	3,058,356,000
	b. lembur PNS pada hari kerja			
	1. Gol II	480	OJ	8,160,000
	2. uang makan	120	OH	4,200,000
	c. uang lembur PNS			
	1. Gol II	1,200	OJ	20,400,000
	2. uang makan Gol II	600	OH	21,000,000

3. Gol

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	3. Gol III	480	OJ	9,600,000
	4. uang makan III	240	OH	8,880,000
	5. Gol IV	240	OJ	6,000,000
	6. uang makan IV	120	OH	4,920,000
	d. uang makan lembur Polri			
	1. uang makan Gol II	1,080	OH	37,800,000
	2. uang makan Gol III	360	OH	13,320,000
002	operasional dan pemeliharaan kantor			
AO	pemeliharaan gedung negara			
	a. Honor pengelola kegiatan			
	1. kuasa pengguna anggaran	6	OB	5,820,000
	2. pejabat pembuat komitmen	6	OB	5,640,000
	3. Bendahara pengeluaran	6	OB	4,020,000
	4. staf Bendahara pengeluaran	12	OB	6,000,000
	5. Bendahara pengeluaran	6	OB	4,020,000
	6. panitia pengadaan barang dan jasa	3	OP	2,730,000
	7. panitia penerimaan hasil pekerjaan	3	OP	2,310,000
	b. Pemeliharaan gedung			
	1. perawatan gudang Senpi Polda Sultra	200	M2/T	25,000,000
	2. perawatan gudang amunisi Polda Sultra	200	M2/T	25,000,000
	3. perawatan gedung kantor SPBP Polda Sultra (SPBP lama)	70	M2/T	8,750,000
	4. perawatan gedung kantor SPBP Polda Sultra (SPBP baru)	130	M2/T	16,250,000
	5. pemeliharaan gedung utama	5,078	M2/TH	1,000,366,000
	6. pemeliharaan halaman 20000	20,000	M2/TH	200,000,000
	7. pemeliharaan gedung Reskrimum	864	M2/TH	170,208,000
	8. pemeliharaan gedung Reskrimsus / ruang tahanan	864	M2/TH	170,208,000
	9. pemeliharaan gedung Ditlantas	864	M2/TH	170,208,000
	10. pemeliharaan gedung Ditresnarkoba / Ditsabhara	864	M2/TH	170,208,000
	11. pemeliharaan kantor PJR	170	M2/TH	24,480,000
	12. pemeliharaan gudang arsip Lantas	200	M2/TH	28,800,000
	13. pemeliharaan gedung barak Dalmas I	360	M2/TH	51,840,000
	14. pemeliharaan gedung barak Dalmas II	360	M2/TH	51,840,000
	15. pemeliharaan pos jaga Provost	90	M2/TH	12,960,000
	16. pemeliharaan gedung hanggar	195	M2/TH	28,080,000
	17. pemeliharaan gedung penjagaan masuk	70	M2/TH	10,080,000
	18. pemeliharaan Rujab Kapolda Sultra	450	M2/TH	64,800,000
	19. har gedung kantor Rumkit	1,500	M2/TH	172,500,000
	20. har halaman kantor Rumkit	200	M2/TH	2,129,000
	c. pemeliharaan gedung Kantor Satbrimob			
	1. Har gedung kantor utama	1,100	M2	188,100,000
	2. Har barak bujang	930	M2	116,250,000
	3. Har gedung kantor Gegana	200	M2	25,000,000
	4. Har bangunan lapangan tembak	250	M2	31,250,000
	5. Har gudang logistik	200	M2	25,000,000
	6. Har gedung garasi EOD jibom	40	M2	5,000,000
	7. Har ruang makan	80	M2	10,000,000
	8. Har poliklinik	96	M2	12,000,000
	9. Har kantor Provos	50	M2	6,250,000
	10. Har pos penjagaan gerbang	84	M2	10,500,000
	11. Har tower latihan SAR dan mountaineering	1	THN	25,670,000
	12. Har taman dan halaman kantor	3,665	M2	36,650,000
	d. Kompi 1 Yon C Pelopor Totallang			
	1. Harwat gedung kantor Kompi	420	M2	52,500,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	2. Harwat halaman kantor Kompi	1,323	M2	13,230,000
	e. Batalyon B Pelopor Batauga			
	1. Harwat gedung kantor Batalyon	500	M2	85,500,000
	2. Harwat halaman kantor Batalyon	1,500	M2	15,000,000
	f. Ditpolair			
	1. Har gedung Ditpolairud	483	M2	60,375,000
	2. Har halaman dan taman Ditpolairud	2,500	M2	25,000,000
	g. perawatan gedung canel Satwa k-9	160	M2	20,000,000
	h. SPN Polda Sultra			
	1. Har gedung kantor SPN	4,870	M2	560,050,000
	2. Har halaman dan taman SPN	4,537	M2	45,370,000
	i. Biddokkes			
	1. Har gedung kantor Biddokkes	420	M2	48,300,000
	2. Har halaman kantor Biddokkes	170	M2	1,700,000
	3. Har gedung kantor (PNBP)	1,378	M2	158,470,000
	4. Har halaman kantor (PNBP)	351	M2	3,510,000
	5. Har tambahan halaman kantor	2	M2	20,000
AP	Pemeliharaan gedung kantor Polres			
	a. honor pejabat pembuat komitmen	1	OB	700,000
	b. administrasi pengadaan	1	GIAT	100,000
	c. biaya pengadaan			
	1. honor pejabat pengadaan	1	OB	450,000
	2. honor panitia penerima hasil pekerjaan	3	OB	750,000
	d. Har gedung kantor	11,107	M2/T	1,327,555,000
	e. Har halaman	14,049	M2/T	140,489,000
AQ	pemeliharaan gedung kantor Polsek			
	a. Har gedung kantor	14,598	M2/T	1,686,770,000
	b. Har halaman kantor	21,083	M2/T	210,830,000
AX	Pemeliharaan alat angkutan air			
	a. honor pejabat pembuat komitmen	1	OB	700,000
	b. administrasi pengadaan	1	GIAT	100,000
	c. biaya pengadaan			
	1. honor pejabat pengadaan	1	OB	450,000
	2. honor panitia penerima hasil pekerjaan	3	OB	750,000
	d. perawatan kapal patroli C2 Satpolair	2	UNIT	230,015,000
	e. kapal patroli C3	1	UNIT	79,553,000
	f. perawatan speed boat Bhabin kamtibmas	9	UNIT	180,110,000
AV	pemeliharaan kendaraan khusus			
	a. Har Rantis AWC	3	UNIT	80,000,000
	b. Har Rantis SAR	1	UNIT	25,000,000
	c. Har Rantis APC	2	UNIT	50,000,000
	d. Har Rantis EOD	3	UNIT	60,000,000
	e. Har Rantis sound system	1	UNIT	20,000,000
	f. Har Rantis PHH (public address)	1	UNIT	20,000,000
	g. Har Rantis KBR	2	UNIT	40,000,000
	h. Har Rantis water treatment	1	UNIT	23,000,000
	i. Har Rantis repeater	1	UNIT	20,000,000
	j. paket data kendaraan Alsus reserse	8	UNIT	46,240,000
	k. pemeliharaan peralatan kendaraan taktis (komando)	1	UNIT	30,750,000
	l. pemeliharaan kendaraan taktis penindakan	1	UNIT	18,994,000
	m. pemeliharaan kendaraan khusus Intelkam beserta kelengkapannya	3	UNIT	19,000,000
AX	Pemeliharaan alat angkutan air			
	a. pejabat pengadaan	12	OB	6,000,000
	b. panitia pengadaan barang dan jasa	5	OB	4,000,000
	c. Har kapal patroli klas C2			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	1. Har kapal patroli klas C2 mesin luar	8	UNIT	957,688,000
	2. Har kapal patroli klas C2 mesin dalam	2	UNIT	571,394,000
	D. Har rubber boat			
	1. perahu karet mesin tempel	10	UNIT	52,000,000
	2. Har Rigid Inflatable Boat (RIB)	3	UNIT	15,000,000
	3. Har speed boot Bhabinkamtibmas	2	UNIT	40,480,000
AY	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10			
	a. Har roda 4	121	UNIT	3,233,967,000
	b. Har Ran roda 6 (bus VIP)	2	UNIT	74,274,000
	c. Har Ranmor roda 6	39	UNIT	1,029,919,000
	d. honor pejabat pembuat komitmen	12	OB	14,520,000
	e. honor pejabat pengadaan	12	OB	8,160,000
AZ	pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10 (Polres)			
	a. honor pejabat pembuat komitmen	1	OB	700,000
	b. administrasi pengadaan	1	OB	100,000
	c. biaya pengadaan			
	1. honor pejabat pengadaan	1	OB	450,000
	2. honor panitia penerima hasil pekerjaan	3	OB	750,000
	d. Har ranmor roda 4	98	UNIT	1,951,217,000
	e. Har ranmor roda 6	71	UNIT	1,660,590,000
BA	pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10 (Polsek)			
	Har Ranmor roda 4	64	UNIT	637,250,000
BB	pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2			
	Har roda 2	300	UNIT	967,330,000
BC	pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (Polres)			
	a. honor pejabat pembuat komitmen	1	OB	700,000
	b. administrasi pengadaan	1	OB	100,000
	c. biaya pengadaan			
	1. honor pejabat pengadaan	1	OB	450,000
	2. honor panitia penerima hasil pekerjaan	3	OB	750,000
	d. Har Ranmor roda 2	578	UNIT	1,225,000,000
	e. Har Ranmor roda 2 Bhabinkamtibmas	240	UNIT	489,500,000
BD	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (Polsek)			
	a. Har Ranmor roda 2	362	UNIT	691,000,000
	b. Har Ranmor roda 2 Bhabinkamtibmas	377	UNIT	754,000,000
BI	pemeliharaan peralatan fungsional			
	a. pejabat kuasa pengguna anggaran	12	OB	21,600,000
	b. pejabat pembuat komitmen	12	OB	12,000,000
	c. Bendahara pengeluaran	12	OB	12,000,000
	d. staf Bendahara pengeluaran	36	OB	25,200,000
	e. kegiatan pencelaan Senpi			
	1. kegiatan rapat dalam rangka pencelaan Senpi	1	PKT	2,400,000
	2. sewa kargo dalam rangka pencelaan Senpi	2	KALI	4,900,000
	3. perjalanan dinas dalam rangka pencelaan Senpi	1	PKT	42,700,000
	4. color photo printer	1	UNIT	363,000
	5. har kamera tustel	8	UNIT	8,000,000
	f. perawatan peralatan fungsional			
	1. Har fotocopy	8	UNIT	42,914,000
	2. Har printer scanner	25	UNIT	7,106,000
	3. Har AC	154	UNIT	83,131,000
	4. Har printer	319	UNIT	195,575,000
	5. Har komputer	447	UNIT	277,252,000
	6. Har laptop	68	UNIT	49,240,000
	7. Har kamera	24	UNIT	16,200,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	8. Har alat inventaris kantor	217	UNIT	19,870,000
	9. Har HT	223	UNIT	150,010,000
	10. Har televisi	5	UNIT	6,250,000
	11. Har amplifair	3	UNIT	4,350,000
	12. Har LCD proyektor/infocus	16	UNIT	28,750,000
	13. Har handy cam	30	UNIT	36,355,000
	14. Har sgr filling recording yanduan	1	UNIT	1,500,000
	15. Har helm tempur	26	UNIT	6,500,000
	16. Har rompi anti peluru	20	UNIT	4,000,000
	17. Har radio link	1	UNIT	1,200,000
	18. Har helm provos	7	UNIT	700,000
	19. Har sound system	2	UNIT	500,000
	20. Har bandwitch management (microtik)	1	UNIT	9,350,000
	21. Har CCTVcamera	4	UNIT	10,924,000
	22. Har LCD display CCTV	1	UNIT	8,000,000
	23. Har swith HUB	4	UNIT	12,000,000
	24. Har server CCTV	1	UNIT	6,000,000
	25. video confrence	1	UNIT	8,000,000
	26. Har faxmili	1	UNIT	1,250,000
	27. Har kamera end point	1	UNIT	3,350,000
	28. Har audio system	2	UNIT	12,000,000
	29. Har display monitor	1	UNIT	2,000,000
	30. repeater mx 800	1	UNIT	14,500,000
	31. Har server dual prosesor	1	UNIT	10,762,000
	32. Har sony mini tape recorder	15	UNIT	1,500,000
	33. Har radio mobile digital trunking	1	UNIT	1,727,000
	34. Har server 2 procesor	1	UNIT	25,000,000
	35. Har jaringan video streaming command centre	1	UNIT	78,477,000
	36. Harwat gsm interceptor passive PI-2	1	UNIT	100,000,000
	37. Har peralatan selam	5	UNIT	5,000,000
	38. toa/megaphone	32	UNIT	2,720,000
	39. flash ball	23	UNIT	460,000
	40. mesin stationer bahan bakar MT-88 SPBP/jaringan BBM bensin	2	UNIT	8,222,000
	41. mesin stationer bahan bakar HSD SPBP/jaringan BBM solar	2	UNIT	8,222,000
	42. pompa air	2	UNIT	725,000
	43. tera ulang mesin stasioner bahan bakar	8	UNIT	12,120,000
	44. tabung pemadam kebakaran 350 CT	62	UNIT	46,750,000
	45. Har genset	7	UNIT	65,250,000
	46. Har generator besar	1	UNIT	15,757,000
	47. Har mesin pemotong rumput	4	UNIT	4,000,000
	g. Har peralatan RTMC			
	1. TV monitor	4	UNIT	4,000,000
	2. proyektor	2	UNIT	3,000,000
	3. soundsystem	1	UNIT	750,000
	4. Hardisk	12	UNIT	7,500,000
	5. komputer RTMC	3	UNIT	1,890,000
	6. ac ruang RTMC	4	UNIT	2,120,000
	7. sewa jaringan CCTV Stainless	12	BULAN	36,000,000
	8. sewa jaringan CCTV Pasar Baru	12	BULAN	36,000,000
	9. sewa jaringan CCTV Sinar Mas	12	BULAN	36,000,000
	10. sewa jaringan CCTV Tapak Kuda	12	BULAN	36,000,000
	11. sewa jaringan CCTV Mall Mandonga	12	BULAN	36,000,000
	12. sewa jaringan CCTV Bundaran Tank	12	BULAN	36,000,000
	13. sewa jaringan bandwith internet	12	BULAN	38,436,000
	h. perawatan Senpi			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	1. Senpi genggam/Senpi bahu	509	PUCUK	22,950,000
	2. senjata mesin ringan	1	PUCUK	7,697,000
	3. Har senapan otomatis	45	PUCUK	1,125,000
	4. Har senapan semi otomatis	40	PUCUK	1,000,000
	5. Har Senpi	73	PUCUK	2,482,000
	i. Harwat peralatan smart class			
	1. Harwat AC	4	UNIT	2,120,000
	2. Harwat komputer	6	UNIT	4,380,000
	3. Harwat printer	1	UNIT	690,000
	4. service camera video	2	UNIT	1,000,000
	5. service mic	2	UNIT	150,000
	6. service camera CCTV	3	UNIT	390,000
	7. service jaringan	1	SET	3,331,000
	j. pemeliharaan Alkes			
	1. timbangan badan	2	UNIT	1,000,000
	2. tensimeter	2	UNIT	500,000
	3. stetoskop	2	UNIT	500,000
	4. brancar	1	UNIT	750,000
	5. Har peralatan musik			
	6. bass dram	1	UT	2,400,000
	7. blira	1	UT	500,000
	8. snar dram	2	UT	1,600,000
	9. trompet	4	UT	3,200,000
	10. cymbal	1	PSG/T	775,000
	11. tenor dram	1	PSG/T	750,000
	k. pemeliharaan alat-alat RS. Bhayangkara			
	1. Har komputer	10	UNIT	5,000,000
	2. Har AC	35	UNIT	17,500,000
	3. Har genset	1	UNIT	6,000,000
	4. Har printer	10	UNIT	4,000,000
	5. hand talky (HT)	1	UNIT	500,000
	6. kulkas	10	UNIT	6,250,000
	7. mesin cuci	1	UNIT	500,000
	8. televisi	10	UNIT	5,000,000
	l. Har Alkes kalibrasi Alkes			
	1. mesin anastesi	1	UNIT	6,900,000
	2. lampu operasi	2	UNIT	9,000,000
	3. meja operasi	2	UNIT	19,000,000
	4. elektrik couter	1	UNIT	4,494,000
	5. sterilisator	4	UNIT	6,000,000
	6. monitor portable	1	UNIT	7,600,000
	7. bedside monitor	2	UNIT	14,000,000
	8. infus pump	2	UNIT	5,600,000
	9. syringe pump	2	UNIT	17,000,000
	10. centrifuge	1	UNIT	2,300,000
	11. ECG 12 chanel	1	UNIT	6,000,000
	12. ECG 3 chanel	1	UNIT	4,500,000
	13. tensimeter	16	UNIT	4,000,000
	14. timbangan bayi	8	UNIT	2,400,000
	15. stetoskop	13	UNIT	3,250,000
	16. timbangan badan	2	UNIT	1,000,000
	17. brancard	2	UNIT	1,500,000
	18. kursi dorong	1	UNIT	750,000
	19. nebulizer	3	UNIT	4,500,000
	20. suction pump	3	UNIT	7,500,000
	21. dental unit	1	UNIT	10,000,000
	22. mobile X-Ray	1	UNIT	35,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	23. dental X-Ray unit	1	UNIT	11,500,000
	24. automatic processing film	1	UNIT	10,000,000
	25. stand kaset	1	UNIT	2,500,000
	26. USG	1	UNIT	15,000,000
	27. baby incubator	1	UNIT	2,900,000
	28. lemari pendingin mayat	1	UNIT	15,000,000
	m. Seksi Logistik Satbrimob			
	1. Har sarana kantor			
	a) Har AC split	15	UNIT	9,150,000
	b) Har komputer	23	UNIT	16,100,000
	c) Har laptop	3	UNIT	2,100,000
	d) Har printer	23	UNIT	15,640,000
	2. Har Senpi			
	a) Senpi genggam	110	UNIT	5,500,000
	b) Senpi pinggang	24	UNIT	1,200,000
	c) Senpi panjang	700	UNIT	35,000,000
	d) Senpi mesin ringan	10	UNIT	1,050,000
	3. Har Alsus PHH			
	a) helm PHH	150	UNIT	7,500,000
	b) rompi PHH	150	UNIT	6,900,000
	c) gas masker	100	UNIT	5,000,000
	d) pemadam api	10	UNIT	5,000,000
	e) security barrier	3	UNIT	9,000,000
	4. Har alat proteksi			
	a) body vest level 4	100	UNIT	25,000,000
	b) ballistic helmet	100	UNIT	20,000,000
	5. Har Alsus SAR			
	a) baju selam	2	UNIT	460,000
	b) fins full foot	4	UNIT	208,000
	c) tabung selam	2	UNIT	500,000
	d) perahu karet	2	UNIT	6,000,000
	e) tali statis 200 meter	3	UNIT	1,800,000
	f) tali dynamic 50 meter	3	UNIT	750,000
	g) senter air	1	UNIT	210,000
	h) sarung tangan	16	UNIT	800,000
	i) regulator	2	UNIT	720,000
	j) motor tempel	2	UNIT	10,000,000
	k) power inflator	2	UNIT	1,000,000
	l) catridge coltri	4	UNIT	3,200,000
	m) module gauge compressor	2	UNIT	2,400,000
	n) oli nabati	4	UNIT	2,400,000
	6. Batalyon A Pelopor			
	a) Har alat proteksi			
	1) body vest level 4	60	UNIT	15,000,000
	2) ballistic helmet	60	UNIT	12,000,000
	b) Har Alsus PHH			
	1) tameng PHH transparan	150	UNIT	4,950,000
	2) tameng sekat	100	UNIT	7,700,000
	3) helm PHH	200	UNIT	10,000,000
	4) rompi PHH	200	UNIT	9,200,000
	5) gas masker	100	UNIT	5,000,000
	6) tongkat PHH	155	UNIT	155,000
	7) pemadam api	10	UNIT	5,000,000
	7. batalyon b pelopor			
	a) Har alat proteksi			
	1) body vest level 4	60	UNIT	15,000,000
	2) ballistic helmet	60	UNIT	12,000,000

b. Har

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	b. Har Alsus PHH			
	1) tameng PHH transparan	120	UNIT	3,960,000
	2) tameng sekat	75	UNIT	5,775,000
	3) helm PHH	170	UNIT	8,500,000
	4) rompi PHH	170	UNIT	7,820,000
	5) gas masker	100	UNIT	5,000,000
	6) tongkat PHH	132	UNIT	132,000
	7) pemadam api	10	UNIT	5,000,000
	8. detasemen gegana			
	a) Har Alsus wanteror			
	1) body vest level 4	70	UNIT	17,500,000
	2) ballistic helmet	70	UNIT	14,000,000
	3) teropongintai biasa	5	UNIT	2,500,000
	4) teropong malam	5	UNIT	2,500,000
	5) aimpoint sighting	10	UNIT	2,000,000
	6) senter tembak	10	UNIT	2,000,000
	7) senter biasa	10	UNIT	1,000,000
	b. Har Alsus Jibom			
	1) hand held metal detector	10	UNIT	3,500,000
	2) mine detector	3	UNIT	1,500,000
	3) demolition cable	3	UNIT	1,500,000
	4) blasting machine	3	UNIT	900,000
	5) explosive detector	1	UNIT	500,000
	6) hand held mirror	5	UNIT	1,500,000
	7) under vehicle mirror	3	UNIT	1,500,000
	8) bomb trailer	1	UNIT	2,000,000
	9) body armour	5	UNIT	2,500,000
	10) seek and search suit	2	UNIT	600,000
	11) dragon search light	6	UNIT	3,000,000
	12) flood light	3	UNIT	1,500,000
	13) X-Ray	3	UNIT	4,500,000
	14) robot vanguard	1	UNIT	2,000,000
	15) kamera DSLR canon	1	UNIT	450,000
	c. Har Alsus KBR			
	1) sarung tangan radiasi	10	UNIT	1,500,000
	2) sepatu anti radiasi	5	UNIT	1,500,000
	3) kacamata safety	10	UNIT	1,000,000
	4) thermometer	3	UNIT	120,000
	5) hazmat sked	1	UNIT	792,000
	6) clipboard-8	1	UNIT	24,000
	7) aim gas detector	1	UNIT	3,100,000
	8) bathroom scale	1	UNIT	207,000
	9) buckets 5 gallon	10	UNIT	200,000
	10) air compressor SCBA	1	UNIT	1,900,000
	11) radiation pager	2	UNIT	700,000
	12) radiation meter	2	UNIT	800,000
	13) reagent chemical detector 4 gas	1	UNIT	1,162,000
	14) smith detection LCD 3,3	1	UNIT	1,100,000
	15) kamera DSLR canon	1	UNIT	450,000
	9. Seksi TIK			
	a) HT motorolla SRX 2200	24	UNIT	8,400,000
	b) HT motorolla ATS 2500	60	UNIT	36,000,000
	c) batteray ht motorolla ATS 2500	30	UNIT	12,000,000
	d) mic wireless	2	UNIT	1,400,000
	e) handy cam	10	UNIT	5,000,000
	f) megaphone	3	UNIT	900,000
	g) power amplifier	2	UNIT	2,400,000

h) speaker

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	h) speaker	4	UNIT	2,400,000
	i) overhead projector	1	UNIT	1,000,000
	j) radio mobil (RIG)	2	UNIT	4,000,000
	10. Seksi Yanma			
	a) Har inventaris kantor	100	UNIT	8,000,000
	b) Har perlengkapan upacara, kebersihan dan piket jaga	1	UNIT	5,000,000
	c) Har jaringan air	1	UNIT	37,050,000
	d) Har jaringan listrik	1	UNIT	40,000,000
	11. Seksi Kesjas			
	a) Har poliklinik gigi			
	1) Har dental unit low speed	1	UNIT	2,000,000
	2) Har kursi gigi mekanik	1	UNIT	500,000
	3) Har kaca mulut	1	UNIT	30,000
	4) bein lurus	1	UNIT	250,000
	5) sonde halfmoon	2	UNIT	50,000
	6) plastic filling instruments	2	UNIT	50,000
	7) pinset gigi	1	UNIT	25,000
	8) sterilisasi kering	1	UNIT	2,000,000
	9) kompresor	1	UNIT	2,000,000
	b. Har poliklinik umum			
	1) tensimeter manual	1	UNIT	400,000
	2) stetoskop	1	UNIT	80,000
	3) refleks hammer	1	UNIT	60,000
	4) neer baken	1	UNIT	30,000
	5) senter	1	UNIT	15,000
	6) timbangan badan	1	UNIT	1,500,000
	7) resuscitator set	1	UNIT	1,000,000
BJ	pemeliharaan peralatan fungsional (Polres)			
	a. Har AC	134	UNIT	61,400,000
	b. Har komputer	310	UNIT	166,220,000
	c. Har printer	153	UNIT	62,090,000
	d. Har HT	590	UNIT	254,050,000
	e. radio RIK	11	UNIT	18,700,000
	f. Har faximile	1	UNIT	150,000
	g. Har Senpi bahu	499	UNIT	20,964,000
	h. Har Senpi genggam	1,400	UNIT	40,980,000
	i. Har handy cam	9	UNIT	4,800,000
	j. Har mesin pemotong rumput	2	UNIT	500,000
	k. Har repeater	4	UNIT	23,153,000
	l. Har laptop	37	UNIT	20,820,000
	m. Har camera digital	3	UNIT	1,210,000
	n. Har SSB	18	UNIT	36,055,000
	o. Har inventaris kantor	115	UNIT	11,313,000
	p. Harwat fixed station	22	UNIT	37,600,000
	q. Harwat fixed mobile	25	UNIT	29,500,000
	r. Har genset	1	UNIT	4,500,000
	s. Har Alsus pengindraan fungsi intelkam			
	t. Har camera digital	4	UNIT	2,000,000
	u. Har voice recorder	4	UNIT	2,000,000
	v. Har handphone PDA	5	UNIT	2,500,000
BK	pemeliharaan peralatan fungsional Polsek			
	a. Har komputer	167	UNIT	87,900,000
	b. Har printer	110	UNIT	50,650,000
	c. Har laptop	2	UNIT	830,000
	d. Har Handy Talky (HT)	8	UNIT	3,200,000
	e. Har AC	1	UNIT	530,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	f. Har Senpi genggam	15	UNIT	600,000
	g. Har Senpi bahu / laras panjang	8	UNIT	480,000
	h. Har Alsus pengindraan fungsi Intelkam			
	i. Har camera digital (Alsus pengindraan fungsi Intelkam)	33	UNIT	16,500,000
	j. Har voice recorder (Alsus pengindraan fungsi Intelkam)	33	UNIT	16,500,000
	k. Har handphone pda (Alsus pengindraan fungsi Intelkam)	29	UNIT	14,500,000
BO	Biaya listrik			
	a. listrik Polda	1	UNIT	2,208,103,000
	b. biaya listrik Polres	23	UNIT	3,016,678,000
BQ	biaya air dan gas			
	a. air Polda	1	UNIT	88,598,000
	c. biaya air Polres	29	UNIT	192,053,000
BW	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor			
	ATK rutin Satker	1	PKT	60,440,000
CJ	Pengadaan Kapor Polri			
	a. honorarium panitia pengadaan barang dan jasa			
	1. panitia pengadaan barang dan jasa (paket II, III, IV, V dan VI)	25	OP	31,750,000
	2. panitia pengadaan barang dan jasa (paket I dan VI)	10	OP	15,200,000
	3. panitia penerima hasil pekerjaan (paket II, III, IV, V dan VI)	25	OP	13,500,000
	4. panitia penerima hasil pekerjaan (paket I dan VI)	10	OP	6,600,000
	b. honorarium pengadaan barang dan jasa			
	1. kuasa pengguna anggaran	8	OB	24,080,000
	2. pejabat pembuat komitmen	8	OB	23,360,000
	3. Bendahara pengeluaran	8	OB	8,720,000
	4. staf Bendahara pengeluaran	24	OB	19,440,000
	5. pejabat PPSPM	8	OB	10,000,000
	c. pengadaan Kapor Polri paket I			
	1. PDH Polri pria	2,571	STEL	1,095,246,000
	2. PDH Polri wanita (rok atau celana panjang)	29	STEL	12,354,000
	3. PDH Polri wanita berjilbab	147	STEL	65,856,000
	4. PDL II W/coklat wanita	360	STEL	216,000,000
	5. PDL II W/ coklat pria	4,066	STEL	2,439,600,000
	d. pengadaan Kapor Polri paket II			
	1. jaket olahraga	7,300	BUAH	2,679,100,000
	2. training olahraga (celana dan baju)	7,300	STEL	1,825,000,000
	e. pengadaan Kapor Polri paket III			
	sepatu olah raga	7,300	STEL	2,190,000,000
	f. pengadaan Kapor Polri paket IV			
	1. tshirt coklat	8,782	PTNG	614,740,000
	2. tshirt hitam	701	PTNG	49,070,000
	3. tshirt hijau	701	PTNG	49,070,000
	4. tshirt loreng	701	PTNG	49,070,000
	5. field cap lapangan Polri	5,018	BUAH	301,080,000
	6. field cap lapangan PNS	183	BUAH	10,980,000
	7. jilbab PNS wanita	192	BUAH	14,112,000
	8. jilbab Korpri PNS wanita	192	BUAH	14,112,000
	9. peci Korpri	183	BUAH	10,431,000
	g. pengadaan Kapor Polri paket V			
	1. PDU-IV Polri pria	2,968	STEL	2,671,200,000
	2. PDL I Lantas pria	329	STEL	108,241,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	3. PDL I Lantas wanita	46	STEL	15,134,000
	4. PDU-IV Polri wanita non jilbab	64	STEL	57,600,000
	5. PDU -IV Polri wanita jilbab	296	STEL	266,400,000
	h. pengadaan Kapor paket VI			
	1. sepatu PDH Polri pria	2,571	PSNG	1,542,600,000
	2. sepatu PDL provos	179	PSNG	125,300,000
	3. sepatu Dishar PNS pria	71	PSNG	42,600,000
	4. sepatu angklebooth PNS wanita	112	PSNG	36,064,000
	i. pengadaan Kapor paket VI			
	1. pakaian PDL PNS pria	71	STEL	31,808,000
	2. pakaian reserse/Narkoba pria	911	STEL	266,923,000
	3. pakaian reserse/Narkoba wanita	84	STEL	24,612,000
	4. pakaian Intelkam pria	548	STEL	160,564,000
	5. pakaian Intelkam wanita	27	STEL	7,911,000
	6. pakaian Paminal pria	36	STEL	10,548,000
	7. pakaian Paminal wanita	3	STEL	879,000
	8. pakaian Korpri pria	71	STEL	31,808,000
	9. pakaian PDL PNS wanita	112	STEL	50,176,000
	10. pakaian Korpri PNS wanita	112	STEL	50,176,000
	11. kaos kaki Dishar PDL	7,858	PSNG	227,882,000
	12. kaos kaki Dishar (PNS)	254	PSNG	5,588,000
	13. pin Korpri	183	BUAH	8,418,000
	14. ban lengan provos	358	BUAH	6,086,000
	15. tik dan lokasi	14,600	BUAH	87,600,000
	16. handuk lapangan kecil warna maroon	14,600	BUAH	452,600,000
	17. handuk lapangan besar warna maroon	7,300	BUAH	613,200,000
	j. Jaldis pengelolaan barang dan jasa			
	1. survei Harga			
	a) uang Harian	20	OH	10,600,000
	b) penginapan Pamen	8	OH	6,960,000
	c) penginapan Pama	8	OH	4,880,000
	d) biaya tiket pesawat PP	4	ORG	18,264,000
	e) biaya taksi bandara ke hotel	8	OK	4,096,000
	f) biaya taksi rumah ke bandara PP	8	OK	1,200,000
	2. pembuktian kualifikasi lapangan			
	a) uang Harian	35	OH	18,550,000
	b) penginapan Pamen	18	OH	15,660,000
	c) penginapan Pama	12	OH	7,320,000
	d) penginapan Gol II	6	OH	2,400,000
	e) biaya tiket pesawat PP	5	ORG	23,180,000
	f) biaya taksi bandara ke hotel	10	OK	4,750,000
	g) biaya taksi rumah ke bandara	10	OK	1,500,000
	3. Produksi Control (PC)			
	a) uang Harian	72	OH	38,160,000
	b) penginapan Pamen	20	OH	17,400,000
	c) penginapan Pama	20	OK	12,200,000
	d) penginapan Bintara	20	OH	12,200,000
	e) biaya tiket pesawat PP	12	OK	56,610,000
	f) biaya taksi bandara ke hotel	24	OK	12,288,000
	g) biaya taksi rumah ke bandara	24	OK	3,600,000
CL	Pengadaan BMP			
	a. honorarium pengadaan barang dan jasa			
	1. kuasa pengguna anggaran	10	OB	25,900,000
	2. pejabat pembuat komitmen	10	OB	25,200,000
	3. Bendahara pengeluaran	10	OB	8,600,000
	4. staf Bendahara pengeluaran	30	OB	19,200,000
	5. pejabat PPSPM	10	OB	9,900,000

b. pengadaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	b. pengadaan BMP Polda	5	PKT	10,150,205,000
	c. pengadaan BMP mendukung genset Mapolda Sultra	1	PKT	100,000,000
	d. pengadaan BMP Polres	12	PKT	12,024,754,000
UB	BMP fungsi Polairud			
	a. pengadaan BMP Polda	1	PKT	4,281,825,000
	b. pengadaan BMP Satpolairud Polres	3	PKT	975,839,000
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
E	Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja			
	a. rapat penyusunan rancangan Renja Satker T.A. 2023	1	GIAT	748,000
	b. rapat penyusunan Renja Satker T.A. 2023	1	GIAT	748,000
F	Penyusunan RKA-KL dan DIPA			
	penyusunan TOR dan RAB pagu	1	GIAT	4,500,000
G	Penyusunan evaluasi LKIP			
	rapat Sun LKIP T.A. 2021	1	GIAT	748,000
Y	pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang			
	pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang	25	KG	500,000
AV	pemeliharaan kendaraan khusus			
	Har mobil Yan SIM	2	UNIT	36,000,000
AY	pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10			
	a. pemeliharaan ranmor BLU	2	UNIT	90,000,000
	b. sedan patroli/patwal	4	UNIT	160,000,000
	c. penling	1	UNIT	18,270,000
	d. pick up double cabin	3	UNIT	120,000,000
AZ	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 / 6 / 10 (Polres)			
	a. honor pejabat pembuat komitmen	1	OB	700,000
	b. administrasi pengadaan	1	PKT	100,000
	c. biaya pengadaan			
	1. honor pejabat pengadaan	1	OB	450,000
	2. honor panitia penerima hasil pekerjaan	3	OP	750,000
	d. double cabin patroli	11	UNIT	440,000,000
	e. double cabin Gantib	3	UNIT	115,000,000
	f. sedan patroli / Patwal	11	UNIT	438,000,000
	g. uji SIM	6	UNIT	108,000,000
	h. double cabin Laka Lantas	4	UNIT	120,000,000
	i. penling	2	UNIT	38,847,000
	j. mobil Yan SIM	1	UNIT	18,000,000
	k. Har kendaraan Laka Lantas	3	UNIT	80,000,000
BB	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2			
	a. pemeliharaan ranmor roda	2	UNIT	10,000,000
	b. roda 2 900 1000 CC	3	UNIT	120,000,000
	c. roda 2 225 CC	9	UNIT	35,460,000
	d. roda 2 125 CC	7	UNIT	27,580,000
BC	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (Polres)			
	a. roda 2 225 CC	80	UNIT	315,200,000
	b. roda 2 125 CC	35	UNIT	133,960,000
BI	Pemeliharaan peralatan fungsional			
	a. pemeliharaan Alkes BLU			
	Har Alkes BLU			
	1. diagnostik set	1	SET	150,000
	2. stetoscope	2	UT	160,000
	3. tensimeter	4	UT	400,000
	4. head lamp	3	BUAH	360,000
	5. timbangan badan	2	UT	300,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	6. timbangan bayi	1	UT	170,000
	7. instrumen kabinet	2	UT	800,000
	8. ambu bag	3	BUAH	450,000
	9. autoclave table	2	BUAH	1,000,000
	10. brancard	2	UT	800,000
	11. low pressure continus	1	BUAH	600,000
	12. meja suntik beroda	1	BUAH	500,000
	13. lemari obat kaca	9	UT	2,250,000
	14. resusitasi dewasa	3	BUAH	1,050,000
	15. resusitasi anak	3	BUAH	1,050,000
	16. kursi dorong	3	BUAH	450,000
	17. suction pump	3	UT	1,500,000
	18. syringe pump	3	UT	1,500,000
	19. tromol hass	4	BUAH	400,000
	20. utility trolly	13	BUAH	1,300,000
	21. UV sterilizer	1	BUAH	700,000
	22. dental unit	1	BUAH	3,000,000
	23. cirto jet	1	BUAH	150,000
	24. light curing unit	1	BUAH	150,000
	25. compressor gigi	1	BUAH	150,000
	26. scaller	1	BUAH	150,000
	27. ekstraktur iud	2	BUAH	300,000
	28. minor surgeri set	4	SET	400,000
	29. mayor surgeri set	1	SET	250,000
	30. circumsision set	3	SET	390,000
	31. opearating table bedah	1	BUAH	3,000,000
	32. electro surgery unit	1	UT	900,000
	33. ceiling operating lamp 7 M halogen	2	UT	400,000
	34. electric suction pump	1	BUAH	150,000
	35. emergency trolley	2	BUAH	500,000
	36. laparatomi set	1	SET	800,000
	37. mayo table stand mobile	1	BUAH	100,000
	38. caesarean section set	1	BUAH	800,000
	39. gynecological examining table	1	BUAH	500,000
	40. oxygen regulator	10	BUAH	1,000,000
	41. baby incubator	1	UT	1,000,000
	42. alat partus set	4	BUAH	1,000,000
	43. tonsilektomi set	2	SET	1,600,000
	44. othoscope	2	SET	200,000
	45. laringoscope	3	SET	300,000
	46. tht examination set	1	SET	100,000
	47. X-Ray viewer	6	SET	600,000
	48. ultrasonic nebulizer	3	BUAH	300,000
	49. endo tracheal tube	1	BUAH	150,000
	50. USG internal medicine	1	BUAH	2,500,000
	51. defibrilator	2	BUAH	800,000
	52. motuary refrigerator	1	BUAH	500,000
	53. autopsi set	3	BUAH	2,250,000
	54. suction hand pump	1	BUAH	500,000
	55. premature infant incubator	1	BUAH	750,000
	56. electric sterilisator	1	BUAH	300,000
	57. infant incubator mobile	2	BUAH	1,000,000
	58. bed pan for adult 310 mm complete	29	BUAH	14,500,000
	59. wheel chair (Alkes rehab medik)	1	BUAH	300,000
	60. electro stimulation analgesia	1	BUAH	550,000
	61. infra red dan ultraviolet	1	BUAH	100,000
	62. micro wave diathermy	1	BUAH	750,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	63. short wave diathermy	1	BUAH	600,000
	64. traction unit	1	BUAH	600,000
	65. pasien monitor	3	UT	2,250,000
	66. electro cardiograph	2	BUAH	1,500,000
	67. ECG 3 chanel	1	BUAH	500,000
	68. ekg monitor	1	BUAH	500,000
	69. blood presure monitor	1	BUAH	150,000
	70. emergency kit	5	BUAH	1,250,000
	71. infant ventilator	1	BUAH	500,000
	72. anastesi apparatus	1	UT	750,000
	73. hand saw machine	1	BUAH	600,000
	74. rotator shaker	1	BUAH	100,000
	75. dry sterilizer	1	BUAH	600,000
	76. tempat tidur besi	46	BUAH	9,200,000
	77. dehumidifier (humodity control)	1	BUAH	500,000
	78. minor surgeri set	4	SET	400,000
	79. bed electric 3 crank	1	UNIT	2,500,000
	80. bed pasien 2 crank manual	5	UNIT	12,500,000
	81. bronchscopy	1	UNIT	5,000,000
	82. X Ray	1	UNIT	15,000,000
	83. ECG 12 chanel	1	UNIT	5,000,000
	84. endoscopy	1	UNIT	25,000,000
	85. ginecology examination bed	1	UNIT	2,500,000
	86. head lamp	1	UNIT	400,000
	87. holmium laser	1	UNIT	2,500,000
	88. infus pump	1	UNIT	500,000
	89. led operasi	1	UNIT	400,000
	90. led vein finder	1	UNIT	400,000
	91. mobile suction pump	1	UNIT	500,000
	92. meja operasi	1	UNIT	7,500,000
	93. paralel bar dewasa dan anak	1	UNIT	1,000,000
	94. pasien strecher	1	UNIT	2,000,000
	95. spirometri	1	UNIT	4,000,000
	96. siring pump	1	UNIT	500,000
	97. trans cranial agenitik	1	UNIT	10,000,000
	98. USG echo cardiac	1	UNIT	12,230,000
	99. USG 3 dimensi	1	UNIT	500,000
	100. tht set	1	UNIT	1,000,000
	101. ventilator	5	UNIT	38,540,000
	b. Har Alkes BLU CR (computer radiografi)			
	CR carestream	1	UNIT	21,500,000
	c. pemeliharaan peralatan BLU			
	Har alat-alat BLU			
	1. mesin pompa air	2	BUAH	2,000,000
	2. lemari besi / metal	1	BUAH	500,000
	3. lemari kayu	20	BUAH	10,000,000
	4. rak besi	4	BUAH	2,000,000
	5. rak kayu	2	BUAH	490,000
	6. buffet	16	BUAH	1,600,000
	7. locker	1	BUAH	150,000
	8. CCTV	1	SET	22,000,000
	9. LCD proyektor / infokus	1	BUAH	1,000,000
	10. layar LCD proyektor	1	BUAH	750,000
	11. meja kerja kayu	30	BUAH	9,000,000
	12. meja kerja besi / metal	20	BUAH	4,000,000
	13. kursi kayu	3	BUAH	450,000
	14. tempat tidur kayu	4	BUAH	800,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	15. meja ketik	4	BUAH	400,000
	16. kasur / spring bed	4	BUAH	1,000,000
	17. mesin cuci	4	BUAH	2,000,000
	18. lemari es	19	BUAH	14,250,000
	19. AC split	34	BUAH	17,000,000
	20. kipas angin	1	BUAH	150,000
	21. exhaust fan	4	BUAH	1,000,000
	22. mesin giling bumbu	1	BUAH	150,000
	23. treng air / tandon air	1	BUAH	500,000
	24. televisi	30	BUAH	15,000,000
	25. wireless	2	BUAH	2,000,000
	26. stabilisator	2	BUAH	600,000
	27. tangga aluminium	1	BUAH	250,000
	28. dispenser	22	BUAH	5,500,000
	29. rak peralatan	1	BUAH	100,000
	30. telepon PABX	12	BUAH	9,000,000
	31. pesawat telephone	1	BUAH	150,000
	32. facsimile	1	BUAH	500,000
	33. genset kecil	2	BUAH	3,000,000
	34. genset besar	1	BUAH	20,000,000
	35. kamera digital	2	BUAH	1,500,000
	36. laptop	6	BUAH	5,880,000
	37. note book	3	BUAH	2,550,000
	38. printer	11	BUAH	5,500,000
	39. sound sistem	1	BUAH	5,620,000
	40. trolley laundry	1	BUAH	500,000
	41. freezer 300 liter	1	BUAH	500,000
	42. baggage trolley	1	UNIT	350,000
	43. kamera drone	1	UNIT	4,597,000
	44. handphone pawas	1	UNIT	1,000,000
	45. meja TV 50 inch	1	UNIT	500,000
	46. tenda kursi lapangan	1	SET	1,500,000
	47. trolley piring kotor	1	UNIT	500,000
	48. kursi tunggu pasien 4 seat	20	UNIT	10,000,000
	49. air purifier	4	UNIT	2,780,000
	50. Har gedung pelayanan SKCK	100	M2	17,100,000
	51. Har komputer ditintelkam	4	UNIT	2,920,000
	d. Harwat perangkat jaringan Satpas			
	1. Satpas p1			
	a) jasa Harwat Hardware	5	UNIT	192,181,000
	b) jasa Harwat software	5	UNIT	14,625,000
	2. Satpas p2			
	a) jasa Harwat Hardware	3	UNIT	137,088,000
	b) jasa Harwat software	3	UNIT	17,925,000
	3. Satpas p3			
	jasa Harwat Hardware	1	UNIT	81,729,000
	4. SIM keliling			
	a) jasa Harwat Hardware	3	UNIT	82,616,000
	b) jasa Harwat software	3	UNIT	6,075,000
BJ	Pemeliharaan peralatan fungsional (Polres)			
	a. Harwat peralatan ruang pelayanan SIM	10	SET	150,000,000
	b. pemeliharaan komputer Polres fungsi Intelkam	12	SET	8,760,000
BK	Pemeliharaan peralatan fungsional (Polsek)			
	pemeliharaan komputer Polsek fungsi Intelkam	125	UNIT	91,250,000
BV	supervisi			
	supervisi	1	GIAT	59,730,000
CL	pengadaan BMP			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	a. kuasa pengguna anggaran	2	OB	3,320,000
	b. pejabat pembuat komitmen	2	OB	3,220,000
	c. pejabat PPSPM	2	OB	1,320,000
	d. Bendahara pengeluaran	2	OB	1,140,000
	e. staf Bendahara pengeluaran	6	OB	2,580,000
	f. pengadaan BMP untuk mendukung BMP sumber RM	2	PKT	985,150,000
	g. BBM BLU	1	PKT	100,000,000
	h. pengadaan BMP untuk mendukung BMP sumber RM (Polres)	11	PKT	1,451,200,000
FS	Dukopsnal Satker			
	opsnal	1	PKT	69,252,000
FY	ULP non organik / jaga fungsi			
	jaga SPBP	730	OH	45,990,000
GO	Pembinaan fungsi-fungsi			
	Bin fungsi	1	GIAT	486,002,000
JZ	Honorarium SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/pengelola keuangan			
	a. honor penanggung SIMAK wilayah	12	OB	3,600,000
	b. honor ketua kegiatan operator SIMAK/persediaan/siman	12	OB	2,400,000
	c. honor staf kegiatan operator e Monev	12	OB	3,600,000
	d. honor staf kegiatan operator SIMAK	12	OB	1,800,000
	e. honor staf kegiatan operator SAIBA	12	OB	1,800,000
	f. honor staf kegiatan operator persediaan	12	OB	1,800,000
	g. honor operator Sirena	12	OB	3,600,000
	h. honor operator SIMAN	12	OB	1,800,000
	i. honor operator SIPP	12	OB	1,800,000
	j. honor operator 13 komponen	12	OB	1,800,000
KA	Pemeliharaan gedung kesehatan			
	a. kebersihan Rumkit Bhayangkara TK.III kendari	12	BULAN	720,000,000
	b. perlengkapan pemeliharaan IPAL	1	PKT	200,000,000
	c. pemeliharaan gedung BLU	1	PKT	500,000,000
TV	Penyusunan perjanjian kinerja			
	penyusunan perjanjian kinerja dan rencana aksi Satker T.A. 2022	1	GIAT	748,000
UB	BMP fungsi Polair			
	pengadaan BMP Satpolair Polres untuk mendukung BMP sumber RM	3	PKT	267,800,000
UC	pengadaan BMP fungsi Lantas (PNBP)			
	a. BMP fungsi Lantas (PNBP)	1	PKT	1,642,141,000
	b. pengadaan BMP fungsi Lantas (Polres)	12	PKT	5,115,247,000

d. program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1) tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) kegiatan

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.BQ	PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT			
3112	Analisis keamanan			
003	dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
I	Penyusunan naskah buku lainnya			
	a. Pokja Sun intel dasar	1	GIAT	2,257,000
	b. Pokja Sun Kir tahunan	1	GIAT	2,000,000
EN	Deteksi kegiatan masyarakat			
	Giat analisis intelijen			
	a. sumber terbuka / klipang koran	12	PRDK	2,664,000
	b. Telming	48	PRDK	89,616,000
	c. Telbul	12	PRDK	23,760,000
	d. perkiraan cepat	3	PRDK	3,672,000
	e. perkiraan singkat	4	PRDK	7,136,000
	f. Kir Ops kepolisian	12	PRDK	25,524,000
	g. perkiraan khusus intelijen (Kirsus Pam Presiden/Wapres/VVIP)	3	PRDK	5,217,000
	h. laporan atensia	6	PRDK	10,818,000
	i. bahan pimpinan	6	PRDK	11,496,000
	j. nota intelijen	6	PRDK	10,884,000
	k. memo intelijen	4	PRDK	5,592,000
EO	Deteksi kegiatan masyarakat (Polres)			
	a. produk periodik intelijen			
	1. Giat Pulbaket	1,645	LI	99,638,000
	2. telaahan mingguan	187	NSKAH	76,800,000
	3. telaahan bulanan	48	NSKAH	34,200,000
	4. telaahan intejejen	2	NSKAH	3,396,000
	5. tambahan telaahan bulanan	1	NSKAH	266,000
	b. produk insidentil intelijen			
	1. perkiraan cepat (Kirpat)	100	NSKAH	94,400,000
	2. perkiraan khusus (Kirsus)	21	NSKAH	12,800,000
	3. perkiraan singkat (Kirkat)	107	NSKAH	103,068,000
	4. laporan atensia	6	NSKAH	1,500,000
	5. perkiraan khusus operasi intelijen	6	NSKAH	9,600,000
EP	Deteksi kegiatan masyarakat (Polsek)			
	a. Giat Pulbaket	2,557	M2/T	142,210,000
	b. telaahan mingguan	259		90,650,000
	c. telaahan bulanan	288	M2/T	66,600,000
KQ	deteksi / deteksi aksi (Polres)			
	a. telaahan mingguan	453	NSKH	269,380,000
	b. telaahan bulanan	96	NSKH	81,414,000
	c. telaahan intelijen	86	NSKH	66,418,000
	d. telaahan singkat	46	NSKH	17,574,000
	e. Perkiraan Cepat (kirpat)	67	NSKH	42,688,000
	f. Perkiraan Singkat (kirkat)	76	NSKH	60,812,000
	g. Kir Ops kepolisian	68	NSKH	57,532,000
	h. perkiraan khusus	40	NSKH	20,000,000
	i. laporan atensia	74	NSKH	42,249,000
	j. nota intelijen	37	NSKH	15,285,000
	k. Giat Pulbaket	2,202	BUKU	229,617,000
	l. perkiraan tahunan	2	NSKH	2,803,000
	m. perkiraan bulanan	24	NSKH	33,864,000
	n. bahan pimpinan	15	NSKH	20,184,000
	o. pokja penyusunan intel dasar	3	NSKH	4,959,000

p. laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	p. laporan informasi	648	PRDK	87,480,000
	q. informasi khusus hasil analisa taktikal	2	NSKH	2,938,000
KR	Deteksi / deteksi aksi (Polsek)			
	a. laporan informasi	525	NSKH	70,875,000
	b. laporan informasi khusus	300	NSKH	55,500,000
	c. Giat Pulbaket	5,252	NSKH	366,950,000
	d. telaahan bulanan	156	NSKH	78,000,000
3114	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
EO	Deteksi kegiatan masyarakat Polres			
	a. pengalangan intelijen atau sasaran perorangan	12	NSKH	48,000,000
	b. Giat Pulbaket	7	NSKH	1,295,000
EP	Deteksi kegiatan masyarakat Polsek			
	Giat pulbaket	56	NSKH	5,600,000
KP	Deteksi / deteksi aksi			
	a. produk intelijen (laporan informasi)	809	NSKH	40,450,000
	b. deteksi / penyelidikan intelijen	240	NSKH	198,000,000
	c. produk intelijen (infosus)	20	NSKH	3,700,000
	d. deteksi / lidik intelijen	216	NSKH	56,106,000
KQ	Deteksi / deteksi aksi (Polres)			
	a. deteksi atau penyelidikan dan pengamanan intelijen	256	NSKH	209,930,000
	b. Giat Pulbaket			
	1. laporan informasi	821	NSKH	110,835,000
	2. laporan informasi khusus	248	NSKH	45,880,000
	c. laporan informasi khusus (PNBP)	70	NSKH	12,950,000
KR	Deteksi / deteksi aksi (Polsek)			
	a. laporan informasi	1,038	NSKH	140,565,000
	b. laporan informasi khusus	198	NSKH	35,610,000
	c. deteksi penyelidikan dan pengamanan intelijen	255	NSKH	108,600,000
	d. Giat Pulbaket	988	NSKH	54,340,000
KT	Lidik taktis intel (Polres)			
	lidik taktis intel	36	NSKH	11,880,000
KV	Pembentukan jaringan intelijen			
	pembentukan jaringan intelijen	8	NSKH	28,281,000
KW	Pembentukan jaringan intelijen (Polres)			
	pembentukan jaringan intelijen	92	NSKH	148,786,000
KX	Pembentukan jaringan intelijen (Polsek)			
	pembentukan jaringan intelijen	153	NSKH	194,450,000
KY	Pembinaan intelijen			
	pembinaan jaringan intelijen	28	NSKH	46,655,000
KZ	Pembinaan intelijen (Polres)			
	pembinaan jaringan intelijen	96	NSKH	143,021,000
LA	Pembinaan jaringan intelijen (Polsek)			
	pembinaan jaringan intelijen	184	NSKH	199,950,000
LC	Pengamanan intelijen (Polres)			
	pengamanan intelijen	104	NSKH	35,000,000
LE	Penggalangan intelijen sasaran perorangan			
	a. penggalangan sasaran perorangan	16	NSKH	103,474,000
	b. penggalangan sasaran perorangan (PNBP)	4	NSKH	88,000,000
LF	Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polres)			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan	39	NSKH	338,877,000
LG	Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polsek)			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polsek)	95	NSKH	142,940,000
LH	Penggalangan intelijen sasaran kelompok			
	penggalangan sasaran kelompok	2	NSKH	62,000,000
LI	Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polres)			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	penggalangan intelijen (sasaran kelompok)	16	NSKH	78,023,000
LJ	Penggalangan intelijen sasaran kelompok Polsek			
	Penggalangan intelijen sasaran kelompok	1	NSKH	200,000
LQ	Tukjar Binjar intelijen khusus			
	a. spoting personel			
	1. spoting personel (dalam bentuk lidik Polda)	8	NSKH	8,312,000
	2. IATKatpuan kepada jaringan	1	NSKH	88,196,000
	3. FGD	1	NSKH	186,240,000
	b. pengerahan massa			
	1. Korlap	30	NSKH	3,000,000
	2. anggota	600	NSKH	30,000,000
	3. Anev semester Galsus dan Tukbinjar	1		215,600,000
	c. dana pembinaan jaringan			
	1. jaringan tahun 2018	540	NSKH	270,000,000
	2. jaringan tahun 2019	60	NSKH	30,000,000
	3. jaringan tahun 2020	24	NSKH	12,000,000
	4. jaringan tahun 2021	32	NSKH	16,000,000
LR	Penggalangan intelejen sasaran perorangan khusus			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus	5	NSKH	443,410,000
LS	Penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus			
	penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus	3	NSKH	510,120,000
VA	Penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus Polres			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus	2	NSKH	45,912,000
VB	Penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus Polres			
	penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus	2	NSKH	64,322,000
3115	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
EO	Deteksi kegiatan masyarakat Polres			
	a. pengalangan intelijen atau sasaran perorangan	10	NSKH	40,000,000
	b. Giat Pulbaket	7	NSKH	1,295,000
EP	Deteksi kegiatan masyarakat Polsek			
	Giat Pulbaket	56	NSKH	5,600,000
KP	Deteksi / deteksi aksi			
	a. produk intelijen (laporan informasi)	809	NSKH	40,450,000
	b. deteksi / penyelidikan intelijen	240	NSKH	198,000,000
	c. produk intelijen (infosus) (PNBP)	20	NSKH	3,700,000
	d. deteksi / lidik intelijen (PNBP)	144	NSKH	37,404,000
KQ	Deteksi / deteksi aksi (Polres)			
	a. deteksi atau penyelidikan dan pengamanan intelijen	283	NSKH	233,720,000
	b. Giat Pulbaket			
	1. laporan informasi	991	NSKH	133,785,000
	2. laporan informasi khusus	246	NSKH	45,510,000
	3. laporan informasi khusus (PNBP)	63	NSKH	11,655,000
	4. laporan atensia	7	NSKH	1,295,000
KR	Deteksi / deteksi aksi (Polsek)			
	a. laporan informasi	1,165	NSKH	158,365,000
	b. laporan informasi khusus	202	NSKH	36,350,000
	c. deteksi penyelidikan dan pengamanan intelijen	261	NSKH	111,000,000
	d. Giat Pulbaket	998	NSKH	54,890,000
KT	Lidik taktis intel (Polres)			
	lidik taktis intel	82	NSKH	27,060,000
KV	Pembentukan jaringan intelijen			
	pembentukan jaringan intelijen	14	NSKH	27,000,000
KW	Pembentukan jaringan intelijen (Polres)			
	pembentukan jaringan intelijen	84	NSKH	153,921,000
KX	Pembentukan jaringan intelijen (Polsek)			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	pembentukan jaringan intelijen	183	NSKH	236,200,000
KY	pembinaan intelijen			
	pembinaan jaringan intelijen	2	NSKH	7,655,000
KZ	Pembinaan intelijen (Polres)			
	pembinaan jaringan intelijen	97	NSKH	147,411,000
LA	Pembinaan intelijen (Polsek)			
	pembinaan jaringan intelijen	179	NSKH	192,200,000
LC	Pengamanan intelijen (Polres)			
	pengamanan intelijen	104	NSKH	35,000,000
LE	Penggalangan intelijen sasaran perorangan			
	a. penggalangan sasaran perorangan	2	NSKH	34,000,000
	b. penggalangan sasaran perorangan (PNBP)	4	NSKH	88,000,000
LF	Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polres)			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan	49	NSKH	358,808,000
LG	Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polsek)			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan	108	NSKH	168,560,000
LH	Penggalangan intelijen sasaran kelompok			
	penggalangan sasaran kelompok	2	NSKH	62,000,000
LI	Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polres)			
	penggalangan intelijen (sasaran kelompok)	17	NSKH	78,724,000
LJ	Penggalangan intelijen sasaran kelompok Polsek			
	penggalangan intelijen sasaran kelompok	1	NSKH	200,000
LQ	Tukjar Binjar intelijen khusus			
	a. spoting personel			
	spoting personel (dalam bentuk lidik Polda)	8	OH	8,312,000
	b. pengerahan masa			
	1. Korlap	20	OG	2,000,000
	2. anggota	400	OG	20,000,000
	c. dana pembinaan jaringan			
	1. jaringan tahun 2018	240	OB	120,000,000
	2. jaringan tahun 2019	60	OB	30,000,000
	3. jaringan tahun 2020	24	OB	12,000,000
	4. jaringan tahun 2021	32	OB	16,000,000
LR	Penggalangan intelejen sasaran perorangan khusus			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus	4	NSKH	354,728,000
LS	Penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus			
	penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus	3	NSKH	510,120,000
VA	Penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus Polres			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus	1	NSKH	22,956,000
VB	Penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus Polres			
	penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus	1	NSKH	32,216,000
3116	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya			
003	dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
EO	Deteksi kegiatan masyarakat (Polres)			
	a. pengamanan intelejen	30	OH	9,900,000
	b. penggalangan intelejen sasaran kelompok	8	OK	30,968,000
	c. penggalangan intelejen sasaran perorangan	14	OK	51,210,000
	d. penyelidikan intelejen	48	OH	15,840,000
	e. Giat Pulbaket	7	NSKH	1,295,000
EP	Deteksi kegiatan masyarakat (Polsek)			
	pengamanan intelejen	136	OH	14,000,000
KP	Deteksi / deteksi aksi			
	a. produk intelijen (laporan informasi)	809	PRDK	40,450,000
	b. deteksi / penyelidikan intelijen	240	OH	198,000,000
	c. produk intelijen (infosus) (PNBP)	20	PRDK	3,700,000
	d. deteksi / lidik intelijen (PNBP)	216	OH	56,106,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
KQ	Deteksi / deteksi aksi (Polres)			
	a. deteksi atau penyelidikan dan pengamanan intelijen	246	OH	197,634,000
	b. Giat Pulbaket			
	1. laporan informasi	887	PRDK	119,745,000
	2. laporan informasi khusus	278	PRDK	51,430,000
	3. laporan atensia	7	PRDK	1,295,000
	4. laporan informasi khusus (PNBP)	63	PRDK	11,655,000
KR	Deteksi / deteksi aksi (Polsek)			
	a. laporan informasi	1,058	PRDK	143,170,000
	b. laporan informasi khusus	198	PRDK	35,610,000
	c. deteksi penyelidikan dan pengamanan intelijen	257	PRDK	109,400,000
	d. Giat Pulbaket	996	PRDK	54,780,000
KV	Pembentukan jaringan intelijen			
	pembentukan jaringan intelijen	2	GIAT	15,000,000
KW	Pembentukan jaringan intelijen (Polres)			
	pembentukan jaringan intelijen	98	GIAT	168,817,000
KX	Pembentukan jaringan intelijen (Polsek)			
	pembentukan jaringan intelijen	180	GIAT	233,950,000
KY	Pembinaan intelijen			
	pembinaan jaringan intelijen	2	GIAT	9,260,000
KZ	Pembinaan intelijen (Polres)			
	pembinaan jaringan intelijen	97	GIAT	149,521,000
LA	Pembinaan intelijen (Polsek)			
	pembinaan jaringan intelijen	182	GIAT	198,450,000
LC	Pengamanan intelijen (Polres)			
	deteksi atau penyelidikan dan pengamanan intelijen	4	GIAT	2,000,000
LE	Penggalangan intelijen sasaran perorangan			
	a. penggalangan sasaran perorangan	2	GIAT	34,000,000
	b. penggalangan sasaran perorangan (PNBP)	4	GIAT	88,000,000
LF	Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polres)			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan	39	GIAT	362,676,000
LG	Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polsek)			
	penggalangan intelijen (sasaran perorangan)	88	GIAT	120,500,000
LH	Penggalangan intelijen sasaran kelompok			
	penggalangan sasaran kelompok	2	GIAT	62,000,000
LI	Penggalangan intelijen sasaran kelompok Polres			
	pengalangan intelijen sasaran kelompok	11	GIAT	53,824,000
LJ	Penggalangan intelijen sasaran kelompok Polsek			
	pengalangan intelijen sasaran kelompok	1	GIAT	200,000
LQ	Tukjar Binjar intelijen khusus			
	a. spoting personel			
	spoting personel (dalam bentuk lidik Polda)	8	OH	8,312,000
	b. pengerahan massa			
	1. Korlap	30	OG	3,000,000
	2. anggota	600	OG	30,000,000
	c. dana pembinaan jaringan			
	1. jaringan tahun 2018	540	OB	270,000,000
	2. jaringan tahun 2019	60	OB	30,000,000
	3. jaringan tahun 2020	24	OB	12,000,000
	4. jaringan tahun 2021	32	OB	16,000,000
LR	Penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus	5	GIAT	443,410,000
LS	Penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus			
	penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus	3	GIAT	510,120,000
VA	Penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus Polres			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus	3	GIAT	68,868,000
VB	Penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus Polres			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus	3	GIAT	90,378,000
3117	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
EO	Deteksi kegiatan masyarakat Polres			
	a. pengalangan intelijen atau sasaran perorangan	10	GIAT	40,000,000
	b. Giat Pulbaket	9	GIAT	1,665,000
EP	Deteksi kegiatan masyarakat Polsek			
	Giat Pulbaket	55	GIAT	5,515,000
KP	Deteksi / deteksi aksi			
	a. produk intelijen (laporan informasi)	809	GIAT	40,450,000
	b. deteksi / penyelidikan intelijen	240	GIAT	198,000,000
	c. produk intelijen (infosus) (PNBP)	30	GIAT	5,550,000
	d. deteksi / lidik intelijen (PNBP)	144	GIAT	37,404,000
KQ	Deteksi / deteksi aksi (Polres)			
	a. deteksi atau penyelidikan dan pengamanan intelijen	254	GIAT	211,380,000
	b. Giat Pulbaket			
	1. laporan informasi	1,021	GIAT	137,835,000
	2. laporan informasi khusus	248	GIAT	45,880,000
	3. laporan informasi khusus (PNBP)	90	GIAT	16,650,000
KR	Deteksi / deteksi aksi (Polsek)			
	a. laporan informasi	1,156	GIAT	156,550,000
	b. laporan informasi khusus	197	GIAT	35,425,000
	c. deteksi penyelidikan dan pengamanan intelijen	261	GIAT	111,000,000
	d. Giat Pulbaket	1,001	GIAT	55,055,000
KT	Lidik taktis intel (Polres)			
	lidik taktis intel	30	GIAT	9,900,000
KV	Pembentukan jaringan intelijen			
	pembentukan jaringan intelijen	2	GIAT	15,000,000
KW	Pembentukan jaringan intelijen (Polres)			
	pembentukan jaringan intelijen	100	GIAT	172,317,000
KX	Pembentukan jaringan intelijen (Polsek)			
	pembentukan jaringan intelijen	181	GIAT	234,950,000
KY	Pembinaan intelijen			
	pembinaan jaringan intelijen	2	GIAT	7,740,000
KZ	Pembinaan intelijen (Polres)			
	pembinaan jaringan intelijen	104	GIAT	157,269,000
LA	Pembinaan intelijen (Polsek)			
	pembinaan jaringan intelijen	182	GIAT	194,450,000
LC	Pengamanan intelijen (Polres)			
	pengamanan intelijen	100	GIAT	33,680,000
LE	Penggalangan intelijen sasaran perorangan			
	a. penggalangan sasaran perorangan	2	GIAT	34,000,000
	b. penggalangan sasaran perorangan (PNBP)	4	GIAT	88,000,000
LF	Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polres)			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan	50	GIAT	360,899,000
LG	Penggalangan intelijen sasaran perorangan (Polsek)			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan	108	GIAT	169,640,000
LH	Penggalangan intelijen sasaran kelompok			
	penggalangan sasaran kelompok	2	GIAT	62,000,000
LI	Penggalangan intelijen sasaran kelompok (Polres)			
	penggalangan intelijen (sasaran kelompok)	20	GIAT	98,048,000
LJ	Penggalangan intelijen sasaran kelompok Polsek			
	pengalangan intelijen sasaran kelompok	1	GIAT	200,000
LQ	Tukjar Binjar intelijen khusus			
	a. spoting personel			
	spoting personel (dalam bentuk lidik Polda)	8	GIAT	8,312,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	b. pengerahan massa			
	1. Korlap	20	GIAT	2,000,000
	2. anggota	400	GIAT	20,000,000
	c. dana pembinaan jaringan			
	1. jaringan tahun 2018	480	GIAT	240,000,000
	2. jaringan tahun 2019	60	GIAT	30,000,000
	3. jaringan tahun 2020	24	GIAT	12,000,000
	4. jaringan tahun 2021	32	GIAT	16,000,000
LR	Penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus	5	GIAT	443,410,000
LS	Penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus			
	penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus	4	GIAT	680,160,000
VA	Penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus Polres			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus	1	GIAT	22,956,000
VB	Penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus Polres			
	penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus	1	GIAT	31,811,000
VK	Kegiatan 2 program prioritas kaPolri			
	a. deteksi / lidik intelijen	672	GIAT	489,120,000
	b. penggalangan individu	8	GIAT	182,352,000
	c. penggalangan kelompok	8	GIAT	256,240,000
	d. pembentukan jaringan	4	GIAT	35,392,000
	e. pembinaan jaringan	4	GIAT	36,768,000
	f. rapat kasat intelkam	1	GIAT	30,000,000
3120	Kerja sama keamanan dan ketertiban K/L			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
ER	Kerja sama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga terkait			
	kerja sama antar instansi	1	GIAT	17,884,000
3128	Dukungan manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat			
001	gaji dan tunjangan			
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			
	a. gaji dan tunjangan	1	THN	88,133,649,000
	b. lembur			
	1. PNS			
	a) lembur Gol I	240	OJ	3,120,000
	b) uang makan Gol I	120	OH	4,200,000
	c) lembur Gol II	3,360	OJ	57,120,000
	d) uang makan Gol II	2,040	OH	71,400,000
	e) lembur Gol III	2,880	OJ	57,360,000
	f) uang makan Gol III	1,680	OH	61,200,000
	g) lembur Gol IV	1,040	OJ	26,000,000
	h) uang makan Gol IV	840	OH	34,440,000
	2. uang lembur PNS diluar jam kantor/Hari libur			
	a) Gol. II	96	OJ	2,400,000
	b) uang makan lembur PNS Gol II	24	OH	840,000
	c) Gol. IV	288	OJ	7,200,000
	d) uang makan lembur PNS Gol IV	24	OJ	1,200,000
	3. Polri			
	a) makan lembur Gol II	9,600	OH	336,000,000
	b) makan lembur Gol III	1,920	OH	71,040,000
	c) makan lembur Gol IV	1,561	OH	103,032,000
002	Operasional dan pemeliharaan kantor			
BW	pengadaan peralatan/perlengkapan kantor			
	ATK rutin	374	OT	658,348,000
FT	Dukopsnal Polres			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Dukops Polres	2	PKT	235,874,000
FU	Dukopsnal Polsek			
	Dukops Polsek	10	PKT	3,357,527,000
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
B	honor PNPB			
	a. honor pengelolah PNPB	60	OB	24,000,000
	b. honor Bendahara penerimaan intelkam TK. Polda	12	OB	6,000,000
	c. honor Bendahara penerimaan SKCK intelkam TK. Polda	12	OB	4,200,000
	d. honor Bendahara penerimaan Sendak intelkam TK. Polda	12	OB	4,200,000
	e. honor pelaksana Sendak TK. Polda	12	OB	6,000,000
	f. honor pelaksana SKCK TK. Polda	12	OB	6,000,000
	g. honor pembantu Bendahara penerimaan SKCK (Polres)	144	OB	50,400,000
	h. honor pelaksana SKCK tingkat Polres	156	OB	54,600,000
	i. honor pelaksana SKCK Polsek tipe B	84	OB	29,400,000
	j. honor pelaksana SKCK Polsek tipe C	852	OB	255,600,000
	k. honor pelaksana SKCK Polsek tipe D	528	OB	105,600,000
E	Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja			
	a. penyusunan rancangan Renja Satker T.A. 2023	7	GIAT	8,400,000
	b. penyusunan Renja Satker T.A. 2023	7	GIAT	8,400,000
	c. rapat penyusunan pagu indikatif T.A. 2023	1	GIAT	1,500,000
F	Penyusunan RKA-KL dan Dipa			
	a. kebutuhan anggaran penyusunan pagu ideal T.A. 2023	2	GIAT	4,000,000
	b. kebutuhan anggaran penyusunan pagu indikatif T.A. 2023	1	GIAT	2,500,000
	c. kebutuhan anggaran penyusunan pagu anggaran T.A. 2023	1	GIAT	2,500,000
	d. kebutuhan anggaran sosialisasi pagu alokasi T.A. 2023	1	GIAT	2,500,000
	e. penyusunan Rendisgar Satker T.A. 2022	1	GIAT	1,500,000
G	Penyusunan evaluasi LKIP			
	penyusunan LKIP T.A. 2022	7	GIAT	9,106,000
I	Penyusunan naskah buku lainnya			
	Pokja Sun target penerimaan dan penggunaan PNPB			
	a. paket full board peserta Polda	10	ORG	6,880,000
	b. paket full board peserta Polres	24	ORG	16,512,000
	c. paket full board peserta Polsek	125	ORG	86,000,000
	d. seminar KIT peserta	155	SET	6,975,000
	e. kertas HVS folio	3	RIM	150,000
	f. kertas HVS A4	5	RIM	240,000
	g. refil tinta black	1	BUAH	100,000
	h. stop map polio	1	PAK	35,000
N	Pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan tubuh/uang makan PNS			
	a. Seksi Kesjas			
	extra fooding latihan dan pembinaan jasmani	4,560	OH	41,040,000
	b. Yon B Pelopor			
	extra fooding latihan dan pembinaan jasmani	1,392	OH	12,528,000
	c. Kompi 1 Yon C Pelopor			
	extra fooding latihan dan pembinaan jasmani	528	OH	4,752,000
Y	Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang			
	pengepakan dan pengiriman barang	378	KG/T	38,506,000
BI	Pemeliharaan peralatan fungsional			
	pemeliharaan jaringan SKCK online	2	UNIT	7,200,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
BJ	Pemeliharaan peralatan fungsional (Polres)			
	a. Har jaringan SKCK online Polres	19	UNIT	68,400,000
	b. Har jaringan SKCK online Polsek	10	UNIT	36,000,000
BK	Pemeliharaan peralatan fungsional Polsek			
	Har jaringan SKCK online Polsek	1	UNIT	3,600,000
BP	biaya telepon			
	a. dukungan pulsa pda (inteltek helpdeks) Polda	480	UB	48,000,000
	b. dukungan pulsa pda (inteltek dan helpdesk) Polres	252	UB	25,200,000
	c. dukungan pulsa pda (inteltek dan helpdesk) Polsek	180	UB	18,000,000
BX	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor (Polres)			
	ATK perijinan SKCK Polres	50	S/T	185,180,000
BU	Evaluasi/laporan kegiatan			
	penyusunan laporan evaluasi anggaran dan smart	1	GIAT	4,000,000
BV	Supervisi			
	supervisi	4	GIAT	189,398,000
BW	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor	1	THN	51,133,000
	ATK SKCK			
BY	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor (Polsek)			
	ATK SKCK	1	THN	607,200,000
DX	Peningkatan kemampuan personel Satker			
	kegiatan peningkatan kemampuan personel polair			
	a. latihan SAR perairan			
	1. uang makan	100	OH	3,500,000
	2. snack	100	OH	2,000,000
	3. alins dan alongins	100	OH	1,500,000
	4. Minlat	100	OH	250,000
	5. honor instruktur	50	OJP	3,000,000
	b. latihan selam			
	1. uang makan	100	OH	3,500,000
	2. snack	100	OH	2,000,000
	3. alins dan alongins	100	OH	1,500,000
	4. Minlat	100	OH	250,000
	5. honor instruktur	50	OJP	3,000,000
	c. latihan menembak			
	1. uang makan	270	OH	9,450,000
	2. snack	270	OH	5,400,000
	3. alins dan alongins	270	OH	4,050,000
	4. Minlat	270	OH	675,000
	5. honor instruktur	30	OJP	1,800,000
	d. kebutuhan pendukung	1	PKT	125,000
DY	Kegiatan pembinaan			
	kegiatan binmas perairan dan pantai			
	a. uang saku	300	OH	6,600,000
	b. uang makan	300	OH	7,500,000
	c. dana satuan	300	OH	900,000
EP	deteksi kegiatan masyarakat (Polsek)			
	Giat Pulbaket (laporan Infosus)	96	GIAT	12,960,000
ER	kerja sama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga terkait			
	rapat penandatanganan mou			
	a. rapat pembahasan dan pemantapan draft MoU	1	PKT	18,120,000
	b. rapat pembahasan dan pemantapan draft MoU	1	PKT	18,120,000
FS	Dukopsnal Satker			
	Dukopsnal	9	PKT	2,548,709,000
FT	Dukopsnal Polres			
	Dukops Polres	10	PKT	8,779,046,000
FU	Dukopsnal Polsek			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Dukops Polsek	7	PKT	827,410,000
FY	ULP non organik / jaga fungsi			
	a. piket fungsi	27,377	OH	1,724,751,000
	b. piket Yanmin Polda	1,040	OH	13,000,000
FZ	ULP non organik / jaga fungsi (Polres)			
	a. Polres	69,715	OH	4,392,045,000
	b. Satpolairud	3,285	OH	206,955,000
GA	ULP non organik / jaga fungsi (Polsek)			
	ULP non organik	147,825		9,312,975,000
GL	Pembinaan lalu lintas			
	pembinaan masyarakat tak terorganisir	1	GIAT	26,554,000
GV	Pengendalian massa			
	pengamanan unjuk rasa	272	GIAT	617,010,000
KR	Deteksi / deteksi aksi (Polsek)			
	a. laporan informasi	1,140	GIAT	153,900,000
	b. Giat Pulbaket	228	GIAT	37,260,000
JZ	honorarium sai/Sakpa/simak/smap/pengelola keuangan			
	a. honor operator Simak-BMN			
	staf kegiatan	84	OB	12,600,000
	b. honor operator Sakpa			
	staf kegiatan	84	OB	12,600,000
	c. honor operator Smap			
	staf kegiatan	84	OB	16,200,000
	d. honor operator Sirena			
	staf kegiatan	84	OB	25,200,000
	e. honor pengelola kegiatan			
	1. honor kuasa pengguna anggaran	12	OB	36,000,000
	2. honor pejabat pembuat komitmen	12	OB	28,800,000
	3. honor pejabat PPSPM	12	OB	15,000,000
	4. honor Bendahara pengeluaran	12	OB	13,080,000
	5. honor staf pengelola keuangan	48	OB	38,400,000
TV	Penyusunan perjanjian kinerja			
	penyusunan perjanjian kinerja dan Ren aksi Satker T.A. 2022	7	GIAT	8,200,000
TW	Kontinjensi			
	operasi kepolisian direktif Kapolda			
	a. penanganan konflik sosial (Aman Nusa I)			
	1. uang saku	8,400	OH	336,000,000
	2. dana satuan	8,400	OH	159,600,000
	3. uang makan	8,400	OH	688,800,000
	4. Bekkes	8,400	OH	67,200,000
	b. penanganan bencana alam (Aman Nusa II)			
	1. uang saku	8,400	OH	336,000,000
	2. dana satuan	8,400	OH	159,600,000
	3. uang makan	8,400	OH	688,800,000
	4. Bekkes	8,400	OH	67,200,000
	c. penanganan teroris (Aman Nusa III)			
	1. uang saku	7,000	OH	280,000,000
	2. dana satuan	7,000	OH	133,000,000
	3. uang makan	7,000	OH	574,000,000
	4. Bekkes	7,000	OH	56,000,000
	d. Sispam Kota			
	1. uang makan	4,680	OH	383,760,000
	2. snack / drink	4,680	OH	135,720,000
	3. alin alongis	4,680	OH	60,840,000
	4. Minlat	4,680	OH	42,120,000
	5. honor instruktur	128	OJ	9,600,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	e. supervisi			
	1. uang Harian	3	ORG	1,140,000
	2. sewa kendaraan	1	Hari	620,000
3130	Pembinaan pelayanan fungsi sabHara			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
BV	Supervisi			
	supervisi	1	GIAT	43,562,000
DX	Peningkatan kemampuan personel Satker			
	a. latihan kemampuan Dalmas			
	snack/kudapan	1,200	OG	14,400,000
	b. latihan kemampuan Turjawali			
	snack/kudapan	552	OG	6,624,000
	c. latihan kemampuan SAR terbatas			
	snack/kudapan	648	OG	7,776,000
	d. latihan kemampuan TPTKP			
	snack/kudapan	600	OG	7,200,000
	e. latihan kemampuan satwa			
	snack/kudapan	288	OG	3,456,000
	f. ATK pendukung			
	kertas folio A4 80 gram	3	RIM	144,000
GC	Menyelenggarakan pengaturan pengawalan dan patroli Polres			
	patroli			
	a. uang saku	1,600	OG	35,200,000
	b. uang makan	1,600	OG	54,400,000
	c. dana satuan	1,600	OG	8,000,000
GD	Menyelenggarakan pengaturan pengawalan dan patroli Polsek			
	patroli			
	a. uang saku	1,400	OG	30,800,000
	b. uang makan	1,400	OG	47,600,000
	c. dana satuan	1,400	OG	7,000,000
GE	Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli			
	a. patroli			
	1. uang saku	2,190	OG	48,180,000
	2. uang makan	2,190	OG	74,460,000
	3. dana satuan	2,190	OG	10,950,000
	b. tambahan patroli			
	1. uang saku	5	OG	100,000
	2. uang makan	5	OG	150,000
	3. dana satuan	5	OG	20,000
	c. pengawalan			
	1. uang saku	70	OG	1,540,000
	2. uang makan	70	OG	2,380,000
	3. dana satuan	70	OG	350,000
	d. pengaturan			
	1. uang saku	525	OG	8,400,000
	2. dana satuan	525	OG	2,625,000
	e. penjagaan			
	1. uang saku	210	OG	3,360,000
	2. dana satuan	210	OG	1,050,000
GG	Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli Polsek (PNBP)			
	a. penjagaan			
	1. uang saku	70,600	OG	1,129,600,000
	2. dana satuan	70,600	OG	353,000,000
	b. pengawalan			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	1. uang saku	4,278	OG	100,764,000
	2. uang makan	4,278	OG	138,804,000
	3. dana satuan	4,278	OG	21,390,000
	c. pengaturan			
	1. uang saku	88,164	OG	1,410,624,000
	2. dana satuan	88,164	OG	440,820,000
	d. patroli			
	1. uang saku	2,400	OG	52,800,000
	2. uang makan	2,400	OG	81,600,000
	3. dana satuan	2,400	OG	12,000,000
GV	Pengendalian massa			
	pengamanan unjuk rasa			
	a. uang makan	4,440	OG	66,600,000
	b. uang saku	4,440	OG	55,500,000
IE	Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli Polres (PNBP)			
	a. penjagaan			
	1. uang saku	37,573	OG	601,168,000
	2. dana satuan	37,573	OG	187,865,000
	b. pengawalan			
	1. uang saku	7,364	OG	162,008,000
	2. uang makan	7,364	OG	220,216,000
	3. dana satuan	7,364	OG	66,980,000
	c. pengaturan			
	1. uang saku	113,869	OG	1,821,904,000
	2. dana satuan	113,869	OG	569,345,000
	d. patroli			
	1. uang saku	600	OG	13,200,000
	2. uang makan	600	OG	20,400,000
	3. dana satuan	600	OG	3,000,000
VI	Tindak pidana ringan			
	kegiatan tipiring	55	KSS	12,650,000
3131	Penyelenggaraan pengamanan objek vital			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
E	Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja			
	a. rapat penyusunan Rendisgar T.A. 2022	1	GIAT	1,500,000
	b. rapat penyusunan rancangan Renja Satker T.A. 2023	1	GIAT	1,500,000
	c. rapat penyusunan Renja Satker T.A. 2023	1	GIAT	1,500,000
G	Penyusunan evaluasi LKIP			
	rapat penyusunan dan evaluasi LKIP T.A. 2022	1	GIAT	1,500,000
I	Penyusunan naskah buku lainnya			
	a. rapat penyusunan laporan tutup buku semester I T.A. 2022	1	GIAT	1,500,000
	b. rapat penyusunan laporan tutup buku semester II T.A. 2022	1	GIAT	1,500,000
GE	Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli (PNBP)			
	a. patroli fungsi Pamobvit			
	1. uang saku	960	OG	21,120,000
	2. uang makan	960	OG	32,640,000
	3. dana satuan	960	OG	4,800,000
	b. tambahan patroli			
	1. uang saku	1	OG	22,000
	2. uang makan	1	OG	27,000
	3. dana satuan	1	OG	4,000
IE	Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli Polres (PNBP)			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	menyelenggarakan turwali fungsi Obvit			
	a. uang saku	6,272	OG	140,088,000
	b. uang makan	6,272	OG	211,144,000
	c. dana satuan	6,272	OG	31,360,000
	d. tambahan uang makan	2	OG	60,000
UT	Penyelenggaraan PNBPN Pamobvitnas/tertentu			
	a. honor Bendahara penerimaan	96	OB	26,840,000
	b. bantuan pengamanan Obvit/Obvitnas	71	OBYEK	7,420,834,000
Y	Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang			
	pengepakan/pengiriman/kawat	25	KG	500,000
BV	Supervisi			
	supervisi	1	GIAT	86,770,000
FS	Dukopsnal Satker			
	Dukopsnal Satker	1	PKT	165,202,000
FY	ULP non organik / jaga fungsi			
	ULP non organik	730	OH	45,990,000
GO	Pembinaan fungsi-fungsi			
	a. Bag Binopsnal			
	1. pembinaan kemampuan Walpri dan Pam VIP	1	PKT	13,140,000
	2. pembinaan kemampuan menembak	1	PKT	9,618,000
	3. honor instruktur Walpri dan Pam VIP	15	OH	3,000,000
	4. honor instruktur menembak	8	OH	1,600,000
	b. Subdit Audit			
	koordinasi penerapan SMP	1	PKT	11,000,000
	c. Subdit Wisata			
	1. koordinasi di wilayah daratan	1	PKT	27,200,000
	2. wilayah kepulauan	1	PKT	6,620,000
	d. Subdit Waster			
	1. koordinasi/pengecekan personil di wilayah Polres Kolaka Utara	1	PKT	14,040,000
	2. asistensi Sispamobvit	1	PKT	20,400,000
	e. Subdit VIP			
	koordinasi lembaga pemerintahan di wilayah hukum Polda Sultra	1	PKT	22,346,000
JZ	Honorarium sai/Sakpa/simak/smap/pengelola keuangan			
	a. honor operator Sakpa	12	OB	1,800,000
	b. honor operator Simak BMN	12	OB	1,800,000
	c. honor operator e-Monev	12	OB	3,600,000
	d. honor operator Sirena	12	OB	3,600,000
TV	Penyusunan perjanjian kinerja			
	rapat penyusunan penetapan kinerja dan ren aksi Satker T.A. 2022	1	GIAT	1,500,000
3133	peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas			
003	dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
B	honor PNBPN			
	a. Polda			
	1. honor Bendahara penerimaan	12	OB	6,000,000
	2. honor pembantu Bendahara penerimaan BPKB	12	OB	4,440,000
	3. honor pembantu Benma STNK/STCK	24	OB	8,880,000
	4. honor pembantu Benma TNKB	12	OB	3,600,000
	5. honor pengelola materil SBST	48	OB	12,000,000
	6. honor petugas pelaksana Samsat type D	288	OB	86,400,000
	b. Polres			
	1. honor Bendahara penerimaan	144	OB	72,000,000
	2. honor pembantu Bendahara penerimaan SIM	96	OB	35,520,000
	3. honor pembantu Bendahara penerimaan STNK	84	OB	31,080,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	atau STCK			
	4. honor pembantu Bendahara penerimaan BPKB	60	OB	20,760,000
	5. honor pembantu Bendahara penerimaan TNKB Polres	72	OB	18,000,000
	6. honor petugas pelaksana SIM level II	768	OB	219,600,000
	7. honor petugas pelaksana Samsat type E	300	OB	75,000,000
	8. honor petugas pelaksanaan Satpas keliling	48	OB	12,000,000
BO	Biaya listrik			
	biaya listrik Satpas	1	THN	118,708,000
BP	Biaya telepon			
	biaya telepon dan internet Satpas	1	THN	34,272,000
FS	Dukungan operasional Satker			
	Dukopsnal Satker	1	PKT	323,760,000
FV	Menyelenggarakan operasi kepolisian			
	Polda Sultra			
	a. Operasi Simpatik, Patuh dan Patuh			
	1. Latpra Ops Fungsi Lantas			
	a) uang makan / makan operasi	150	OH	12,300,000
	b) snack dan drink peserta operasi	150	OH	4,350,000
	c) alins dan alongins	150	ORG	1,950,000
	d) Minlat	150	ORG	1,350,000
	e) honor instruktur	24	OJ	1,800,000
	2. operasi Simpatik			
	a) uang saku	1,050	OH	42,000,000
	b) dana satuan	1,050	OH	19,950,000
	c) makan / uang makan operasi	1,050	OH	86,100,000
	d) Bekkes	1,050	OH	8,400,000
	3. operasi Patuh			
	a) uang saku	700	OH	28,000,000
	b) dana satuan	700	OH	13,300,000
	c) makan operasi / uang makan operasi	700	OH	57,400,000
	d) Bekkes	700	OH	5,600,000
	4. operasi Zebra			
	a) uang saku	700	OH	28,000,000
	b) dana satuan	700	OH	13,300,000
	c) makan operasi / uang makan operasi	700	OH	57,400,000
	d) Bekkes	700	OH	5,600,000
	Polres			
	a. Ops Simpatik			
	1. Latpra Ops			
	a) uang makan	286	OH	23,406,000
	b) snack dan drink	286	OH	8,179,000
	c) alins alongins / minlat	286	OH	4,942,000
	d) honor instruktur	96	OJ	7,186,000
	e) Minlat	136		1,224,000
	2. Duk Ops			
	a) uang saku	5,327	OH	213,080,000
	b) dana satuan	5,327	OH	99,799,000
	c) makan operasi / uang makan operasi	5,327	OH	436,170,000
	d) Bekkes	5,327	OH	41,650,000
	b. Ops Patuh			
	1. Latpra Ops			
	a) uang makan	254	OH	20,828,000
	b) snack dan drink	254	OH	7,366,000
	c) alins alongins / minlat	247	OH	4,697,000
	d) honor instruktur	103	OJ	6,930,000
	e) Minlat	129	ORG	1,161,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	2. Duk Ops			
	a) uang saku	3,556	OH	142,240,000
	b) dana satuan	3,556	OH	67,564,000
	c) makan operasi / uang makan operasi	3,556	OH	291,592,000
	d) Bekkes	3,556	OH	28,448,000
	c. Ops Zebra			
	1. latpra ops			
	a) uang makan	254	OH	20,828,000
	b) snack dan drink	254	OH	7,366,000
	c) alins alongins / minlat	247	OH	4,697,000
	d) honor instruktur	103	OJ	6,930,000
	e) Minlat	129		1,161,000
	2. Duk Ops			
	a) uang saku	3,556	OH	142,240,000
	b) dana satuan	3,556	OH	67,564,000
	c) makan operasi / uang makan operasi	3,556	OH	291,592,000
	d) Bekkes	3,556	OH	28,448,000
GH	Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan patroli lintas (PNBP)			
	a. Giat pengaturan			
	1. uang saku	14,600	OG	233,600,000
	2. dana satuan	14,600	OG	73,000,000
	b. Giat pengawasan			
	1. uang saku	1,280	OG	28,160,000
	2. uang makan	1,280	OG	43,520,000
	3. dana satuan	1,280	OG	6,400,000
	c. Giat patroli			
	1. uang saku	10,950	OG	240,900,000
	2. uang makan	10,950	OG	372,300,000
	3. dana satuan	10,950	OG	54,750,000
GI	Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan patroli lintas Polres (PNBP)			
	a. pengaturan			
	1. uang saku	27,720	OG	443,520,000
	2. dana satuan	27,720	OG	138,600,000
	b. pengawasan			
	1. uang saku	360	OG	7,920,000
	2. uang makan	360	OG	12,240,000
	3. dana satuan	360	OG	1,800,000
	c. patroli			
	1. uang saku	32,568	OG	716,496,000
	2. uang makan	32,568	OG	1,107,312,000
	3. dana satuan	32,568	OG	162,840,000
GL	Pembinaan lalu lintas			
	a. Dikmas Lintas			
	1. Polsanak	1	PKT	16,820,000
	2. Prasjal	1	PKT	25,678,000
	3. police go to school / campus	1	PKT	6,330,000
	4. Askomtiban	1	PKT	4,152,000
	5. penyuluhan pangkalan ojek / terminal	1	PKT	7,020,000
	b. kegiatan Kamseltibcar Lintas			
	1. survey jalan	1	PKT	42,953,000
	2. Giat andalalin	1	PKT	15,453,000
	3. kegiatan sarang Lintas	1	PKT	18,162,000
	4. pembinaan teknis lalulintas	1	PKT	45,647,000
	c. Polres			
	1. Dikmas Lintas sekolah	355	GIAT	532,275,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	2. Giat sosialisasi	24	GIAT	98,200,000
	3. Dikmas Lantas Polsek	10	GIAT	7,000,000
GT	Sentra pelayanan kepolisian			
	a. honor operator data Lakalantas online	312	OB	93,600,000
	b. biaya pulsa operasional tablet pendataan Lakalantas	204	BULAN	20,400,000
3134	Penyelenggaraan kepolisian perairan			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
GB	Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli			
	a. patroli perairan			
	1. uang saku	1,744	OG	38,368,000
	2. uang makan	1,744	OG	59,296,000
	3. dana satuan	1,744	OG	8,720,000
	b. tambahan patroli perairan			
	1. uang saku	4	OG	60,000
	2. uang makan	4	OG	80,000
	3. dana satuan	4	OG	14,000
IE	Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli Polres (PNBP)			
	Satpolairud			
	a. penjagaan			
	1. uang saku	1,864	OG	29,824,000
	2. dana satuan	1,864	OG	9,320,000
	b. patroli			
	1. uang saku	480	OG	10,560,000
	2. uang makan	480	OG	16,320,000
	3. dana satuan	480	OG	2,400,000
3150	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
KS	Lidik taktis intel			
	lidik taktis	216	OH	228,312,000
LE	Penggalangan intelijen sasaran perorangan			
	penggalangan sasaran perorangan	5	GIAT	114,780,000
LH	Penggalangan intelijen sasaran kelompok			
	penggalangan sasaran kelompok	5	GIAT	161,095,000
LO	Kontra intelijen			
	Kontra intlijen	40	OG	1,148,000,000
LQ	Tukjar Binjar intelijen khusus			
	Tukjar dan Binjar tingkat Polda			
	a. spoting personel			
	spoting personel (dalam bentuk lidik Polda)	8	OH	8,312,000
	b. pengerahan massa			
	1. Korlap	20	OG	2,000,000
	2. anggota	400	OG	20,000,000
	c. dana pembinaan jaringan			
	1. jaringan tahun 2020	24	OB	12,000,000
	2. jaringan tahun 2021	32	OB	16,000,000
LR	Penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus			
	penggalangan intelijen sasaran perorangan khusus	5	GIAT	443,410,000
LS	Penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus			
	penggalangan intelijen sasaran kelompok khusus	4	GIAT	680,160,000
5076	Pembinaan potensi keamanan			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
BV	Supervisi			
	supervisi	1		41,933,000
DY	Kegiatan pembinaan			
	a. Giat pembinaan Saka bhayangkara	472	GIAT	825,142,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	b. Giat pembinaan polisi cilik	225	GIAT	348,859,000
	c. Giat penyuluhan Narkoba	101	GIAT	192,148,000
	d. Giat Anev Bhabinkamtibmas			
FA	Pembentukan dan pembinaan kelompok pengamanan swakarsa (Polres)			26,708,000
	Giat Binkamsa			
	a. uang saku	1,336	GIAT	27,092,000
	b. uang makan	1,336	GIAT	27,024,000
	c. dana satuan	1,336	GIAT	5,626,000
	d. sarana kontak	1	THN	91,191,000
FB	pembentukan dan pembinaan kelompok pengamanan swakarsa (Polsek)			
	Giat Binkamsa			
	a. uang saku	12,256	GIAT	249,708,000
	b. uang makan	12,256	GIAT	257,312,000
	c. dana satuan	12,256	GIAT	52,086,000
	d. sarana kontak	893	THN	601,816,000
FC	Pemberdayaan kemitraan dengan lembaga pendidikan, tokoh Masy, lembaga pendidikan, instansi dan swasta			
	Giat saka bhayangkara			
	a. pelatihan pamong saka			
	1. makan peserta perjusami	108	OH	4,536,000
	2. snack peserta	108	OH	2,160,000
	3. insentif pelatih	12	THN	9,000,000
	4. ATK pelatihan	2	THN	4,367,000
	b. Giat Pocil			
	lomba Pocil tingkat Polda Sultra	1	PKT	17,482,000
	c. Giat saka Bhayangkara			
	jaldi Perjusami	2	OG	32,006,000
	d. Giat Pocil			
	jaldi pemantauan pocil 12 Polres	1	THN	41,031,000
FD	pemberdayaan kemitraan dengan lembaga Pend, Masy, tokoh Masy, Insts, swasta, jasa pengaman, tokoh agama LSM (Polres)			
	a. Giat Bintibmas			
	1. uang saku	1,266	OG	25,692,000
	2. uang makan	1,266	OG	25,764,000
	3. dana satuan	1,266	OG	5,346,000
	4. sarana kontak	1	THN	88,269,000
	b. Giat Binspolmas			
	1. uang saku	1,266	OG	25,692,000
	2. uang makan	1,266	OG	25,764,000
	3. dana satuan	1,266	OG	5,346,000
	4. sarana kontak	1	THN	92,132,000
FE	Pemberdayaan kemitraan dengan lembaga Pend, Masy, tokoh Masy, Insts, swasta, jasa pengaman, tokoh agama LSM (Polsek)			
	a. Giat Bintibmas			
	1. uang saku	12,046	OG	245,508,000
	2. uang makan	12,046	OG	253,532,000
	3. dana satuan	12,046	OG	51,246,000
	4. sarana kontak	1	THN	568,621,000
	b. Giat Binspolmas			
	1. uang saku	12,046	OG	245,508,000
	2. uang makan	12,046	OG	253,532,000
	3. dana satuan	12,046	OG	51,246,000
	4. sarana kontak	1	THN	553,854,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
GO	Pembinaan fungsi-fungsi			
	a. kegiatan Binsatpam/Polsus			
	pembinaan satuan pengamanan	1	PKT	37,765,000
	b. kegiatan Binpolmas			
	1. pembinaan Ormas dan Kommas TK. Prov Sultra	1	PKT	47,232,000
	2. asistensi Binpolmas	1	PKT	183,424,000
	c. kegiatan Bintibsos			
	pembinaan peningkatan kemampuan dasar kepolisian mahasiswa Bhayangkara	1	PKT	26,811,000
	d. Giat Bhabinkamtibmas			
	1. peningkatan kemampuan dai Kamtibmas melalui pondok pesantren	1	PKT	52,407,000
	2. in house training	1	PKT	13,900,000
	3. honor tenaga pengajar Mahabhara	10	OG	6,000,000
	4. honor panitia/pengasuh dai Bhabinkamtibmas	18	OG	13,500,000
IW	Operasional bhabinkamtibmas			
	dukungan Opsnal Bhabinkamtibmas			
	a. uang makan	148,106	OH	4,443,180,000
	b. dana satuan	148,106	OH	5,183,710,000
IX	Operasi Binmas			
	a. Ops Binmas			
	1. Ops Kewilayahan Latpra Ops			
	a) uang makan/makan latpra ops	238	OH	19,516,000
	b) snack/drink	238	OH	6,902,000
	c) alin/alongis	238	OH	5,236,000
	d) honor instruktur	56	OH	4,200,000
	2. dukungan operasi Binmas			
	a) uang makan operasi /uang operasi	2,380	OH	195,160,000
	b) uang saku	2,380	OH	95,200,000
	c) dana satuan	2,380	OH	45,220,000
	d) bekal kesehatan	2,380	OH	19,040,000
	b. Polres			
	1. Latpra Ops			
	a) uang makan	748	OH	61,336,000
	b) snack dan drink	748	OH	21,692,000
	c) alins atau alongins	748	OH	16,456,000
	d) honor instruktur	160	O/JP	12,000,000
	2. Dukops Binmas			
	a) uang saku	7,480	OH	299,200,000
	b) dana satuan	7,480	OH	231,580,000
	c) makan operasi / uang makan operasi	7,480	OH	523,900,000
	d) Bekkes	7,480	OH	59,840,000
IY	Focus Group Discussion (FGD)			
	a. kegiatan FGD Polda	4	GIAT	38,850,000
	b. kegiatan FGD Polres	98	GIAT	667,479,000
UX	Penyelenggaraan PNBP fungsi binmas			
	a. pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara atau atasan langsung	12	OB	6,000,000
	b. Bendahara penerimaan	12	OB	4,800,000
	c. petugas penerimaan PNBP atau anggota	12	OB	3,600,000
	d. pemeliharaan			
	1. laptop	1	UT	600,000
	2. PC	1	UT	600,000
	3. printer	1	UT	287,000
	e. rakernis PNBP ke Jakarta			
	tiket pesawat	2	GIAT	7,980,000
	f. jaringan internet			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	pulsa jaringan internet	12	UT	2,520,000
	g. supervisi giat BUJP			
	1. transportasi	168	OK	25,200,000
	2. uang Harian	168	OK	33,600,000
	3. penggantian	5,000	LBR	1,000,000
	4. spanduk	84	LBR	2,100,000
	h. audit rekomendasi BUJP			
	1. transportasi	112	OK	16,800,000
	2. uang Harian	112	OK	39,200,000
	3. penggantian	5,000	LBR	1,000,000
	4. jilid laporan	5	LAP	113,000
5080	Pengendalian operasi kepolisian			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
FV	Menyelenggarakan operasi kepolisian			
	a. Ops Mandiri kewilayahan			
	1. Lat Pra Ops Mandiri kewilayahan			
	a) uang makan	172	OH	14,104,000
	b) snack / drink	172	OH	4,988,000
	c) alins/alongins dan minlat	172	OH	3,784,000
	d) honor instruktur	24	OJ	1,800,000
	2. Duk Ops Mandiri kewilayahan			
	a) uang saku	3,440	OH	137,600,000
	b) dana satuan	3,440	OH	65,360,000
	c) makan Ops/uang makan	3,440	OH	282,080,000
	d) Bekkes	3,440	OH	27,520,000
	e) posko operasi	2	OPS	2,926,000
	b. Polres			
	1. Ops Pekat Anoa			
	a) Latpra Ops			
	1) uang makan	316	OH	25,912,000
	2) snack dan drink	316	OH	9,164,000
	3) alins alongins / minlat	316	OH	6,529,000
	4) honor instruktur	118	O/JP	8,850,000
	5) Minlat	47		423,000
	b) Duk Ops			
	1) uang saku	6,320	OH	252,800,000
	2) makan operasi / uang makan operasi	6,320	OH	460,280,000
	3) dana satuan	6,320	OH	178,040,000
	4) Bekkes	6,320	OH	50,560,000
	2. Operasi Sikat			
	a) Latpra Ops			
	1) uang makan	304	OH	24,928,000
	2) snack dan drink	304	OH	8,816,000
	3) alins alongins / minlat	304	OH	6,265,000
	4) honor instruktur	94	O/JP	7,050,000
	5) minlat	47	OH	423,000
	b) Duk Ops			
	1) uang saku	5,280	OH	211,200,000
	2) makan operasi / uang makan operasi	5,280	OH	375,000,000
	3) dana satuan	5,280	OH	158,280,000
	4) bekkes	5,280	OH	42,240,000
	c) gelar pasukan	1	PKT	5,610,000
	d) Posko pengamanan	1	PKT	8,365,000
TT	Operasi terpusat Lilin			
	operasi Lilin dan tahun baru			
	a. Lat Pra Ops			
	1. uang makan	175	OH	14,350,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	2. snack / drink	175	OH	5,075,000
	3. alins/alongins dan minlat	175	OH	3,850,000
	4. honor instruktur	20	O/JP	1,500,000
	b. uang saku dan uang makan			
	1. uang saku	1,750	OH	70,000,000
	2. dana satuan	1,750	OH	71,050,000
	3. makan ops/uang makan	1,750	OH	105,700,000
	4. Bekkes	1,750	OH	14,000,000
	c. gelar pasukan	2	PKT	40,416,000
	d. Posko pengamanan	2	PKT	13,724,000
	Polres			
	operasi lilin			
	a. Latpra Ops			
	1. uang makan	652	OH	53,464,000
	2. snack drink	652	OH	18,908,000
	3. alins alongins / minlat	652	OH	14,344,000
	4. honor instruktur	84	O/JP	6,300,000
	b. Duk Ops			
	1. uang saku	6,520	OH	260,800,000
	2. makan operasi / uang makan operasi	6,520	OH	408,010,000
	3. dana satuan	6,520	OH	250,510,000
	4. Bekkes	6,520	OH	52,160,000
	c. gelar pasukan	10	PKT	37,954,000
	d. Posko pengamanan	7	PKT	42,020,000
TU	Operasi Terpusat Ketupat			
	a. Lat Pra Ops			
	1. uang makan	137	OH	11,234,000
	2. snack / drink	137	OH	3,973,000
	3. alins/alongins dan minlat	137	OH	3,014,000
	4. honor instruktur	12	OH	900,000
	b. Dukungan operasi			
	1. uang saku	2,192	OH	87,680,000
	2. dana satuan	2,192	OH	41,648,000
	3. makan ops/uang makan	2,192	OH	179,744,000
	4. Bekkes	2,192	OH	17,536,000
	c. gelar pasukan	1	PKT	13,848,000
	d. Posko	1	PKT	12,585,000
	Polres			
	a. Latpra Ops			
	1. uang makan	903	OH	74,046,000
	2. snack drink	903	OH	26,187,000
	3. alins alongins / minlat	903	OH	19,866,000
	4. honor instruktur	102	O/JP	7,650,000
	b. Duk Ops			
	1. uang saku	13,770	OH	550,800,000
	2. makan operasi / uang makan operasi	13,770	OH	914,436,000
	3. dana satuan	13,770	OH	476,334,000
	4. Bekkes	13,770	OH	110,160,000
	c. gelar pasukan	11	PKT	45,631,000
	d. Posko pengamanan	9	PKT	59,969,000
5081	Pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
GQ	Pelayanan kesehatan dan makan satwa			
	ULP satwa			
	a. makan satwa	3,650	EH	182,500,000
	b. obat-obatan dan sanitasi	3,650	EH	73,000,000
5087	Penanggulangan keamanan dalam negeri			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
Q	Dukungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan			
	PPGD/Keslap/P3K			
	a. Keslap rutin			
	1. uang makan	72	OG	1,440,000
	2. uang saku	72	OG	1,152,000
	3. dukungan obat-obatan	72	OG	14,400,000
	4. Alkes habis pakai	72	OG	5,616,000
	b. Keslap khusus			
	1. uang makan	6	OG	120,000
	2. uang saku	6	OG	96,000
	3. dukungan obat-obatan	6	OG	1,200,000
	4. Alkes habis pakai	6	OG	468,000
S	Menyelenggarakan Humas			
	produksi film sebagai bahan publikasi kinerja Polri di media online internal dan eksternal			
	a. pre-pro meeting	12	OB	2,400,000
	b. sewa peralatan	6	BLN	54,000,000
	c. sutradara	6	OB	1,800,000
	d. penulis naskah/skenario	6	OB	1,200,000
	e. artis/pemeran obyek liputan	6	OB	1,200,000
	f. crew/peliput/cameramen/lighting/audioman	18	OB	2,700,000
	g. post production/editing/mastering	6	OB	9,000,000
DB	Sidang disiplin			
	a. biaya pelaksanaan pemeriksaan s/d pemberkasan	15	KSS	14,250,000
	b. pelaksanaan sidang disiplin	1	PKT	15,844,000
DD	Pengawasan dan pembinaan			
	patroli dan pengawasan personil Satbrimob			
	a. uang makan	480	OG	9,600,000
	b. uang saku	480	OG	7,680,000
	c. dana satuan	480	OG	2,400,000
DX	Peningkatan kemampuan personel Satker			
	a. Bag Operasi			
	1. latihan PHH			
	a) makan peserta	550	OK	20,900,000
	b) snack peserta	550	OK	4,950,000
	c) Minlat	1	GIAT	500,000
	d) spanduk latihan	1	LMBR	2,000,000
	2. latihan KLBM			
	a) makan peserta	225	OK	8,550,000
	b) snack peserta	225	OK	2,025,000
	c) Minlat	1	GIAT	500,000
	d) spanduk latihan	1	LMBR	2,000,000
	3. latihan Jibom			
	a) makan peserta	175	OK	6,650,000
	b) snack peserta	175	OK	1,575,000
	c) Minlat	1	GIAT	500,000
	d) spanduk latihan	1	LMBR	2,000,000
	4. latihan KBR			
	a) makan peserta	175	OK	6,650,000
	b) snack peserta	175	OK	1,575,000
	c) Minlat	1	GIAT	500,000
	d) spanduk latihan	1	LMBR	2,000,000
	5. latihan selam dasar			
	a) makan peserta	125	OK	4,750,000
	b) snack peserta	125	OK	1,125,000
	c) Minlat	1	GIAT	500,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	d) spanduk latihan	1	GIAT	2,000,000
	a) alins alongins	1	GIAT	24,725,000
	6. latihan Wanteror			
	a) makan peserta	175	OK	6,650,000
	b) snack peserta	175	OK	1,575,000
	c) Minlat	1	GIAT	500,000
	d) spanduk latihan	1	LMBR	2,000,000
	b. Batalyon B Pelopor (Batauga)			
	1. latihan PHH			
	a) makan peserta	375	OK	14,250,000
	b) snack peserta	375	OK	3,375,000
	c) Minlat	1	GIAT	500,000
	d) spanduk latihan	1	LMBR	675,000
	2. latihan KLBM			
	a) makan peserta	200	OK	7,600,000
	b) snack peserta	200	OK	1,800,000
	c) Minlat	1	GIAT	500,000
	d) spanduk latihan	1	LMBR	680,000
	c. Kompi 1 Batalyon C Pelopor (Totallang)			
	latihan KLBM			
	a) makan peserta	175	OK	6,650,000
	b) snack peserta	175	OK	1,575,000
	c) Minlat	1	GIAT	500,000
	d) spanduk latihan	1	LMBR	500,000
	belanja honor output kegiatan			
	a. Bag Operasi			
	1. honor instruktur latihan PHH	40	OJP	2,000,000
	2. honor instruktur latihan KLBM	40	OJP	2,000,000
	3. honor instruktur latihan Jibom	40	OJP	2,000,000
	4. honor instruktur latihan KBR	40	OJP	2,000,000
	5. honor instruktur latihan selam dasar	40	OJP	2,000,000
	6. honor instruktur latihan Wanteror	40	OJP	2,000,000
	b. Batalyon B Pelopor (Batauga)			
	1. honor instruktur latihan PHH	40	OJP	2,000,000
	2. honor instruktur latihan KLBM	40	OJP	2,000,000
	c. Kompi 1 Batalyon C Pelopor (Totallang)			
	honor instruktur latihan KLBM	40	OJP	2,000,000
EN	Deteksi kegiatan masyarakat			
	a. Giat intelijen			
	1. Pulbaket	150	LAP	19,500,000
	2. laporan intelijen	109	BRKS	20,710,000
	b. Giat taktis intelijen			
	deteksi dan penyelidikan intelijen	12	GIAT	48,000,000
	c. pembentukan jaringan			
	pembentukan jaringan intelijen	11	GIAT	44,000,000
	d. deteksi dan penyelidikan konflik sosial			
	1. uang makan	30	OH	1,500,000
	2. uang saku	30	OH	2,250,000
	3. biaya transportasi agen	30	OH	3,750,000
	4. biaya penginapan / safe house agen	15	OH	6,000,000
	5. pulsa agen	5	ORG	500,000
	6. makan jaringan	12	OH	420,000
GB	Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patrol			
	a. Bag Operasi			
	patroli (Kendari)			
	1. uang saku	791	OG	13,447,000
	2. uang makan	791	OG	24,521,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	3. dana satuan	791	OG	3,955,000
	b. Batalyon C Pelopor			
	patroli Kompi 1 Batalyon C Pelopor			
	1. uang saku	440	OG	7,480,000
	2. uang makan	440	OG	13,640,000
	3. dana satuan	440	OG	2,200,000
	c. Batalyon B Pelopor			
	Patroli Batalyon B Batauga			
	1. uang saku	550	OG	9,350,000
	2. uang makan	550	OG	17,050,000
	3. dana satuan	550	OG	2,750,000
GR	peningkatan kualitas pelayanan publik			
	Siaga Brimob			
	a. uang makan	3,200	OG	99,200,000
	b. uang saku	3,200	OG	54,400,000
GS	Bantuan pelayanan masyarakat			
	a. kegiatan bantuan Unit Wanteror			
	1. uang makan	120	OG	4,200,000
	2. uang saku	120	OG	2,400,000
	3. dana satuan	120	OG	600,000
	b. kegiatan bantuan Unit Jibom (sterilisasi)			
	1. uang makan	120	OG	4,200,000
	2. uang saku	120	OG	2,400,000
	3. dana satuan	120	OG	600,000
	c. kegiatan bantuan Unit KBR			
	1. uang makan	120	OG	4,200,000
	2. uang saku	120	OG	2,400,000
	3. dana satuan	120	OG	600,000
GV	pengendalian massa/pam unjuk rasa			
	a. uang makan	600	OG	14,700,000
	b. uang saku	600	OG	9,600,000

e. Program Dukungan Manajemen.

1) tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerjasama lintas sektor.

2) kegiatan:

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
060.01.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
3068	Pelayanan administrasi keuangan Polri			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
R	Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah			
	kegiatan rapat penyusunan Lapkeu semester I dan II	2	GIAT	29,862,000
FS	Dukungan operasional Satker			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	Dukopsnal Satker	1	PKT	99,638,000
GO	Pembinaan fungsi-fungsi			
	a. rapat Kabidku dan staf dalam rangka Bintehnis keuangan	4	GIAT	2,520,000
	b. rapat staf Bidku Kaur/ Kasi Keu, operator Simak-BMN dan operator SAKPA/ SAIBA	4	GIAT	77,480,000
3070	Penerangan masyarakat			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
AJ	Penyelenggaraan Humas, protokol dan pemberitaan			
	a. Polda			
	1. pers release Polda	1	PKT	75,000,000
	2. press confrence tahunan	1	PKT	12,487,000
	3. penyediaan informasi dokumentasi multimedia	1	PKT	118,158,000
	4. promosi (subdit penmas)	1	PKT	83,526,000
	b. Polres			
	1. press release	4	PKT	116,122,000
	2. produk video informasi edukasi masyarakat	8	PKT	220,709,000
	3. laporan pembuatan narasi atau berita atau artikel atau opini pada akun media sosial facebook, instagram, twiter, dan	8	PKT	111,802,000
	4. laporan pembuatan narasi akun media dalam jaringan atau media online berupa konter opini atau kontra narasi atau berita	6	PKT	57,966,000
	5. giat patroli siber	1	PKT	3,696,000
	6. pelayanan informasi publik	7	PKT	75,093,000
	7. biaya produksi	7	PKT	108,333,000
	8. pengadaan barang habis pakai	5	PKT	9,352,000
	9. kemitraan dengan wartawan	1	PKT	14,304,000
	10. produk infografi edukasi masyarakat	7	PKT	133,392,000
	11. cetak kalender tahun 2022	1	PKT	7,760,000
	12. belanja barang penyimpan data	1	PKT	3,000,000
	c. Polsek			
	1. produk video informasi edukasi masyarakat	1	PKT	7,840,000
	2. produk infografis edukasi masyarakat	1	PKT	6,240,000
	3. kegiatan pengelolaan media sosial dan media dalam jaringan Polri Humas Polri	1	PKT	2,400,000
	4. kegiatan pengelolaan media sosial dan media dalam jaringan Polri Humas Polri berupa konter opini berdasarkan top iss	1	PKT	2,400,000
	5. pelayanan informasi publik dan pemberitaan pelayananan informasi publik			
3071	Penyelenggaraan teknologi informasi			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
BM	Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi			
	biaya Jaldis	1	PKT	27,000,000
3072	Pelayanan kesehatan Polri			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
A	Pembayaran gaji dan tunjangan BLU			
	a. gaji dan tunjangan BLU	1	THN	1,427,000,000
	b. belanja makan karyawan BLU	47,450	OG	711,750,000
P	Makan pasien			
	belanja bahan makan pasien	1	THN	1,050,000,000
Q	Dukungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan			
	a. pembinaan kesehatan gigi/kesehatan kesemaptaan gigi dan mulut (dental fitnes)			
	pembinaan kesehatan gigi/kesehatan			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	kesemaptan gigi dan mulut (dental fitnes)			
	pembinaan kesehatan gigi	100	ORG	5,100,000
	b. pelayanan kesehatan kerja			
	1. kuratif dan rehabilitasi			
	a) penyakit/kecelakaan tanpa tindakan operasi	2	ORG	6,000,000
	b) penyakit/kecelakaan dengan tindakan operasi mulai operasi ringan sampai operasi berat	2	ORG	20,000,000
	2. promotif dan preventif			
	a) CA cerviks	15	ORG	13,350,000
	b) hepatitis B	20	ORG	6,600,000
	c. pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan operasi Polri			
	a. pelayanan kesehatan dengan sarpras yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi pasien			
	a) pemeriksaan penunjang	1	ORG	10,000,000
	b) tindakan medis/operasi	1	ORG	50,000,000
	c) konsultasi dan pemeriksaan dokter spesialis	1	ORG	2,000,000
	d) obat dan Alkes habis pakai	1	ORG	3,000,000
	e) rawat inap pasien 5 Hari	1	ORG	5,000,000
	f) kontrol	1	ORG	341,000
	b. pelaksanaan pemberantasan nyamuk dan serangga lainnya dilingkungan kerja, lembaga pendidikan dan asrama			
	a) campuran fogging	68	HA	62,016,000
	b) bahan bakar minyak	68	HA	816,000
	c) obat anti larvasida dan serangga	68	HA	11,968,000
	d. pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan kepolisian (Dokpol)			
	1. pelayanan kesehatan Kamtibmas			
	a) Keslap rutin	180	GIAT	54,000,000
	b) Keslap khusus	10	GIAT	12,000,000
	c) pengamanan makanan vip/vvip	2	GIAT	3,000,000
	d) geomedicine	1	GIAT	10,000,000
	e) deteksi dini Narkoba	200	GIAT	40,000,000
	2. pelayanan kedokteran forensik			
	a) otopsi korban mati	2	ORG	5,000,000
	b) pemeriksaan luar korban mati	5	ORG	3,825,000
	c) gali kubur/eksHumasi luar kota	4	ORG	19,100,000
	d) olah TKP aspek medik dalam kota	3	ORG	2,700,000
	e) pengambilan sampel dalam rangka pemeriksaan lab dan penunjang lainnya	10	ORG	3,250,000
	f) Rikkes rutin tahanan	500	ORG	10,000,000
	g) penerbitan surat keterangan medis tersangka kasus kedokteran forensik	5	ORG	500,000
	3. pelayanan DVI			
	a) pemeriksaan anti mortem dan post mortem pemeriksaan jenazah	5	GIAT	2,500,000
	b) pemeriksaan anti mortem dan post mortem pemulasaran jenazah	5	GIAT	15,000,000
	c) kantong jenazah	5	BUAH	1,250,000
	e. kegiatan lembaga kesehatan kepolisian			
	1. pelayanan ident gigi dan penyimpanan database odontogram bagi anggota Polri kelompok masyarakat dgn resiko tinggi			
	a) pembuatan odontogram sederhana	200	ORG	10,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	b) dukungan operasional BPJS (termasuk jasa medis yankes dan ops layanan)	1	THN	1,132,080,000
	c) dukungan operasional BPJS (klaim non kapitasi)	300	GIAT	30,000,000
	f. dukungan obat-obatan			
	1. pengadaan obat dan BHP	1	THN	548,146,000
	2. dukungan operasional fungsi kepolisian	1		100,000,000
	g. pelayanan Dokpol			
	1. kedokteran forensik			
	a) pembuatan visum et repertum (VER)			
	1) pemeriksaan luar (orang hidup)	980	ORG	294,000,000
	2) pemeriksaan luar jenazah (dalam kota)	24	ORG	12,000,000
	3) pemeriksaan dalam jenazah/otopsi (dalam kota)	12	ORG	24,000,000
	b) pelayanan kesehatan korban kekerasan pada wanita dan anak yang tidak ditanggung oleh BPJS			
	1) non KDRT dewasa	9	ORG	2,700,000
	2) non KDRT anak	9	ORG	2,700,000
	3) KDRT dewasa	8	ORG	2,400,000
	4) KDRT anak	8	ORG	2,400,000
	c) pelayanan kesehatan tahanan			
	1) rawat inap tahanan dengan tindakan operasi	2	OP	14,750,000
	2) rawat inap tahanan tanpa tindakan operasi	5	OP	14,325,000
	3) pemeriksaan kesehatan rutin	200	OK	3,000,000
	2. kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat			
	a) deteksi dini Narkoba	600	ORG	108,000,000
	b) geomedicine	1	GIAT	9,000,000
	c) pelayanan kesehatan lapangan (Keslap)	50	GIAT	13,900,000
AC	Pertemuan/jamuan delegasi/tamu			
	belanja biaya penerimaan tamu	1	THN	50,000,000
AD	Rapat rapat koordinasi / konsultasi			
	biaya rapat Pokja Sun RBA T.A. 2022	1	THN	7,950,000
AH	Pembinaan sistem dan manajemen			
	a. biaya pemilihan pegawai/ karyawan dan ruangan teladan	1	THN	30,000,000
	b. biaya studi banding BLU dan akreditasi	1	THN	100,000,000
	c. subsidi pasien dinas dan BPJS	1	THN	310,000,000
	d. belanja biaya audit eksternal	1	THN	45,000,000
	e. pengadaan baju olahraga karyawan BLU	200	OG	35,000,000
	f. akreditasi rumah sakit KARS V. 2012	1	THN	200,000,000
	g. belanja fotocopy dan jilid	1	THN	30,000,000
	h. belanja pembayaran iuran BPJS karyawan BLU	1	THN	90,000,000
	i. promotif preventif (vaksin hepatitis karyawan BLU)	175	ORG	28,000,000
AI	Pemeriksaan kesehatan			
	a. administrasi kegiatan			
	1. panitia pengadaan barang dan jasa	5	OP	5,450,000
	2. panitia penerima hasil pekerjaan	3	OP	2,730,000
	b. pelayanan kesehatan kesamaptaan Polri			
	1. Rikkes berkala			
	a) Intensif I	940	ORG	1,673,200,000
	b) Intensif II	886	ORG	1,061,428,000
	c) Intensif III	200	ORG	178,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	2. Rikkes tambahan (plus)			
	a) pemeriksaan mata (slit lamp)	10	ORG	500,000
	b) pemeriksaan THT (audiometri)	10	ORG	600,000
	c) pemeriksaan paru	10	ORG	500,000
	d) HBSAG	10	ORG	1,100,000
	e) USG abdomen	10	ORG	3,300,000
	f) echokardiografi	10	ORG	3,300,000
	3. Rikkes pengendalian berat badan dan pencegahan penyakit degeneratif			
	a) rontgen	20	ORG	2,400,000
	b) pemeriksaan EKG	20	ORG	1,000,000
	c) pemeriksaan Lab	20	ORG	2,600,000
	d) HBSAG	20	ORG	1,000,000
	e) anti HIV	20	ORG	1,400,000
	f) VDRL	20	ORG	800,000
	g) pemeriksaan komposisi tubuh, kesamaptan dan konsultasi	20	ORG	2,300,000
	h) BHP pemeriksaan fisik	20	ORG	200,000
	i) konsumsi	20	ORG	300,000
	j) ATK	20	ORG	80,000
	c. pelayanan kesehatan			
	1. promotif preventif			
	vaksin CA cervix	20	ORG	52,000,000
	2. kuratif dan rehabilitatif			
	a) penyakit/kecelakaan tanpa tindakan operasi	5	ORG	21,480,000
	b) penyakit/kecelakaan dengan tindakan mulai operasi ringan sampai khusus	1	ORG	29,376,000
	3. penyakit tertentu di luar BPJS (karena tugas)			
	a) pengobatan pada tugas operasi dalam negeri	4	ORG	21,200,000
	b) Ralan TK lanjut/orang/kunjungan bagi siswa Diktuk	18	KNJGN	6,174,000
	c) Ranap bagi siswa diktuk/orang/Hari	8	ORG	16,000,000
	d) heat stroke / orang	2	ORG	6,000,000
	4. rehabilitasi Narkoba bagi personil akibat pelaksanaan tugas di bidang Narkoba			
	a) evakuasi dan perawatan ke rehabilitasi social	2	ORG	11,200,000
	b) rawat jalan/assesmen/tes urine	2	ORG	400,000
	5. pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan operasi Polri			
	pelayanan kesehatan dengan sarana dan prasarana yang lebih tinggi sesuai kondisi pasien	2	ORG	120,400,000
	6. pembinaan kesehatan gigi pegawai negeri pada Polri			
	pembinaan kesehatan gigi	200	ORG	10,000,000
	7. dukungan operasional logistik			
	a) obat vitamin	1,000	ORG	16,000,000
	b) masker	250	ORG	15,500,000
	8. pelayanan kesehatan kesamaptan Polri			
	Rikkes pra nikah	30	ORG	14,610,000
BO	Biaya listrik			
	Biaya listrik	1	THN	300,000,000
BP	biaya telepon			
	biaya pulsa dan telepon	1	THN	40,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
BQ	Biaya air dan gas			
	a. biaya air / PDAM	1	THN	20,000,000
	b. belanja gas medik	1	THN	130,000,000
	c. belanja gas elpiji	1	THN	75,000,000
BR	Sewa jaringan telekomunikasi (leased channel) satelit			
	a. biaya internet (SIM-RS)	1	THN	25,000,000
	b. biaya sewa ip publik (SIM-RS)	1	THN	50,000,000
	c. biaya TV kabel	1	THN	25,000,000
EV	Pengembangan, peningkatan pengakuan sistem akreditasi, sertifikasi standar, PK tingkat bilateral, regional, internasional			
	penyusunan dokumen pokja	1	GIAT	196,733,000
BW	Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor			
	a. pengadaan barang campuran layanan	1	THN	370,000,000
	b. pengadaan barang campuran umum dan administrasi	1	THN	300,000,000
	c. belanja KSO	1	THN	450,000,000
	d. belanja barang dan jasa lain-lain	1	THN	100,000,000
	e. belanja reagen laboratorium	1	THN	100,000,000
	f. belanja sewa alat urologi	1	THN	300,000,000
	g. belanja sewa alat mata	1	THN	130,000,000
	belanja barang persediaan barang konsumsi BLU			
	a. belanja BHP pasien	1	THN	3,750,000,000
	b. belanja barang cetak kantor BLU	1	THN	360,000,000
	c. belanja pengadaan ATK BLU	1	THN	50,000,000
	d. belanja radiologi (film X Ray chemistri).	1	THN	195,000,000
DT	Kerohanian dan keagamaan			
	bimbingan rohani dan jasmani	1	THN	30,000,000
FS	Dukungan operasional Satker			
	Dukopsnal Satker	2	PKT	318,174,000
GS	Bantuan pelayanan masyarakat			
	belanja bhakti kesehatan	1	THN	150,000,000
JV	Obat-obatan / poliklinik			
	belanja obat pasien	1	THN	4,100,000,000
JW	Honorarium medis,paramedis dan nonmedis			
	a. medis	1	THN	6,700,000,000
	b. paramedis	1	THN	4,233,000,000
	c. honor Dewas	12	BLN	120,000,000
	d. honor pengelolaan pengadaan barang dan jasa BLU dan RM	1	THN	280,536,000
	e. honor Bendahara penerimaan BLU / APBN	12	BLN	17,880,000
	f. insentif dokter	1	THN	175,000,000
KE	Pendidikan dan latihan non Polri			
	a. pelatihan satuan pengawasan internal RS			
	1. pendaftaran	1	OG	4,500,000
	2. tiket pesawat	2	OG	3,430,000
	3. taxi kediaman kebandara	2	OG	300,000
	4. taxi hotel bandara	2	OG	300,000
	5. uang Harian	4	OH	1,600,000
	6. penginapan	4	OH	1,400,000
	b. pelatihan radiologi			
	1. pendaftaran	1	OG	4,500,000
	2. tiket pesawat	2	OG	3,550,000
	3. taxi kediaman kebandara	2	OG	300,000
	4. taxi hotel bandara	2	OG	300,000
	5. uang Harian	3	OH	1,200,000
	6. penginapan	2	OH	700,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	c. pelatihan hospital by law			
	1. pendaftaran	1	OG	5,750,000
	2. tiket pesawat	2	OG	3,940,000
	3. taxi kediaman bandara	2	OG	150,000
	4. taxi hotel bandara	2	OG	340,000
	5. uang Harian	3	OH	1,800,000
	6. penginapan	2	OH	800,000
	d. pelatihan SIM RS			
	1. pendaftaran	1	OG	3,500,000
	2. tiket pesawat	2	OG	3,600,000
	3. taxi kediaman bandara	2	OG	150,000
	4. taxi hotel bandara	2	OG	340,000
	5. uang Harian	3	OH	1,290,000
	6. penginapan	2	OH	700,000
	e. pelatihan manajemen keperawatan			
	1. pendaftaran	1	OG	4,500,000
	2. tiket pesawat	2	OG	3,400,000
	3. taxi kediaman bandara	2	OG	150,000
	4. taxi hotel bandara	2	OG	340,000
	5. uang Harian	3	OH	1,200,000
	6. penginapan	2	OH	700,000
	f. pelatihan penyusunan unit cost RS			
	1. pendaftaran	1	OG	3,500,000
	2. tiket pesawat	2	OG	3,400,000
	3. taxi kediaman bandara	2	OG	150,000
	4. taxi hotel bandara	2	OG	340,000
	5. uang Harian	3	OH	1,200,000
	6. penginapan	2	OH	700,000
	g. pelatihan pengelolaan dan manajemen limbah B3			
	1. pendaftaran	1	OG	4,200,000
	2. tiket pesawat	2	OG	2,140,000
	3. taxi kediaman bandara	2	OG	150,000
	4. uang Harian	1	OH	430,000
	5. penginapan	1	OH	250,000
	h. workshop midwifery update			
	pendaftaran	2	OG	4,270,000
3073	Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri			
001	Gaji dan tunjangan			
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			
	a. gaji dan tunjangan	1	THN	403,885,370,000
	b. uang lembur			
	1. GOL I	1,200	OJ	15,600,000
	2. uang makan PNS Gol I	720	OH	25,200,000
	3. Gol II	13,440	OJ	228,480,000
	4. uang makan PNS Gol II	6,720	OH	235,200,000
	5. Gol III	11,256	OJ	225,120,000
	6. uang makan PNS Gol III	5,628	OH	208,236,000
	7. Gol IV	1,120	OJ	27,960,000
	8. uang makan PNS Gol IV	560	OH	22,800,000
	c. lembur PNS pada Hari libur kerja			
	1. Gol I	96	OJ	2,496,000
	2. uang makan pns Gol I	24	OH	840,000
	3. Gol II	960	OJ	32,928,000
	4. uang makan PNS Gol II	432	OH	15,120,000
	5. uang lembur Gol III	1,944	OJ	77,760,000
	6. uang makan lembur	804	OH	29,748,000

d. uang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	d. uang makan anggota Polri			
	1. Pamen / Gol IV	4,440	OH	181,680,000
	2. Pama / Gol III	5,520	OH	200,880,000
	3. Brigadir / Gol II	54,720	OH	1,913,160,000
002	operasional dan pemeliharaan kantor			
BP	Biaya telepon			
	biaya telepon	1	THN	536,370,000
BW	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor			
	ATK rutin Satker	1	THN	671,361,000
BX	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor (Polres)			
	ATK rutin Polres	1	THN	1,681,120,000
BY	Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor (Polsek)			
	a. honor pejabat pembuat komitmen	1	OB	700,000
	b. administrasi pengadaan	1	PKT	100,000
	c. honor pejabat pengadaan	1	OB	450,000
	d. honor panitia penerima hasil pekerjaan	3	OP	750,000
	e. ATK rutin Polsek	130	THN	1,270,240,000
FW	Dukopsnal Polda			
	Dukopsnal Polda Sultra	1	PKT	1,771,000,000
LK	Internet			
	biaya internet	1	THN	3,630,600,000
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
E	Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja			
	a. rapat penyusunan rancangan Renja Polda T.A. 2023	1	GIAT	23,516,000
	b. penyusunan Renja Polda T.A. 2023	1	GIAT	23,356,000
	c. kegiatan penyusunan Domren Kapolda Sultra tahun 2023	1	GIAT	3,128,000
	d. bagdalprogar (giat Sun pagu minus bel pegawai T.A. 2022)	1	GIAT	20,000,000
	e. rapat penyusunan rancangan Renja Satker T.A. 2023	23	PKT	39,070,000
	f. rapat penyusunan Renja Satker T.A. 2023	23	PKT	39,925,000
	g. rapat penyusunan pagu ideal Satker T.A. 2023	4	PKT	4,098,000
	h. rapat penyusunan pagu indikatif T.A. 2023 dan TOR RAB	2	PKT	2,000,000
	i. rapat penyusunan pagu anggaran dipa Satker T.A. 2023	1	PKT	1,000,000
	j. rapat penyusunan rengglat dan Rendisgar T.A. 2022	1	PKT	4,420,000
	k. rapat penyusunan pagu minus bel. pegawai T.A. 2022	1	PKT	1,000,000
	l. Sun TOR dan RAB pagu anggaran T.A. 2023	1	PKT	1,206,000
	m. Sun laporan keuangan T.A. 2022	1	PKT	1,000,000
	n. penandatanganan perjanjian kinerja sub Satker T.A.2022	1	PKT	2,655,000
F	Penyusunan RKA-KL/ DIPA		PKT	
	a. rapat penyusunan pagu indikatif tahun 2023	1	PKT	1,140,000
	b. rapat penyusunan pagu anggaran tahun 2023	1	PKT	1,140,000
	c. rapat penyusunan revisi pagu anggaran tahun 2022	1	PKT	1,140,000
G	Penyusunan evaluasi LKIP			
	(Giat Sun LKIP Polda Sultra T.A. 2021)	1	PKT	12,000,000
	rapat penyusunan LKIP Satker T.A. 2022	23	PKT	37,690,000
I	Penyusunan naskah buku lainnya			
	a. Sun laporan satuan Wasrik Itwasum	1	PKT	6,000,000
	b. Sun laporan kesatuan Polda Sultra	1	PKT	6,000,000
	c. penyusunan laporan keuangan	4	PKT	8,110,000

d. rapat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	d. rapat laporan tahunan (tutup buku semester I dan II)	1	PKT	4,000,000
S	menyelenggarakan Humas			
	a. produksi barang cetakan di kewilayahan (Subbid Penmas)			
	cetakan majalah bulanan	1,200	EKS	156,000,000
	b. honor kesekretariatan penyusunan majalah			
	1. penanggung jawab	4	OK	1,600,000
	2. redaktur	4	OK	1,200,000
	3. editor	8	OK	12,000,000
	4. sekretariat	32	OK	4,800,000
	5. pembuat artikel	12	OG	6,000,000
	6. fotografer	8	OK	1,440,000
	7. pendistribusian majalah di satuan kewilayahan	4	KALI	8,000,000
	c. cetak kalender 2022			
	1. produk cetak kalender thn 2022	300	EX	15,000,000
	2. desain	2	OK	600,000
	d. produksi film ilm sebagai bahan publikasi kinerja Polri di media online internal dan eksternal			
	1. pre-pro meeting	15	OB	3,000,000
	2. sewa peralatan/equipment	12	BLN	54,000,000
	3. production crue			
	4. sutradara	6	OB	1,800,000
	5. penulis naska/skenario	6	OB	1,200,000
	6. artis/pameran objek liputan	12	OB	2,400,000
	7. crew peliput/cameramen/lighting/audioman	18	ORG	2,700,000
	8. post production/editing/mastering	6	OB	9,000,000
	e. di kewilayahan (Polda)			
	layanan langganan Internet Servise Provider (ISP)	12	UNIT	19,200,000
	f. pengelolah website Polda			
	1. penanggung jawab	12	OB	6,000,000
	2. redaktur	12	OB	5,400,000
	3. editor	12	OB	4,200,000
	4. web admin	12	OB	4,200,000
	5. web developer	12	OB	3,600,000
	6. penulis artikel	120	ARTKL	12,000,000
	7. sarana kontak	180	OK	18,000,000
	g. penggalangan masyarakat			
	1. pembuatan leflet/imbauan masyarakat	320	Lbr	8,000,000
	2. pembuatan stiker	400	lbr	4,000,000
	3. pembuatan spanduk imbauan	50	lbr	7,500,000
	h. penggalangan media			
	1. pembuatan kostum media	50	OG	15,000,000
	2. pembuatan ID card media	50	BH	2,500,000
	3. pelatihan	1	PKT	77,284,000
	g. siaran media online			
	1. produk media online			
	a) iklan shop RRI 1 media	12	MEDIA	24,000,000
	b) siaran TVRI 1 media	12	MEDIA	24,000,000
	c) iklan koran 2 media	48	MDIA	240,000,000
	d) iklan media online	48	MEDIA	96,000,000
	2. crue media online :			
	a) penanggung jawab	12	OB	4,800,000
	b) redaktur	12	OB	3,600,000
	c) editor	12	OB	3,000,000
	d) koordinator	12	OB	3,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	e) jilid buku	10	Buku	100,000
	f) pembinaan fungsi / coffe morning bersama wartawan (subbid penmas)	1	PKT	133,010,000
	g) menerima kunjungan media	1	PKT	2,400,000
	h) penandatanganan kerjasama / mou bersama media	1	PKT	3,091,000
	h. honorarium pengadaan barang dan jasa			
	a) panitia pengadaan barang dan jasa	3	OP	1,500,000
	b) panitia penerima hasil pekerjaan	3	OP	1,200,000
	Polres			
	a. giat Humas Polres	70	PKT	21,782,000
	b. sarana kontak Polres	42	PKT	21,152,000
	c. layanan langganan internet service provider (ISP)	60	PKT	94,280,000
	d. pemasangan jaringan telepon dan instalasi	2	PKT	300,000
X	Biaya pemakaman			
	Perawatan dan pemakaman jenazah	15	OT	54,000,000
Y	Pengepakan/pengiriman/pengangkutan barang			
	pengepakan, pengiriman, pengangkutan barang	2,519	KG	66,070,000
AB	Pengkajian dan analisis reformasi birokrasi			
	a. pelaporan Giat RBP	2	GIAT	4,000,000
	b. rapat giat RBP	4	GIAT	2,000,000
	c. asistensi	1	GIAT	55,900,000
	d. penilaian RBP	1	GIAT	27,500,000
	e. monitoring	2	GIAT	88,100,000
AC	Pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu			
	a. kegiatan kunjungan tim Itwasum Mabes Polri	1	GIAT	1,440,000
	b. kegiatan kunjungan supervisi Pusdokes Mabes Polri	1	GIAT	1,440,000
	c. kunjungan tim Wasrik Itwasda Polda Sultra	2	GIAT	2,680,000
	d. kegiatan kunjungan tim supervisi Rorena Polda Sultra	1	GIAT	670,000
	e. kegiatan kunjungan tim supervisi Bidkeu Polda Sultra	1	GIAT	670,000
AD	Rapat rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi			
	biaya Jaldis	40	PKT	425,017,000
AE	Kegiatan Musrenbang			
	Musrenbang	1	giat	190,000,000
AG	Sosialisasi			
	sosialisais	1	GIAT	29,010,000
AH	Pembinaan sistem dan manajemen			
	Anev penerapan sistem organisasi dan manajemen			
	a. semester I	1	GIAT	10,000,000
	b. semester II	1	GIAT	10,065,000
	c. evaluasi kajian SPBE Satker jajaran Polda Sultra	1	GIAT	50,000,000
AI	Pemeriksaan kesehatan			
	administrasi kegiatan			
	a. panitia pengadaan barang dan jasa	5	OP	5,340,000
	b. panitia penerima hasil pekerjaan	3	OP	2,730,000
	c. Intensif I	880	ORG	1,566,400,000
	d. intensif II	820	ORG	982,360,000
	e. intensif III	200	ORG	178,000,000
AJ	penyelenggaraan Humas, protokol dan pemberitaan			
	a. penerangan masyarakat			
	lembaran penerangan satuan	5,000	Lbr	5,000,000
	b. biaya reproduksi			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	1. edit kaset	30	KASET	6,000,000
	2. cuci cetak digital	1,508	LBR	3,016,000
	3. cetak foto 4 R	300	LBR	1,200,000
	4. album foto 100 shet	2	BH	400,000
	5. CD RW	6	ROLL	1,050,000
	6. pengadaan barang habis pakai	1	PKT	10,250,000
	7. pelayanan informasi publik	1	PKT	15,043,000
AM	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan			
	penyusunan laporan keuangan semester I T.A. 2022	2	GIAT	1,760,000
BT	Jasa keamanan / kebersihan			
	biaya jasa cleaning service	120	OB	91,200,000
BU	Evaluasi/laporan kegiatan akip			
	kegiatan evaluasi akip	1	giat	47,993,000
BV	Supervisi			
	supervisi	4	giat	225,367,000
DD	Pengawasan dan pembinaan			
	kegiatan pembinaan fungsi Satker	1	GIAT	73,500,000
DJ	Studi kelayakan			
	study kelayakan	2	GIAT	133,428,000
FS	Dukungan operasional Satker			
	dukungan operasional Satker	7	PKT	3,552,675,000
FT	Dukopsnal Polres			
	dukopsnal Polres	1	PKT	28,100,000
FW	Dukopsnal Polda			
	dukopsnal	6	PKT	1,422,418,000
FY	ULP non organik / jaga fungsi			
	piket jaga	8,760	OH	551,880,000
GO	pembinaan fungsi-fungsi			
	kegiatan pembinaan	1	PKT	159,355,000
JZ	honorarium SAI/Sakpa/Simak/Smap/pengelola keuangan			
	a. honor operator Smap Polda			
	1. penanggung jawab kegiatan	12	OB	3,600,000
	2. staf kegiatan	24	OB	7,200,000
	b. honor operator Sirena Polda			
	1. penanggung jawab kegiatan	12	OB	3,600,000
	2. staf kegiatan	12	OB	3,600,000
	c. honor operator Simak-BMN			
	staf kegiatan	264	OB	43,200,000
	d. honor operator Sakpa			
	1. penanggung jawab kegiatan	12		3,600,000
	2. staf kegiatan	240	OB	39,600,000
	e. honor operator Smap			
	staf kegiatan	264	OB	68,400,000
	f. honor operator Sirena			
	staf kegiatan	192	OB	81,000,000
	g. honor pengelola SAI			
	staf kegiatan	48	OB	9,000,000
	h. honor operator SMART			
	1. staf kegiatan	12	OB	1,800,000
	2. honor operator SIPP	24	OB	5,400,000
	i. honor pengelola keuangan Satker			
	1. honor KPA	39	OB	75,090,000
	2. honor PPK	39	OB	57,240,000
	3. honor PPSPM	36	OB	30,480,000
	4. honor Bendahara	39	OB	28,320,000
	5. honor staf Bendahara	90	OB	37,800,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	6. honor pengadaan barang dan jasa	13	OB	8,840,000
TV	Penyusunan perjanjian kinerja dan Ren aksi Satker T.A. 2022			
	rapat penyusunan perjanjian kinerja dan Ren aksi Satker T.A. 2022	23	GIAT	38,455,000
UD	Jaldis Mutasi			
	a. biaya transportasi pegawai	250	ORG	75,000,000
	b. biaya transportasi keluarga	750	ORG	225,000,000
	c. biaya pengepakan dan angkutan barang	25	M3	1,500,000
	d. uang Harian	1,000	ORG	140,000,000
3088	Pertanggungjawaban profesi			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
BV	Supervisi			
	supervisi	1	PKT	68,000,000
DC	Penegakkan hukum anggota / PNS Polri (sidang disiplin / kode etik)			
	a. Subbid Provos			
	1. biaya pemeriksaan pemberkasan gar disiplin	240	OB	120,000,000
	2. biaya sidang disiplin (ketua)	7	OG	2,800,000
	3. biaya sidang disiplin (wakil ketua)	14	OG	4,900,000
	4. biaya sidang disiplin (pendamping)	7	OG	2,100,000
	5. biaya sidang disiplin (penuntut)	7	OG	2,100,000
	6. biaya sidang disiplin (pengapit)	14	OG	2,800,000
	b. Subbid Wabprof			
	1. biaya pemeriksaan pemberkasan Gar KEPP	220	OB	110,000,000
	2. biaya sidang KKEP (ketua)	26	OG	10,400,000
	3. biaya sidang KKEP (sekretaris)	26	OG	7,800,000
	4. biaya sidang KKEP (penuntut)	26	OG	7,800,000
	5. biaya sidang KKEP (pengapit)	52	OG	10,400,000
	6. biaya sidang KKEP (makan)	260	OG	7,540,000
	7. biaya sidang KKEP (snack)	260	OG	3,380,000
	8. biaya sidang KKEP (ATK kertas)	52	GT	2,496,000
	9. biaya sidang KKEP (ATK tinta printer)	52	GT	1,404,000
	10. biaya sidang KKEP (ATK foto copy)	1,300	GT	260,000
	11. biaya sidang KKEP (ATK jilid laporan)	104	GT	3,120,000
	12. kegiatan penyusunan laporan standar akreditasi	1	PKT	4,904,000
	13. audit investigasi kasus Gar KEPP	25	OG	37,500,000
	14. biaya sidang komisi banding perkara KEPP	35	OG	14,000,000
	15. biaya gelar perkara KEPP	70	OG	35,000,000
GB	Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli (RM)			
	patroli Provos			
	a. uang saku	1,410	OG	31,020,000
	b. uang makan	1,410	OG	47,940,000
	c. ATK patroli Provos	1	PKT	2,739,000
GT	Sentra pelayanan kepolisian			
	a. kegiatan pelayanan pengaduan	1	PKT	20,000,000
	b. kegiatan rehabilitasi personel	1	PKT	20,000,000
3089	Penyelenggaraan pengamanan internal Polri			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
BV	Supervisi			
	supervisi Subbid Paminal	1	PKT	20,000,000
CW	Menyelenggarakan pengamanan kepolisian			
	a. kegiatan penyelidikan Paminal	48	PKR	38,068,000
	b. kegiatan penelitian personil	4	PKT	10,955,000
DB	Sidang disiplin			

a. biaya

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	a. biaya penyelidikan Paminal	15	KSS	18,036,000
	b. tambahan penyelidikan Paminal	1	KSS	1,572,000
DD	Pengawasan dan pembinaan			
	a. biaya penyelidikan Paminal di tingkat kewilayahan	39	OG	48,218,000
	b. Duk. tambahan biaya penyelidikan Paminal di tingkat kewilayahan	1	OG	804,000
GM	Pembinaan pengamanan Polri			
	a. lidik Paminal di kewilayahan	135	OG	275,400,000
	b. ATK kegiatan penelitian personel	1	PKT	8,930,000
3090	Penegakan tata tertib dan disiplin Polri			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
DB	sidang disiplin			
	a. pelaksanaan sidang disiplin	16	GIAT	37,360,000
	b. biaya pemeriksaan sampai dengan pemberkasan	96	GIAT	66,587,000
	c. biaya sidang disiplin	64	GIAT	113,958,000
	d. tambahan biaya sidang disiplin	2	GIAT	3,409,000
DC	Penegakkan hukum anggota / PNS Polri (sidang disiplin / kode etik)			
	kegiatan seksi propam Polres			
	a. biaya pemeriksaan sampai dengan pemberkasan	10	GIAT	5,708,000
	b. sidang disiplin	4	GIAT	11,600,000
	c. sidang komisi kode etik	8	GIAT	16,200,000
	d. pemeriksaan tata tertib dan disiplin	4	GIAT	1,432,000
DE	Kegiatan pembinaan Provost			
	kegiatan Provost Polsek	1	PKT	593,000
GM	pembinaan pengamanan Polri			
	kegiatan Gaktibplin			
	a. uang saku	357	OG	7,854,000
	b. uang makan	357	OG	12,138,000
	c. ATK giat Gaktibplin	1	PKT	815,000
3091	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
BV	Supervisi			
	supervisi	1	PKT	193,670,000
CU	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan			
	a. biaya rapat Siwas	20	PKT	132,781,000
	b. biaya supervisi Siwas	16	PKT	123,626,000
	c. biaya verifikasi Siwas	5		19,600,000
	d. giat rapat persiapan Wasrik Itwasum Polri dan Itwasda Polda	5	PKT	50,881,000
	e. lap Anev Siwas	3	PKT	13,975,000
	f. biaya kegiatan pengiriman data temuan Wasrik di Polda	1	PKT	6,150,000
	g. biaya kegiatan pra Wasrik	2	PKT	7,100,000
	h. pengiriman laporan Siwas	1	PKT	1,200,000
CX	Penyelenggaraan dan pemeriksaan rutin			
	a. kegiatan taklimat awal audit kinerja tahap I dan II	2	PKT	3,400,000
	b. kegiatan taklimat akhir audit kinerja tahap I dan II	2	PKT	3,400,000
	c. rapat penyusunan pka rutin tahap I dan II	1	PKT	1,200,000
	d. rapat penyusunan tabulasi dan PHP audit kinerja tahap I dan II	2	PKT	1,200,000
	e. administrasi audit kinerja tahap I dan tahap II	2	PKT	1,652,000
	f. kegiatan audit kinerja tahap I			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	audit kinerja tahap bidang perencanaan dan pengorganisasian	1	PKT	229,070,000
	g. kegiatan audit kinerja tahap II			
	audit kinerja tahap bidang pelaksanaan dan pengendalian	1	PKT	229,070,000
	h. kegiatan audit kinerja PNPB dan BLU			
	audit kinerja PNPB dan BLU	1	PKT	28,080,000
CY	Penyelenggaraan pengawasan pemeriksaan khusus			
	a. ATK kegiatan Wasrik khusus	1	PKT	276,000
	b. kegiatan Wasrik khusus	1	PKT	19,405,000
CZ	Penyelenggaraan tindak lanjut hasil pemeriksaan			
	a. rapat temuan Wasrik	1	PKT	9,045,000
	b. dukungan ATK			
DA	penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan tujuan tertentu			
	a. kegiatan Wasrik operasi (Ops Mandiri, Lantas, Binmas) dan Was pembangunan gedung Satker jajaran Polda Sultra			
	1. uang Harian	1	PKT	242,400,000
	2. uang penginapan Wasrik Mandiri, Lantas, Binmas	1	PKT	120,000,000
	3. transportasi Ops Mandiri	1	PKT	86,536,000
	b. kegiatan Wasrik operasi Lilin dan Ketupat			
	1. uang Harian	1	PKT	60,600,000
	2. uang penginapan Wasrik operasi Lilin dan Ketupat	1	PKT	28,500,000
	3. transportasi ops lilin dan ketupat	1	PKT	21,634,000
	c. kegiatan verifikasi			
	1. uang Harian	1	PKT	6,840,000
	2. uang penginapan	1	PKT	3,150,000
	3. transportasi (tiket kapal/pesawat dan sewa kendaraan)	1	PKT	18,648,000
DY	Kegiatan pembinaan			
	a. kegiatan reviu	1	PKT	39,600,000
	b. pelaksanaan kegiatan Dumas Polres daratan	1	PKT	21,480,000
	c. pelaksanaan kegiatan Dumas Polres kepulauan	1	PKT	31,980,000
	d. kegiatan asistensi penyusunan laporan manajemen risiko	1	PKT	72,346,000
VJ	Kegiatan 1 prioritas Polri			
	a. biaya rapat penanganan Dumas terpadu	1	PKT	10,800,000
	b. administrasi			
	1. ATK rapat penanganan Dumas terpadu	12	GIAT	6,000,000
	2. ATK investigasi Dumas terpadu	12	GIAT	6,000,000
	3. biaya invetigasi Dumas terpadu	1	PKT	178,890,000
3149	Pengelolaan multimedia			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
LM	Multimedia			
	coffe morning bersama multimedia	1	PKT	25,489,000
3154	Pemberian bantuan dan nasehat hukum			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
IA	Bantuan hukum/saksi/penerjemah/biaya pengacara/ penyelesaian perkara hukum			
	a. bantuan dan nasehat hukum perkara perdata terhadap anggota	18	PERKARA	120,000,000
	b. bantuan dan nasehat hukum praperadilan terhadap institusi	4	PERKARA	34,760,000
	c. bantuan dan nasehat hukum perkara pidana	18	PERKARA	120,000,000

terhadap

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	terhadap anggota			
	d. bantuan dan nasehat hukum ptun terhadap institusi	1	PERKARA	35,000,000
	e. bantuan dan nasehat hukum perkara disiplin dan kode etik profesi Polri	72	OG	56,100,000
	f. pendapat dan saran hukum	12	GIAT	49,200,000
	g. bantuan dan nasehat hukum perkara pidana terhadap anggota (Polres)	14	PERKARA	14,190,000
IB	Penyuluhan hukum			
	a. penyuluhan hukum (Polda)	2	GIAT	105,140,000
	b. penyuluhan hukum (Polres)	27	GIAT	14,610,000
3155	Penyusunan dan penyuluhan hukum			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
H	penyusunan peraturan perundang-undangan			
	rapat penyusunan SOP	11	GIAT	31,986,000
M	Pengadaan buku lainnya			
	buku saku	312	BUKU	4,680,000
CC	penerapan hukum			
	a. biaya rapat penerapan hukum peraturan perundang-undangan	7	GIAT	76,106,000
	b. biaya rapat penyusunan SOP	6	GIAT	36,666,000
	c. rapat pembahasan perkara	12	GIAT	18,570,000
	d. sosialisasi peraturan hukum kepada anggota Polri	1	GIAT	18,333,000
IA	Bantuan hukum			
	pemberian bantuan dan nasihat hukum terhadap anggota	2	PERKARA	33,659,000
5053	Reformasi Birokrasi Polri			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
AB	Pengkajian dan analisis reformasi birokrasi			
	a. tim pokja verifikasi tingkat Polda			
	1. meeting	1	PKT	26,376,000
	2. dukungan ATK	1	PKT	2,111,000
	3. honor tim pokja	1	PKT	42,000,000
	b. giat itk			
	1. opsional tim pkja itk dan operator	1	PKT	303,550,000
	2. tim peneliti lokal	1	PKT	43,723,000
5054	Manajemen anggaran			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
F	Penyusunan RKA-KL dan DIPA			
	a. sosialisasi dipa serta penandatanganan perjanjian kinerja serta pakta integritas Satker	1	GIAT	21,006,000
	b. kegiatan penyusunan rencana aksi T.A. 2022			
	c. kegiatan penyusunan rencana aksi T.A. 2022	1	GIAT	24,204,000
	d. penyusunan RPD Hal. III pagu anggaran 2023	1	GIAT	37,306,000
	e. dukungan ATK Giat Sungar T.A. 2023	3	PKT	30,000,000
	f. penyusunan pagu alokasi anggaran T.A. 2023	8	GIAT	78,858,000
	g. penyusunan pagu anggaran T.A. 2023	8	GIAT	87,121,000
	h. tindak lanjut hasil reviu pagu anggaran T.A. 2023	2	GIAT	67,000,000
	i. penyusunan kebutuhan anggaran T.A. 2024	5	GIAT	81,157,000
	j. rapat penyusunan pagu indikatif T.A. 2023	9	GIAT	119,144,000
	k. kegiatan penyusunan Rendisgar dan Rengiat Satker T.A.2022	3	GIAT	5,661,000
AH	Pembinaan sistem dan manajemen			
	Ren aksi Satker tahun 2022	2	GIAT	3,866,000
BU	Evaluasi/laporan kegiatan			
	a. kegiatan PHLN dan PDN	1	PKT	34,275,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKOMPONEN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
	b. Jaldis kegiatan pagu minus T.A. 2022	1	PKT	34,275,000
	c. supervisi penyerapan anggaran (PNBP) T.A. 2022	1	PKT	52,415,000
	d. Monev anggaran	1	PKT	27,585,000
	e. penyusunan laporan anev anggaran	11	PKT	36,981,000
5056	Pengelola informasi dan dokumentasi			
003	Dukungan operasional pertahanan dan keamanan			
S	menyelenggarakan Humas			
	a. peliputan dan dokumentas	1	PKT	12,096,000
	b. sosialisasi pengemban PID Satker	1	PKT	36,404,000

2. Pagu Indikatif Poldasultra T.A. 2022.

Perbandingan antara kebutuhan anggaran T.A. 2022 dan pagu indikatif T.A. 2022 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	KEBUTUHAN ANGGARAN TA. 2022	PAGU INDIKATIF T.A. 2022	KET
1	PEGAWAI	565,629,781,000	546,842,503,000	Terpenuhi 96,68 %
2	BARANG	420,923,795,000	317,282,380,000	Terpenuhi 75,38 %
3	MODAL	444,539,893,000	600,000,000	Terpenuhi 0.13 %
JUMLAH		1,431,093,469,000	864,724,883,000	Terpenuhi 60,42 %

Adapun

Adapun Pagu Indinaktif Polda Sultra TA. 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Program Profesionalisme SDM Polri dengan anggaran sebesar Rp. 14.906.964.000,- digunakan untuk kegiatan:
- 1) dukungan manajemen profesionalisme SDM Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 14.322.399.000,-;
 - 2) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 96.465.000,-;
 - 3) penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 180.100.000,-;
 - 4) pembinaan karier personel Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 130.000.000,-;
 - 5) pelayanan psikologi anggota Polri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 178.000.000,-.
- b. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan anggaran sebesar Rp. 84.144.572.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 83.281.144.000,- dan PNBK Rp. 863.128.000,- digunakan untuk kegiatan:
- 1) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 34.994.230.000,-;
 - 2) penindakan tindak pidana umum dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 24.749.660.000,-;
 - 3) penindakan tindak pidana Narkoba dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 11.882.709.000,-;
 - 4) penindakan tindak pidana ekonomi khusus dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 637.869.000,-;
 - 5) penindakan tindak pidana korupsi dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 4.170.191.000,-;
 - 6) penindakan tindak pidana siber dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 1.386.308.000,-;

7) penindakan

- 7) penindakan tindak pidana perairan dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 424.414.000,-;
 - 8) penindakan tindak pidana Laka Lantas dengan alokasi anggaran dari PNBP sebesar Rp. 863.128.000,-;
 - 9) pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 112.186.000,-;
 - 10) penindakan tindak pidana tertentu dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 630.140.000,-;
 - 11) pengawasan penyidikan dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp 242.598.000,-.
- c. Program Modernisasi Alarmsus dan SaranaPrasarana Polri dengan anggaran sebesar Rp 97.729.494.000,-terdiri dari rupiah murni Rp. 82.605.223.000,-, PNBP Rp. 12.463.704.000,- dan BLU Rp. 2.660.567.000,- digunakan untuk:
- 1) pengembangan peralatan Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- bersumber dari BLU;
 - 2) dukungan manajemen dan teknis Sarpras dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97.129.494.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 82.605.223.000,-, PNBP Rp. 12.463.704.000,- dan BLU Rp. 2.060.567.000,-;
- d. Program Pemeliharaan kemandirian dan ketertiban dengan anggaran sebesar Rp. 201.609.763.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 174.181.015.000,- dan PNBP Rp. 27.428.748.000,- digunakan untuk kegiatan:
- 1) analisis keamanan dengan alokasi anggaran sumber rupiah murni sebesar Rp. 2.562.286.000,- sumber rupiah murni;
 - 2) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik dengan alokasi anggaran Rp. 4.616.510.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 4.391.164.000,- dan PNBP Rp. 225.346.000,-;

3) penyelenggaraan

- 3) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi dengan alokasi anggaran Rp. 3.858.090.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 3.651.446.000,- dan PNBPNP Rp. 206.644.000,-;
- 4) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya dengan alokasi anggaran Rp. 4.126.474.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 3.901.128.000,- dan PNBPNP Rp. 225.346.000,-;
- 5) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara dengan alokasi anggaran Rp. 5.272.973.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 5.060.039.000,- dan PNBPNP Rp 212.934.000,-;
- 6) kerjasama keamanan dan ketertiban, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.884.000,-
- 7) dukungan manajemen pemeliharaan Kamtibmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.128.445.147.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 126.203.508.000,- dan PNBPNP Rp. 2.241.639.000,-;
- 8) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara dengan anggaran sebesar Rp. 7.961.965.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 583.912.000,- dan PNBPNP Rp. 7.378.053.000,-;
- 9) penyelenggaraan pengamanan obyek vital dengan anggaran sebesar Rp. 8.337.665.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 448.726.000,- dan PNBPNP Rp. 7.888.939.000,-;
- 10) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas alokasi anggaran sebesarRp. 8.023.156.000,- (PNBPNP);
- 11) penyelenggaraan kepolisian perairan dengan anggaran sebesar Rp. 174.962.000,-(PNBPNP);
- 12) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus dengan alokasi anggaran Rp 2.834.069.000,- (rupiah murni);
- 13) pembinaan potensi keamanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.850.415.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 16.998.686.000,- dan PNBPNP Rp. 851.729.000,-;
- 14) pengendalian operasi kepolisian dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 6.522.273.000,-;

15) pelacakan

- 15) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 255.500.000,-;
 - 16) penanggulangan keamanan dalam negeri dengan alokasi anggaran dari rupiah murni Rp. 750.394.000,-.
- e. Program dukungan manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 469.334.090.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 440.207.114.000,-, PNBPNP Rp. 1.974.976.000,- dan BLU sebesar Rp. 27.152.000.000,- digunakan untuk kegiatan:
- 1) pelayanan administrasi keuangan Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 209.500.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 129.500.000,- dan PNBPNP Rp. 80.000.000,-;
 - 2) penerangan masyarakat dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 1.169.580.000,-bersumber dari rupiah murni;
 - 3) penyelenggaraan teknologi informasi dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 27.000.000,-bersumber dari rupiah murni;
 - 4) pelayanan kesehatan Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.265.728.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 4.370.752.000,-, PNBPNP sebesar Rp. 1.742.976.000,- dan BLU Rp. 27.152.000.000,-;
 - 5) dukungan pelayanan internal perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 429.350.454.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 429.278.454.000,- dan PNBPNP Rp. 72.000.000,-;
 - 6) Pertanggungwaban profesi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 580.403.000,- (rupiah murni);
 - 7) penyelenggaraan pengamanan internal Polri dengan alokasi anggaran Rp. 421.983.000,-(rupiah murni);
 - 8) penegakan tata tertib dan disiplin Polri dengan alokasi anggaran Rp. 277.654.000,-(rupiah murni);
 - 9) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan dengan alokasi anggaran Rp. 2.030.185.000,-(rupiah murni);
 - 10) pengelolaan

- 10) pengelolaan Multi Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.489.000,- (rupiah murni);
- 11) pemberian bantuan dan nasehat hukum, dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 549.000.000,-(rupiah murni);
- 12) penyusunan dan penyuluhan hukum, dengan alokasi anggaran dari rupiah murni sebesar Rp. 220.000.000,-(rupiah murni);
- 13) Reformasi Birokrasi Polri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 417.760.000,- (rupiah murni);
- 14) manajemen anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 740.854.000,- terdiri dari rupiah murni Rp. 660.854.000,- dan PNBPNP Rp 80.000.000,-(rupiah murni);
- 15) Pengelolaan Informasi dan Dokumensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.500.000,- (rupiah murni).

LAMP KEPUTUSAN KAPOLDA SULTRA

NOMOR : KEP/ 260 /VI/2021

TANGGAL : 29 JUNI 2021

BAB V

PENUTUP

Demikian rencana kerja Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara T.A. 2022 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan T.A. 2022.

Ditetapkan di : Kendari

pada tanggal : 29 Juni 2021

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

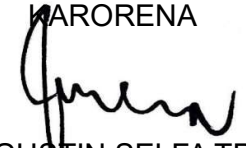


Drs. YAN SULTRA I., S.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

**RENCANA KERJA TAHUNAN
POLDA SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS			KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1.	Terwujudnya Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban.	73,6	
2.	Terwujudnya Penegakan hukum secara berkeadilan.	Indeks Penegakan Hukum.	82,0	
3.	Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional.	a. Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra;	56,4	
		b. Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra.	91,6	
4.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.	Nilai SAKIP;	78,45	
		Nilai RBP.	79	
		Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra.	80,1	
		Nilai kinerja anggaran;	90,1	
		Persentase penyerapan anggaran.	98,79	
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat;	92	
		Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra.	94	

Kendari, Juni 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULTRA
MARORENA


Dra. YULIA AGUSTIN SELFA TRIANA, M.M.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080576

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
POLDA SULAWESI TENGGARA

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2022
(RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM)

BAGIAN ANGGARAN : 060.01
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORGANISASI : POLDA SULAWESI TENGGARA

KODE	NAMA PROGRAM/NAMA KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKP TAHUN 2022(Dalam Juta Rupiah)					
		TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
		Non Pendamping	Pendamping	PHLN			
03.01.01	Program Dukungan Manajemen	0.0	0.0	0.0	440,207.1	29,127.0	469,334.1
03.01.01.3068.20	Pelayanan administrasi keuangan Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	129.5	80.0	209.5
03.01.01.3070.20	Penceranaan masyarakat Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	1,169.6	0.0	1,169.6
03.01.01.3071.20	Penyelenggaraan teknologi informasi Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	27.0
03.01.01.3072.20	Pelayanan Kesehatan Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	4,370.8	28,895.0	33,265.7
03.01.01.3073.20	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	429,278.5	72.0	429,350.5
03.01.01.3088.20	Pertanggungjawaban profesi Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	580.4	0.0	580.4
03.01.01.3089.20	Penyelenggaraan pengamanan internal Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	422.0	0.0	422.0
03.01.01.3090.20	Penegakan tata tertib dan disiplin Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	277.7	0.0	277.7
03.01.01.3091.20	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	2,030.2	0.0	2,030.2
03.01.01.3149.20	Pengelolaan Multi Media Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	25.5
03.01.01.3154.20	Pemberian Bantuan Hukum Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	549.0	0.0	549.0
03.01.01.3155.20	Penyusunan dan penyuluhan hukum Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	220.0	0.0	220.0
03.01.01.5053.20	Reformasi Birokrasi Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	417.8	0.0	417.8
03.01.01.5054.20	Manajemen anggaran Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	660.9	80.0	740.9
03.01.01.5056.20	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	48.5	0.0	48.5
03.01.02	Program Modernisasi Almatrus dan Sarana Prasarana Polri	0.0	0.0	0.0	82,305.2	15,424.3	97,729.5
03.01.02.3084.20	Pengembangan peralatan Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0
03.01.02.5059.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Satpras Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	82,305.2	14,824.3	97,129.5
03.01.03	Program Profesionalisme SDM Polri	0.0	0.0	0.0	14,907.0	0.0	14,907.0
03.01.03.3096.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	14,322.4	0.0	14,322.4
03.01.03.3100.20	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	96.5	0.0	96.5

KODE	NAMA PROGRAM/NAMA KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKP TAHUN 2022(Dalam Juta Rupiah)					
		TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
		Non Pendamping	Pendamping	PHLN			
03.01.03.3105.20	Penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	180.1	0.0	180.1
03.01.03.3108.20	Pembinaan karier personel Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
03.01.03.3110.20	Pelayanan psikologi anggota Polri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	178.0	0.0	178.0
03.01.04	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	0.0	0.0	0.0	174,181.0	27,428.7	201,609.8
03.01.04.3112.20	Analisis Keamanan Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	2,562.3	0.0	2,562.3
03.01.04.3114.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	4,391.2	225.3	4,616.5
03.01.04.3115.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	3,651.4	206.6	3,858.1
03.01.04.3116.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	3,901.1	225.3	4,126.5
03.01.04.3117.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	5,060.0	212.9	5,273.0
03.01.04.3120.20	Kerjasama keamanan dan Ketertiban K/L Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	17.9
03.01.04.3128.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	126,203.5	2,241.6	128,445.1
03.01.04.3130.20	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	583.9	7,378.1	7,962.0
03.01.04.3131.20	Penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	448.7	7,888.9	8,337.7
03.01.04.3133.20	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantaa Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	0.0	8,023.2	8,023.2
03.01.04.3134.20	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	0.0	175.0	175.0
03.01.04.3150.20	penyelenggaraan strakanth bidang Kamus Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	2,834.1	0.0	2,834.1
03.01.04.5076.20	Pembinaan Potensi Keamanan Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	16,998.7	851.7	17,850.4
03.01.04.5080.20	Pengedalian operasi Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	6,522.3	0.0	6,522.3
03.01.04.5081.20	Pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	255.5	0.0	255.5
03.01.04.5087.20	Penanggulangan keamanan dalam negeri Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	750.4	0.0	750.4
03.01.05	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	0.0	0.0	0.0	80,281.4	863.1	81,144.6
03.01.05.3137.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	36,045.4	0.0	36,045.4
03.01.05.3142.20	Penindakan Tindak Pidana Umum Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	24,749.7	0.0	24,749.7
03.01.05.3144.20	Penindakan Tindak Pidana Narkoba Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	11,882.7	0.0	11,882.7
03.01.05.3145.20	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	637.9	0.0	637.9
03.01.05.3146.20	Penindakan tindak pidana korupsi Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	4,170.2	0.0	4,170.2
03.01.05.3151.20	Penindakan Tindak Pidana Siber Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	1,386.3	0.0	1,386.3
03.01.05.4342.20	Penindakan tindak pidana perairan Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	424.4	0.0	424.4
03.01.05.4343.20	penindakan tindak pidana laka lantas Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	0.0	863.1	863.1
03.01.05.5082.20	Pembinaan operasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	112.2	0.0	112.2
03.01.05.5083.20	Penindakan Tindak Pidana Tertentu Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	630.1	0.0	630.1
03.01.05.5086.20	Pengawasan penyidikan Sulawesi Tenggara	0.0	0.0	0.0	242.6	0.0	242.6

KODE	NAMA PROGRAM/NAMA KEGIATAN	PAGU INDIKATIF RKP TAHUN 2022(Dalam Juta Rupiah)				
		TIDAK MENGIKAT		MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
		Non Pendamping	Pendamping			
	TOTAL	0.0	0.0	0.0	791,881.8	72,843.1
						864,724.9

Kendari, Juni 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
KARORENA

Dra. YULIA AGUSTINI SELLA TRIANA, M.M.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080576

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

- 1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2. Nama Unit Organisasi : POLDA SULAWESI TENGGARA
- 3. Kode Program APBN : 03.01.01
- 4. Nama Program APBN : Program Dukungan Manajemen

5. Pembiayaan (dalam Juta Rupiah)

Pembiayaan		2021	2022	2023	2024
a. Rupiah	1. Pendamping	469,082.1	469,334.1	656,714.9	788,057.9
	2. Non Pendamping	0.0	0.0	0.0	0.0
	b. PHLN	0.0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH		469,082.1	469,334.1	656,714.9	788,057.9

II. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

1. Tujuan Program

1 Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor

2. Sasaran Program

III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Program Dukungan Manajemen

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan/Propinsi	Keluaran	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	03.01.01.3068	Pelayanan administrasi keuangan			
	1 3068	layanan perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
		20 Sulawesi Tenggara			
2	03.01.01.3070	Penerangan masyarakat			
	1 3070	penerangan masyarakat	Jumlah penerangan masyarakat	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
		20 Sulawesi Tenggara			
3	03.01.01.3071	Penyelenggaraan teknologi informasi			
	1 3071	layanan teknologi informasi			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan teknologi informasi	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
4	03.01.01.3072	Pelayanan Kesehatan Polri			
	1 3072	layanan kesehatan	Jumlah layanan kesehatan	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
		20 Sulawesi Tenggara			
5	03.01.01.3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri			
	1 3073	layanan perkantoran			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
6	03.01.01.3088	Pertanggungjawaban profesi			
	1 3088	layanan perkantoran			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
7	03.01.01.3089	Penyelenggaraan pengamanan internal			
	1 3089	layanan perkantoran			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
8	03.01.01.3090	Penegakan tata tertib dan disiplin Polri			
	1 3090	layanan perkantoran			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari

III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

FORMULIR : 2.1.2

A. URAIAN KEGIATAN

Program Dukungan Manajemen

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan/Propinsi	Keluaran	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	03.01.01.3091	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan			
	1 3091	laporan pengawasan dan pemeriksaan			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah laporan pengawasan dan pemeriksaan	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
10	03.01.01.3149	Pengelolaan Multi Media			
	1 3149	Layanan umum			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan umum	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
11	03.01.01.3154	Pemberian Bantuan Hukum			
	1 3154	layanan bantuan hukum			
		20 . Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan bantuan hukum	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
12	03.01.01.3155	Penyusunan dan penyuluhan hukum			
	1 3155	peraturan perundang-undangan Harkantibmas			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah peraturan perundang-undangan Harkantibmas	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
13	03.01.01.5053	Reformasi Birokrasi Poli			
	1 5053	Layanan Birokrasi			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan Birokrasi	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
14	03.01.01.5054	Manajemen anggaran			
	1 5054	layanan perkantoran			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
15	03.01.01.5056	Pengelolaan informasi dan dokumentasi			
	1 5056	Layanan data dan informasi			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan data dan informasi	Kegiatan Dekon	Kota Kendari

B. SUMBER PEMBIAYAAN

Program Dukungan Manajemen

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Rincian Anggaran Tahun 2022					
			TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
			Non Pendamping	Pendamping	PHLN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(4+5+6+7+8)
1	03.01.01.3068.20	Pelayanan administrasi keuangan	0.0	0.0	0.0	129.5	80.0	209.5
	1	layanan perkantoran	0.0	0.0	0.0	129.5	80.0	209.5
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	129.5	80.0	209.5
2	03.01.01.3070.20	Penerangan masyarakat	0.0	0.0	0.0	1,169.6	0.0	1,169.6
	2	penerangan masyarakat	0.0	0.0	0.0	1,169.6	0.0	1,169.6
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	1,169.6	0.0	1,169.6
3	03.01.01.3071.20	Penyelenggaraan teknologi informasi	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	27.0
	3	layanan teknologi informasi	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	27.0
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	27.0
4	03.01.01.3072.20	Pelayanan Kesehatan Polri	0.0	0.0	0.0	4,370.8	28,895.0	33,265.7
	4	layanan kesehatan	0.0	0.0	0.0	4,370.8	28,895.0	33,265.7
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	4,370.8	28,895.0	33,265.7
5	03.01.01.3073.20	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	0.0	0.0	0.0	429,278.5	72.0	429,350.5
	5	layanan perkantoran	0.0	0.0	0.0	429,278.5	72.0	429,350.5
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	429,278.5	72.0	429,350.5
6	03.01.01.3088.20	Pertanggungjawaban profesi	0.0	0.0	0.0	580.4	0.0	580.4
	6	layanan perkantoran	0.0	0.0	0.0	580.4	0.0	580.4
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	580.4	0.0	580.4
7	03.01.01.3089.20	Penyelenggaraan pengamanan internal	0.0	0.0	0.0	422.0	0.0	422.0
	7	layanan perkantoran	0.0	0.0	0.0	422.0	0.0	422.0
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	422.0	0.0	422.0
8	03.01.01.3090.20	Pengelolaan tata tertib dan disiplin Polri	0.0	0.0	0.0	277.7	0.0	277.7
	8	layanan perkantoran	0.0	0.0	0.0	277.7	0.0	277.7
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	277.7	0.0	277.7
9	03.01.01.3091.20	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan	0.0	0.0	0.0	2,030.2	0.0	2,030.2
	9	laporan pengawasan dan pemeriksaan	0.0	0.0	0.0	2,030.2	0.0	2,030.2
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	2,030.2	0.0	2,030.2
10	03.01.01.3149.20	Pengelolaan Multi Media	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	25.5
	10	Layanan umum	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	25.5

B. SUMBER PEMBIAYAAN

FORMULIR : 2.1.3

Program Dukungan Manajemen

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Rincian Anggaran Tahun 2022					
			TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	Non Pendamping	Pendamping	PHLN	(7)	(8)	9=(4+5+6+7+8)
			(4)	(5)	(6)			
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	25.5	0.0	25.5
11	03.01.01.3154.20	Pemberian Bantuan Hukum	0.0	0.0	0.0	549.0	0.0	549.0
	11 3154	layanan bantuan hukum	0.0	0.0	0.0	549.0	0.0	549.0
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	549.0	0.0	549.0
12	03.01.01.3155.20	Penyusunan dan penyuluhan hukum	0.0	0.0	0.0	220.0	0.0	220.0
	12 3155	peraturan perundang-undangan Mahkamahnas	0.0	0.0	0.0	220.0	0.0	220.0
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	220.0	0.0	220.0
13	03.01.01.5053.20	Reformasi Birokrasi Poli	0.0	0.0	0.0	417.8	0.0	417.8
	13 5053	Layanan Birokrasi	0.0	0.0	0.0	417.8	0.0	417.8
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	417.8	0.0	417.8
14	03.01.01.5054.20	Manajemen anggaran	0.0	0.0	0.0	660.9	80.0	740.9
	14 5054	layanan perkantoran	0.0	0.0	0.0	660.9	80.0	740.9
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	660.9	80.0	740.9
15	03.01.01.5056.20	Pengelolaan informasi dan dokumentasi	0.0	0.0	0.0	48.5	0.0	48.5
	15 5056	Layanan data dan informasi	0.0	0.0	0.0	48.5	0.0	48.5
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	48.5	0.0	48.5
		JUMLAH	0.0	0.0	0.0	440,207.1	29,127.0	469,334.1

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Dukungan Manajemen

(dalam Juta Rupiah)

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022								
No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/ Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping
						PLN	Hibah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03.01.01.3068.20	Pelayanan administrasi keuangan Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
2	03.01.01.3070.20	Pencerangan masyarakat Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
3	03.01.01.3071.20	Penyelenggaraan teknologi informasi Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
4	03.01.01.3072.20	Pelayanan Kesehatan Polri Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
5	03.01.01.3073.20	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
6	03.01.01.3088.20	Pertanggungjawaban profesi Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
7	03.01.01.3089.20	Penyelenggaraan pengamanan internal Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
8	03.01.01.3090.20	Penegakan tata tertib dan disiplin Polri Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
9	03.01.01.3091.20	Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
			-			0.0	0.0	0.0

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Dukungan Manajemen

(dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022					
			Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping
						PLN	Hibah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	03.01.01.3149.20	Pengelolaan Multi Media Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
			TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
11	03.01.01.3154.20	Pemberian Bantuan Hukum Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
			TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
12	03.01.01.3155.20	Penyusunan dan penyuluhan hukum Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
			TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
13	03.01.01.5053.20	Reformasi Birokrasi Polri Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
			TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
14	03.01.01.5054.20	Manajemen anggaran Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
			TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
15	03.01.01.5056.20	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
			TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
JUMLAH						0.0	0.0	0.0

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Dukungan Manajemen

(dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022					
			Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	PLN (7)	Hibah (8)	(9)

KENDARI, JUNI 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

KARORENA


DRA. YULIA AGUSTIN SELFA TRIANA, M.M.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080576

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

- 1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2. Nama Unit Organisasi : POLDA SULAWESI TENGGARA
- 3. Kode Program APBN : 03.01.02
- 4. Nama Program APBN : Program Modernisasi Almatasus dan Sarana Prassarana Polri

5. Pembiayaan (dalam Juta Rupiah)

Pembiayaan		2021	2022	2023	2024
a. Rupiah	231,582.8	97,729.5	324,216.0	389,059.1	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	231,582.8	97,729.5	324,216.0	389,059.1	
b. PHLN	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	
	231,582.8	97,729.5	324,216.0	389,059.1	
JUMLAH		231,582.8	97,729.5	324,216.0	389,059.1

II. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

1. Tujuan Program

I Terpeliharanya Harakamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatasus dan sarana prassarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional

2. Sasaran Program

III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Program Modernisasi Almatikus dan Sarana Prasarana Polri

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan/Propinsi	Keluaran	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	03.01.02.3084	Pengembangan peralatan Polri			
	1 3084	layanan pengembangan peralatan Polri			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan pengembangan peralatan Polri	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
2	03.01.02.5059	Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras			
	1 5059	Layanan Perkantoran			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan Perkantoran3	Kegiatan Dekon	Kota Kendari

B. SUMBER PEMBIAYAAN

FORMULIR : 2.1.3

Program Modernisasi Almatas dan Sarana Prassarana Polri

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Rincian Anggaran Tahun 2022					
			TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
			Non Pendamping	Pendamping	PHLN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(4+5+6+7+8)
1	03.01.02.3084.20	Pengembangan peralatan Polri	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0
	1	3084	layanan pengembangan peralatan Polri	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.0	600.0
2	03.01.02.5059.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras	0.0	0.0	0.0	82,305.2	14,824.3	97,129.5
	2	5059	Layanan Perkantoran	0.0	0.0	0.0	14,824.3	97,129.5
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	82,305.2	14,824.3	97,129.5
		JUMLAH	0.0	0.0	0.0	82,305.2	15,424.3	97,729.5

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Modernisasi Almatrus dan Sarana Prasarana Polri

(dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022					
			Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping
						PLN	Hibah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03.01.02.3084.20	Pengembangan peralatan Polri Sulawesi Tenggara				0.0	0.0	0.0
2	03.01.02.5059.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras Sulawesi Tenggara				0.0	0.0	0.0
JUMLAH			-			0.0	0.0	0.0

KENDARI, JUNI 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

KARORENA

DRA. YULIA AGUSTIN SELFA TRIANA, M.M.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080576

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

- 1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 2. Nama Unit Organisasi : POLDA SULAWESI TENGGARA
- 3. Kode Program APBN : 03.01.03
- 4. Nama Program APBN : Program Profesionalisme SDM Polri

5. Pembayaan (dalam Juta Rupiah)

Pembayaan		2021	2022	2023	2024
a. Rupiah	1. Pendamping	0.0	0.0	0.0	0.0
	2. Non Pendamping	29,523.7	14,907.0	41,333.2	49,599.8
	b. PHLN	0.0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH		29,523.7	14,907.0	41,333.2	49,599.8

II. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

1. Tujuan Program

1 Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan value organisasi

2. Sasaran Program

III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Program Profesionalisme SDM Polri

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan/Propinsi	Keluaran	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	03.01.03.3096	Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat Polri			
	1 3096	Layanan Perkantoran			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan Perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
2	03.01.03.3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri			
	1 3100	pelaksanaan Diklat			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah pelaksanaan Diklat	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
3	03.01.03.3105	Penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri			
	1 3105	layanan perawatan pegawai Polri			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan perawatan pegawai Polri	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
4	03.01.03.3108	Pembinaan karier personel Polri			
	1 3108	Layanan SDM			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan SDM	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
5	03.01.03.3110	Pelayanan psikologi anggota Polri			
	1 3110	Layanan psikologi			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan psikologi	Kegiatan Dekon	Kota Kendari

B. SUMBER PEMBIAYAAN

Program Profesionalisme SDM Polri

FORMULIR : 2.1.3

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Rincian Anggaran Tahun 2022					
			TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
			Non Pendamping	Pendamping	PHLN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(4+5+6+7+8)
1	03.01.03.3096.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat Polri	0.0	0.0	0.0	14,322.4	0.0	14,322.4
	1 3096	Layanan Perkantoran	0.0	0.0	0.0	14,322.4	0.0	14,322.4
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	14,322.4	0.0	14,322.4
2	03.01.03.3100.20	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri	0.0	0.0	0.0	96.5	0.0	96.5
	2 3100	pelaksanaan Diklat	0.0	0.0	0.0	96.5	0.0	96.5
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	96.5	0.0	96.5
3	03.01.03.3105.20	Penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri	0.0	0.0	0.0	180.1	0.0	180.1
	3 3105	layanan perawatan pegawai Polri	0.0	0.0	0.0	180.1	0.0	180.1
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	180.1	0.0	180.1
4	03.01.03.3108.20	Pembinaan karier personel Polri	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
	4 3108	Layanan SDM	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	130.0	0.0	130.0
5	03.01.03.3110.20	Pelayanan psikologi anggota Polri	0.0	0.0	0.0	178.0	0.0	178.0
	5 3110	Layanan psikologi	0.0	0.0	0.0	178.0	0.0	178.0
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	178.0	0.0	178.0
		JUMLAH	0.0	0.0	0.0	14,907.0	0.0	14,907.0

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Profesionalisme SDM Polri

(dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022					
			Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping
						PLN	Hibah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03.01.03.3096.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat Polri Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
2	03.01.03.3100.20	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
3	03.01.03.3105.20	Penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
4	03.01.03.3108.20	Pembinaan karier personel Polri Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
5	03.01.03.3110.20	Pelatihan psikologi anggota Polri Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0
JUMLAH						0.0	0.0	0.0

KENDARI, JUNI 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

MARORENA


DRA. YULIA AGUSTINI SELFA TRIANA, M.M.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080576

RENCANA KERJA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Nama Unit Organisasi : POLDA SULAWESI TENGGARA
3. Kode Program APBN : 03.01.04
4. Nama Program APBN : Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

5. Pembiayaan (dalam Juta Rupiah)

Pembiayaan	2021	2022	2023	2024
a. Rupiah	200,186.7	201,609.8	280,261.4	336,313.6
1. Pendamping	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Non Pendamping	200,186.7	201,609.8	280,261.4	336,313.6
b. PHLN	0.0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH	200,186.7	201,609.8	280,261.4	336,313.6

II. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

1. Tujuan Program

1 Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif

2. Sasaran Program

III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan/Propinsi	Keluaran	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	03.01.04.3112	Analisis Keamanan			
	1 3112	dokumen analisis keamanan			
	20	Sulawesi Tenggara	Jumlah dokumen analisis keamanan	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
2	03.01.04.3114	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik			
	1 3114	layanan strategiskeamanan dan ketertiban bidang politik			
	20	Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan strategiskeamanan dan ketertiban bidang politik	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
3	03.01.04.3115	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi			
	1 3115	layanan strategiskeamanan dan ketertiban bidang ekonomi			
	20	Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan strategiskeamanan dan ketertiban bidang ekonomi	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
4	03.01.04.3116	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya			
	1 3116	layanan strategiskeamanan dan ketertiban bidang sosial budaya			
	20	Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan strategiskeamanan dan ketertiban bidang sosial budaya	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
5	03.01.04.3117	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara			
	1 3117	layanan strategiskeamanan dan ketertiban bidang keamanan negara			
	20	Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan strategiskeamanan dan ketertiban bidang keamanan negara	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
6	03.01.04.3120	Kerjasama keamanan dan Ketertiban K/L			
	1 3120	laporan kerja sama KL			
	20	Sulawesi Tenggara	Jumlah laporan kerja sama KL	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
7	03.01.04.3128	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			
	1 3128	Layanan Perkantoran			
	20	Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan Perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
8	03.01.04.3130	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara			
	1 3130	operasional fungsi Sabhara			

III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan/Propinsi	Keluaran	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah operasional fungsi Sabhara	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
9	03.01.04.3131	Penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital			
	1 3131	Layanan Perkantoran			
	20 Sulawesi Tenggara		Jumlah Layanan Perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
10	03.01.04.3133	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas			
	1 3133	layanan kemanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalu lintas			
	20 Sulawesi Tenggara		Jumlah layanan kemanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalu lintas	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
11	03.01.04.3134	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan			
	1 3134	operasional fungsi perairan			
	20 Sulawesi Tenggara		Jumlah operasional fungsi perairan	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
12	03.01.04.3150	penyelenggaraan strakamtib bidang Kamsus			
	1 3150	kebijakan bidang Hankam			
	20 Sulawesi Tenggara		Jumlah kebijakan bidang Hankam	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
13	03.01.04.5076	Pembinaan Potensi Keamanan			
	1 5076	pembinaan potensi keamanan			
	20 Sulawesi Tenggara		Jumlah pembinaan potensi keamanan	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
14	03.01.04.5080	Pengedalian operasi			
	1 5080	laporan gangguan Kamtibmas			
	20 Sulawesi Tenggara		Jumlah laporan gangguan Kamtibmas	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
15	03.01.04.5081	Pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban			
	1 5081	pelayanan kesehatan dan makan satwa			
	20 Sulawesi Tenggara		Jumlah pelayanan kesehatan dan makan satwa	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
16	03.01.04.5087	Penanggulangan keamanan dalam negeri			
	1 5087	operasi bidang keamanan			

III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Program Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan/Propinsi	Keluaran	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	20	Sulawesi Tenggara	Jumlah operasi bidang keamanan	Kegiatan Dekon	Kota Kendari

B. SUMBER PEMBIAYAAN

FORMULIR : 2.1.3

Program Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Rincian Anggaran Tahun 2022					
			TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNNP	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	Non Pendamping	Pendamping	PHLN	(7)	(8)	9=(4+5+6+7+8)
1	03.01.04.3112.20	Analisis Keamanan	0.0	0.0	0.0	2,562.3	0.0	2,562.3
	1	dokumen analisis keamanan	0.0	0.0	0.0	2,562.3	0.0	2,562.3
	Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	Mengikat : 1 thn x Rp. 2562.286	0.0	0.0	0.0	2,562.3	0.0	2,562.3
2	03.01.04.3114.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan keterlibatan bidang politik	0.0	0.0	0.0	4,391.2	225.3	4,616.5
	2	layanan strategikemanan dan keterlibatan bidang politik	0.0	0.0	0.0	4,391.2	225.3	4,616.5
	Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	Mengikat : 1 thn x Rp. 4391.164	0.0	0.0	0.0	4,391.2	225.3	4,616.5
3	03.01.04.3115.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan keterlibatan bidang ekonomi	0.0	0.0	0.0	3,651.4	206.6	3,858.1
	3	layanan strategikemanan dan keterlibatan bidang ekonomi	0.0	0.0	0.0	3,651.4	206.6	3,858.1
	Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	Mengikat : 1 thn x Rp. 3651.446	0.0	0.0	0.0	3,651.4	206.6	3,858.1
4	03.01.04.3116.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan keterlibatan bidang sosial budaya	0.0	0.0	0.0	3,901.1	225.3	4,126.5
	4	layanan strategikemanan dan keterlibatan bidang sosial budaya	0.0	0.0	0.0	3,901.1	225.3	4,126.5
	Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	Mengikat : 1 thn x Rp. 3901.128	0.0	0.0	0.0	3,901.1	225.3	4,126.5
5	03.01.04.3117.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan keterlibatan bidang keamanan negara	0.0	0.0	0.0	5,060.0	212.9	5,273.0
	5	layanan strategikemanan dan keterlibatan bidang keamanan negara	0.0	0.0	0.0	5,060.0	212.9	5,273.0
	Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	Mengikat : 1 thn x Rp. 5060.039	0.0	0.0	0.0	5,060.0	212.9	5,273.0
6	03.01.04.3120.20	Kerjasama keamanan dan Keterlibatan K/L	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	17.9
	6	laporan kerja sama K/L	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	17.9
	Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	Mengikat : 1 thn x Rp. 17.884	0.0	0.0	0.0	17.9	0.0	17.9
7	03.01.04.3128.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	0.0	0.0	0.0	126,203.5	2,241.6	128,445.1
	7	Layanan Perkantoran	0.0	0.0	0.0	126,203.5	2,241.6	128,445.1
	Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	Mengikat : 1 thn x Rp. 126203.508	0.0	0.0	0.0	126,203.5	2,241.6	128,445.1
8	03.01.04.3130.20	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara	0.0	0.0	0.0	583.9	7,378.1	7,962.0
	8	operasional fungsi Sabhara	0.0	0.0	0.0	583.9	7,378.1	7,962.0
	Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	Mengikat : 1 thn x Rp. 583.912	0.0	0.0	0.0	583.9	7,378.1	7,962.0
9	03.01.04.3131.20	Penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital	0.0	0.0	0.0	448.7	7,888.9	8,337.7
	9	Layanan Perkantoran	0.0	0.0	0.0	448.7	7,888.9	8,337.7
	Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	Mengikat : 1 thn x Rp. 448.726	0.0	0.0	0.0	448.7	7,888.9	8,337.7
10	03.01.04.3133.20	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas	0.0	0.0	0.0	0.0	8,023.2	8,023.2
	10	layanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalu lintas	0.0	0.0	0.0	0.0	8,023.2	8,023.2

B. SUMBER PEMBIAYAAN

FORMULIR : 2.1.3

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Rincian Anggaran Tahun 2022					
			TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
			Non Pendamping	Pendamping	PHLN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(4+5+6+7+8)
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,023.2	8,023.2
11	03.01.04.3134.20	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan	0.0	0.0	0.0	0.0	175.0	175.0
	11	3134 operasional fungsi perairan	0.0	0.0	0.0	0.0	175.0	175.0
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	175.0	175.0
12	03.01.04.3150.20	penyelenggaraan strakamtib bidang Kamsus	0.0	0.0	0.0	2,834.1	0.0	2,834.1
	12	3150 Kebijakan bidang Hankam	0.0	0.0	0.0	2,834.1	0.0	2,834.1
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	2,834.1	0.0	2,834.1
13	03.01.04.5076.20	Pembinaan Potensi Keamanan	0.0	0.0	0.0	16,998.7	851.7	17,850.4
	13	5076 pembinaan potensi keamanan	0.0	0.0	0.0	16,998.7	851.7	17,850.4
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	16,998.7	851.7	17,850.4
14	03.01.04.5080.20	Pengedalian operasi	0.0	0.0	0.0	6,522.3	0.0	6,522.3
	14	5080 laporan gangguan Kamtibmas	0.0	0.0	0.0	6,522.3	0.0	6,522.3
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	6,522.3	0.0	6,522.3
15	03.01.04.5081.20	Pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban	0.0	0.0	0.0	255.5	0.0	255.5
	15	5081 pelayanan kesehatan dan makan satwa	0.0	0.0	0.0	255.5	0.0	255.5
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	255.5	0.0	255.5
16	03.01.04.5087.20	Penanggulangan keamanan dalam negeri	0.0	0.0	0.0	750.4	0.0	750.4
	16	5087 operasi bidang keamanan	0.0	0.0	0.0	750.4	0.0	750.4
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	750.4	0.0	750.4
		JUMLAH	0.0	0.0	0.0	174,181.0	27,428.7	201,609.8

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(dalam Juta Rupiah)

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022									
No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/ Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping	
						PLN	Hibah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	03.01.04.3112.20	Analisis Keamanan Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0	
2	03.01.04.3114.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0	
3	03.01.04.3115.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0	
4	03.01.04.3116.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0	
5	03.01.04.3117.20	Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0	
6	03.01.04.3120.20	Kerjasama keamanan dan ketertiban K/L Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0	
7	03.01.04.3128.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0	
8	03.01.04.3130.20	Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0	
9	03.01.04.3131.20	Penyelenggaraan Pengamanan Obyek Vital Sulawesi Tenggara	-			0.0	0.0	0.0	
			-			0.0	0.0	0.0	

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Pemeliharaan Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat

(dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022					
			Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/ Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping
						PLN	Hibah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	03.01.04.3133.20	Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas Sulawesi Tenggara	TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
11	03.01.04.3134.20	Penyelenggaraan Kepolisian Perairan Sulawesi Tenggara	TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
12	03.01.04.3150.20	penyelenggaraan strakamitb bidang kamisus Sulawesi Tenggara	TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
13	03.01.04.5076.20	Pembinaan Potensi Keamanan Sulawesi Tenggara	TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
14	03.01.04.5080.20	Pengedalian operasi Sulawesi Tenggara	TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
15	03.01.04.5081.20	Pelacakan dan penangkalan keamanan dan keterliban Sulawesi Tenggara	TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
16	03.01.04.5087.20	Penanggulangan keamanan dalam negeri Sulawesi Tenggara	TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
JUMLAH						0.0	0.0	0.0

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022					
			Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	PLN (7)	Hibah (8)	(9)

KENDARI, JUNI 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

KAPORENA


DRA. YULIA AGUSTIN SELFA TRIANA, M.M.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080576

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lembaga : KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Nama Unit Organisasi : POLDA SULAWESI TENGGARA
3. Kode Program APBN : 03.01.05
4. Nama Program APBN : Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

5. Pembiayaan (dalam Juta Rupiah)

Pembiayaan	2021	2022	2023	2024
a. Rupiah	81,838.9	81,144.6	114,574.4	137,489.3
1. Pendamping	0.0	0.0	0.0	0.0
2. Non Pendamping	81,838.9	81,144.6	114,574.4	137,489.3
b. PHLN	0.0	0.0	0.0	0.0
JUMLAH	81,838.9	81,144.6	114,574.4	137,489.3

II. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

1. Tujuan Program

1 Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

2. Sasaran Program

III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan/Propinsi	Keluaran	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	03.01.05.3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana			
	1	3137 layanan perkantoran			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
2	03.01.05.3142	Penindakan Tindak Pidana Umum			
	1	3142 penanganan tindak pidana umum			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah penanganan tindak pidana umum	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
3	03.01.05.3144	Penindakan Tindak Pidana Narkoba			
	1	3144 penanganan tindak pidana Narkoba			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah penanganan tindak pidana Narkoba	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
4	03.01.05.3145	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus			
	1	3145 penanganan tindak pidana ekonomi khusus			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah penanganan tindak pidana ekonomi khusus	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
5	03.01.05.3146	Penindakan tindak pidana korupsi			
	1	3146 penanganan tindak pidana korupsi			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah penanganan tindak pidana korupsi	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
6	03.01.05.3151	Penindakan Tindak Pidana Siber			
	1	3151 penanganan tindak pidana siber			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah penanganan tindak pidana siber	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
7	03.01.05.4342	Penindakan tindak pidana perairan			
	1	4342 Layanan pidana perairan			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan pidana perairan	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
8	03.01.05.4343	penindakan tindak pidana laka lantas			
	1	4343 Layanan penindakan tindak pidana laka lantas			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah Layanan penindakan tindak pidana laka lantas	Kegiatan Dekon	Kota Kendari

III. KEGIATAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan/Propinsi	Keluaran	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	03.01.05.5082	Pembinaan operasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana			
	1 5082	Laporan kerja sama pembinaan operasional penyidikan dan penyidikan tindak pidana	Jumlah laporan kerja sama pembinaan operasional penyidikan dan penyidikan tindak pidana	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
		20 Sulawesi Tenggara			
10	03.01.05.5083	Penindakan Tindak Pidana Tertentu			
	1 5083	penanganan tindak pidana tertentu			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah penanganan tindak pidana tertentu	Kegiatan Dekon	Kota Kendari
11	03.01.05.5086	Pengawasan penyidikan			
	1 5086	layanan perkantoran			
		20 Sulawesi Tenggara	Jumlah layanan perkantoran	Kegiatan Dekon	Kota Kendari

B. SUMBER PEMBIAYAAN

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Rincian Anggaran Tahun 2022					
			TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
			Non Pendamping	Pendamping	PHLN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9=(4+5+6+7+8)
1	03.01.05.3137.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	0.0	0.0	0.0	36,045.4	0.0	36,045.4
	1	layanan perkantoran	0.0	0.0	0.0	36,045.4	0.0	36,045.4
		Tidak Mengikat : 1 ttn x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	36,045.4	0.0	36,045.4
2	03.01.05.3142.20	Penindakan Tindak Pidana Umum	0.0	0.0	0.0	24,749.7	0.0	24,749.7
	2	penanganan tindak pidana umum	0.0	0.0	0.0	24,749.7	0.0	24,749.7
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	24,749.7	0.0	24,749.7
3	03.01.05.3144.20	Penindakan Tindak Pidana Narkotika	0.0	0.0	0.0	11,882.7	0.0	11,882.7
	3	penanganan tindak pidana Narkotika	0.0	0.0	0.0	11,882.7	0.0	11,882.7
		Tidak Mengikat : 1 ttn x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	11,882.7	0.0	11,882.7
4	03.01.05.3145.20	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus	0.0	0.0	0.0	637.9	0.0	637.9
	4	penanganan tindak pidana ekonomi khusus	0.0	0.0	0.0	637.9	0.0	637.9
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	637.9	0.0	637.9
5	03.01.05.3146.20	Penindakan tindak pidana korupsi	0.0	0.0	0.0	4,170.2	0.0	4,170.2
	5	penanganan tindak pidana korupsi	0.0	0.0	0.0	4,170.2	0.0	4,170.2
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	4,170.2	0.0	4,170.2
6	03.01.05.3151.20	Penindakan Tindak Pidana Siber	0.0	0.0	0.0	1,386.3	0.0	1,386.3
	6	penanganan tindak pidana siber	0.0	0.0	0.0	1,386.3	0.0	1,386.3
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	1,386.3	0.0	1,386.3
7	03.01.05.4342.20	Penindakan tindak pidana perairan	0.0	0.0	0.0	424.4	0.0	424.4
	7	Layanan pidana perairan	0.0	0.0	0.0	424.4	0.0	424.4
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	424.4	0.0	424.4
8	03.01.05.4343.20	penindakan tindak pidana laka lantas	0.0	0.0	0.0	0.0	863.1	863.1
	8	Layanan penindakan tindak pidana laka lantas	0.0	0.0	0.0	0.0	863.1	863.1
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	863.1	863.1
9	03.01.05.5082.20	Pembinaan operasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	0.0	0.0	0.0	112.2	0.0	112.2
	9	laporan kerja sama pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	0.0	0.0	0.0	112.2	0.0	112.2
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	112.2	0.0	112.2
10	03.01.05.5083.20	Penindakan Tindak Pidana Tertentu	0.0	0.0	0.0	630.1	0.0	630.1
	10	penanganan tindak pidana tertentu	0.0	0.0	0.0	630.1	0.0	630.1

B. SUMBER PEMBIAYAAN

FORMULIR : 2.1.3

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindakan Pidana

(Dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Rincian Anggaran Tahun 2022					
			TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	Non Pendamping (4)	Pendamping (5)	PHLN (6)			
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	630.1	0.0	630.1
		Mengikat : 1 thn x Rp. 630.14						
11	03.01.05.5086.20	Pengawasan penyelidikan	0.0	0.0	0.0	242.6	0.0	242.6
	11	layanan perkantoran	0.0	0.0	0.0	242.6	0.0	242.6
		Tidak Mengikat : 1 x Rp. 0	0.0	0.0	0.0	242.6	0.0	242.6
		Mengikat : 1 thn x Rp. 242.598						
		JUMLAH	0.0	0.0	0.0	80,281.4	863.1	81,144.6

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

(dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022					
			Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		
						PLN	Hibah	Kebutuhan Dana Pendamping
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	03.01.05.3137.20	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Sulawesi Tenggara	- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
2	03.01.05.3142.20	Penindakan Tindak Pidana Umum Sulawesi Tenggara	- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
3	03.01.05.3144.20	Penindakan Tindak Pidana Narkoba Sulawesi Tenggara	- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
4	03.01.05.3145.20	Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Sulawesi Tenggara	- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
5	03.01.05.3146.20	Penindakan tindak pidana korupsi Sulawesi Tenggara	- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
6	03.01.05.3151.20	Penindakan Tindak Pidana Siber Sulawesi Tenggara	- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
7	03.01.05.4342.20	Penindakan tindak pidana peraltiran Sulawesi Tenggara	- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
8	03.01.05.4343.20	penindakan tindak pidana laka lantas Sulawesi Tenggara	- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
9	03.01.05.5082.20	Pembinaan operasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Sulawesi Tenggara	- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0
			- TIDAK ADA PHLN			0.0	0.0	0.0

C. RINCIAN PEMBIAYAAN PHLN 2022

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

(dalam Juta Rupiah)

No.	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 2022					
			Sumber PHLN	Jenis (Pinjaman/Hibah)	NPPHLN	Rencana Penarikan		Kebutuhan Dana Pendamping
						PLN	Hibah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	03.01.05.5083.20	Penindakan Tindak Pidana Tertentu Sulawesi Tenggara				0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
11	03.01.05.5086.20	Pengawasan penyidikan Sulawesi Tenggara				0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
						0.0	0.0	0.0
JUMLAH			-			0.0	0.0	0.0

KENDARI, JUNI 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

KARORENA

DRA. YULIA AGUSTIN SELFA TRIANA, M.M.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69080576